

**MASA DEPAN
MONARKI INGGRIS**

**DISKON HUKUMAN
KORUPTOR**

GATRA

MAU KE MANA PAK GUB?

KARIR POLITIK ANIES BASWEDAN DI PERSIMPANGAN JALAN. KEMBALI BERTANDING DI LAGA PEMILIHAN KURSI GUBERNUR DKI JAKARTA, ATAU Mencari KESEMPATAN MAJU KE PENCALONAN PRESIDEN.



15 - 21 SEPTEMBER 2022 47



9 770853 170601

Rp 42.500 (Luar Jawa Rp 43.500)

XXVIII

RESPECT THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES



"States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public".

(Article 9, UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities).



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) di Jakarta Investment Forum.

Ajak Kolaborasi Global Bangun Jakarta

JIF 2022 berhasil mempromosikan Jakarta sebagai kota ramah investasi sekaligus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Jakarta Investment Forum (JIF) 2022 yang digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 1 September 2022, berlangsung sukses. JIF 2022 yang merupakan forum investasi tahunan bertaraf internasional itu, mengangkat tema “Investing in Resilience” dengan tujuan mempromosikan DKI Jakarta sebagai kota ramah investasi sekaligus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan layak huni. Tema itu selaras dengan isu prioritas KTT U20: “Recover Together, Recover Stronger”. Sebagai acara yang terintegrasi U20 Mayors Summit, JIF 2022 memiliki fokus yang sama, yaitu tantangan pascapandemi dan perubahan iklim.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, melalui JIF 2022 kita bisa melihat arah pembangunan Jakarta. Mulai dari apa yang sudah dikerjakan hingga

bagaimana kelanjutan ke depan, dan hal-hal yang terkait dengan kemudahan berkegiatan usaha di Jakarta. “Investasi di Jakarta bukan saja di dalam *project* yang dilakukan Pemprov DKI, melainkan investasi untuk kegiatan usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan, yang lebih banyak menggerakkan ekonomi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga Jakarta,” tuturnya.

JIF 2022 dihadiri sebanyak 793 peserta yang digelar secara hibrida. Acara itu diikuti langsung oleh delapan Duta Besar negara sahabat, yakni Korea Selatan, Malaysia, Bangladesh, Singapura, Afrika Selatan, Qatar, Bahrain, dan Maroko. Selain itu, terdapat perwakilan negara sahabat lainnya dari Britania Raya, Jerman, Belanda, Kuwait, Prancis, Denmark, Spanyol, Ceko, Turki, dan lain-lain, serta para pelaku usaha/investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Agusandra, mengungkapkan bahwa pihaknya melalui JIF 2022 mempromosikan dan memfasilitasi para investor dalam memperoleh informasi tentang proyek-proyek potensial

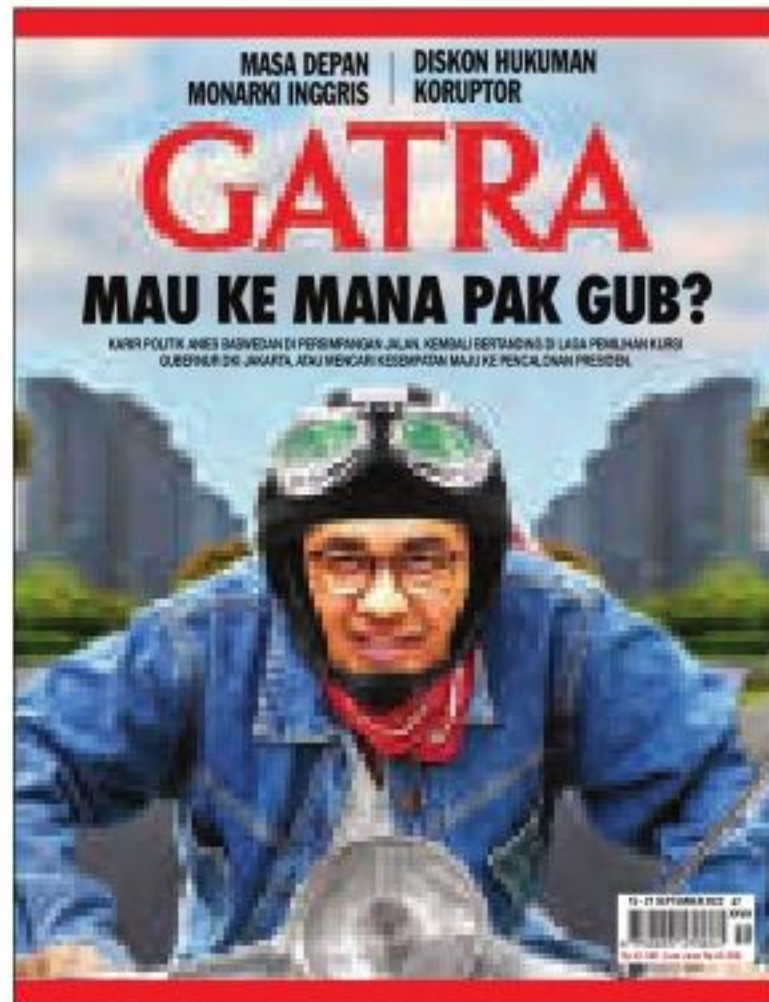
untuk pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan. “Setidaknya, terdapat 15 proyek potensial investasi hijau berkelanjutan yang ditawarkan dari tujuh BUMD, dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp280 triliun. Adapun 15 proyek tersebut meliputi berbagai sektor, di antaranya infrastruktur, transportasi, *transit-oriented development* (TOD), energi terbarukan, kesehatan, pariwisata, dan pengelolaan sampah. Peserta JIF 2022 pun dapat mengeksplorasi berbagai proyek potensial yang ditawarkan pada *project booth* yang telah disediakan,” Benni memaparkan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Onny Widjanarko, menjelaskan bahwa penyelenggaraan JIF 2022 amat tepat dengan momentum kondisi Jakarta dan Indonesia saat ini. Terlebih dengan adanya 15 proyek potensial investasi hijau pembangunan kota yang ditawarkan kepada para investor untuk dikerjasamakan melalui mekanisme investasi.

Sejumlah tokoh publik dan pembicara kelas dunia turut dihadirkan dalam gelaran JIF 2022. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan; Deputy Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo; Wali Kota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb; Senior Urban Development Specialist World Bank, Luis Miguel Triveno Chan Jan; Food and Agriculture Organization (FAO) Representative in Indonesia and Timor Leste, Rajendra Aryal; Country Director of UK Export Finance in Indonesia, Richard Michael; Investment Specialist Infrastructure Finance of Asian Development Bank (ADB), David Dovan, dan masih banyak lainnya.

Dalam JIF 2022, tiga BUMD DKI Jakarta menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan kolaborator. Pertama, PT MRT Jakarta (Persero) dengan konsorsium yang terdiri dari Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation (KIND), Korea National Railway (KNR), dan Samsung C&T, terkait MRT Jakarta fase IV. Kedua, PT Jakarta Propertindo (Persero) dengan Syctom The Greater Paris Metropolitan Waste Management. Ketiga, Perumda Paljaya dengan perusahaan asal Prancis lainnya, yaitu SIAP Greater Paris Sanitation Authority. ●

Dok. Pemprov DKI



KULIT MUKA: TIM GATRA



GATRA/ARDI WIDIYANSAH

8

Laporan Utama

ANIES, DI PERSIMPANGAN JALAN

Anies Baswedan dihadapkan kepada dua pilihan se usai menuntaskan masa baktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kans dua periode gubernur masih terbuka, meski bukan yang utama. Harus bergegas mengunci tiket parpol guna mengamankan peluang capres.

48

Hukum
Diskon Banyak hingga Bebas

Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa kini dianggap tak berbeda dengan tindak pidana umum. Selain tuntutan tak maksimal dan vonis ringan, kini koruptor mudah mendapat remisi hingga bebas lebih cepat.



GATRA/ADI WIJAYA

56

Laporan Khusus
Monarki Menatap Tak Pasti

Setelah kematian Ratu Elizabeth II, Raja Charles III kini harus menghadapi sejumlah tantangan baru. Beragam skandal pribadinya hingga wacana menolak monarki kembali terungkap lagi. Sang Raja bertekad hendak merampingkan institusi keluarga kerajaan.



GOV.UK/ROYAL.UK

6 TEROPONG

20 EKONOMI
Pemikir G20 Memikirkan Pemulihan Dunia

24 KESEHATAN
Melawan Risiko Cacat pada Anak

28 ILMU & TEKNOLOGI
Antasena, Kendaraan Hidrogen Karya ITS

32 INTERNASIONAL
Kekacauan di Irak dan Afghanistan

36 SENI
Dari Borobudur Indonesia Bertutur

NASIONAL
40 Petaka Setelah Transaksi Senjata

44 Segudang Pekerjaan Rumah DKPP

52 HUKUM
Drama Taipan Surya Rugikan Negara

65 APA & SIAPA
RUTH SAHANAYA & RINDU 3 DIVA



RUTHSAHANAYA.COM

Semua artikel ini bisa diakses melalui:
www.gatra.com

GATRA

Baca GATRA Baru Bicara

SAAT SEMUANYA JADI LEBIH MUDAH

majalah.gatra.com



Harga Berlangganan
Mulai dari Rp15.000,-



KPK Tersangkakan Tiga Kepala Daerah di Papua

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, membenarkan bahwa pihaknya telah menaikkan status tersangka kepada tiga kepala daerah di Papua atas kasus korupsi. "Penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah menyangkut tiga kepala daerah [di Papua]," kata Alexander, Rabu lalu. Tiga kepala daerah itu adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, dan Gubernur Lukas Enembe.

Ia menjelaskan penetapan Lukas dan dua kepala daerah lainnya sebagai tersangka bermula dari laporan dan keluhan masyarakat. Ia membantah penetapan tersangka Lukas Enembe sebagai bentuk kriminalisasi. "Kami sudah memiliki cukup alat bukti, kami sudah melakukan klarifikasi dengan beberapa saksi dan kami juga mendapatkan dokumen-dokumen yang membuat kami meyakini bahwa cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka," ujarnya.

Menurut Alexander, KPK menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Papua. Aduan bukan hanya datang sekali terhadap KPK. "Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, juga selalu mendapat keluhan. Masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, *complain* seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alexander.

Alexander enggan memerinci konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe. Namun, kasus yang menjerat Lukas disinyalir terkait penerimaan suap dan gratifikasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Pihak KPK juga sudah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi I Nyoman Gede Surya Mataram menyatakan pencegahan untuk Lukas berlaku hingga 7

Maret 2023.

KPK juga sudah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran rekening Lukas Enembe. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebut rekening itu mencurigakan. "Ya, tidak sesuai dengan profil," kata Ivan.

Menurut Alexander Marwata, salah satu alasan pemblokiran memang karena rekening milik Lukas Enembe menunjukkan aktivitas yang mencurigakan. "Rekening-rekening itu nilainya fantastis puluhan miliar rupiah," katanya.

Sementara itu, kepala daerah lainnya yang sudah dijadikan sebagai tersangka, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, diduga menerima suap sebesar Rp24,5 miliar dari tiga pengusaha atau kontraktor, yakni Simon, Jusieandra, dan Marten. Uang itu diduga berkaitan dengan proyek yang dime-nangi oleh ketiga kontraktor tersebut di daerah Mamberamo Tengah. Ricky Ham Pagawak belum ditahan karena kabur ke Papua Nugini. Ricky telah ditetapkan sebagai buronan.

Sepekan sebelumnya, KPK sudah melakukan jemput paksa ke Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Ia diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. ■

MS WIDODO

ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO



Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kedua kanan) dikawal menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,



Sri Mulyani

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Iming-iming Insentif jika Daerah Mampu Tekan Inflasi

Inflasi pada Agustus lalu memang sempat turun sedikit menjadi 4,6% dibandingkan bulan sebelumnya, Juli yang mencapai 4,9%. Namun, kenaikan laju inflasi seperti ini masih akan terus membayangi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berjanji akan memberikan dana insentif daerah (DID) bagi daerah yang mampu menekan laju inflasi paling rendah. "Nanti kita beri insentif untuk pemerintah daerah yang inflasinya lebih rendah dari level nasional. Itu kita beri insentif melalui DID," kata Sri Mulyani. seperti dikutip dari laman resmi pada Selasa 13 September lalu.

Seperti tahun sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran DID sebesar Rp10 miliar. Sri Mulyani mengungkapkan, biasanya kenaikan laju inflasi terjadi pada September. Dilihat dari komponennya, *volatile food* merupakan penyumbang utama. Gandum dan minyak goreng misalnya, sangat berkorelasi tinggi dengan situasi geopolitik. "Jadi pertanyaan dari sudut pandang kebijakan, bagaimana kita akan merespon inflasi yang terutama dari gangguan pasokan," ucap bendahara negara itu.

Sektor energi juga menyebabkan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Solar dan Pertalite

mengalami kenaikan harga rata-rata 30%. Kebijakan ini dinilai Sri Mulyani bisa sedikit melepaskan tekanan pada anggaran subsidi BBM. Sayangnya, di sisi lain, kenaikan harga BBM meningkatkan inflasi *administered price*. "Jadi kami mencoba untuk memastikan bahwa, pertama jika masalah datang dari sisi pasokan, kami akan mengatasi di sisi pasokan," ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut bahwa inflasi di Indonesia akan bertahan secara tetap. Diprediksikan, laju inflasi akan mencapai angka 7,5% pada akhir tahun 2022. Pasalnya, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap berbagai jenis barang. "Terutama makanan dan minuman, dari biaya transportasi juga naik," ujar Bhima kepada GATRA.

Iming-iming DID sebagai insentif bagi daerah untuk menekan laju inflasi, menurut Bhima, tidak terlalu efektif. Sebab, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi. Masalah utama inflasi adalah adanya gangguan rantai pasok. Dalam hal ini terjadinya kenaikan biaya logistik.

Bisa saja pemerintah daerah melakukan intervensi. Misalnya memberikan subsidi angkutan. Namun, intervensi semacam itu hanya akan menguntungkan pedagang.

Harga-harga komoditas di pasaran tidak bisa dipastikan akan turun. "Jadi memang harus kreativitas daerah itu dibutuhkan, di titik mana dia intervensi," ujar Bhima.

Bhima menilai iming-iming DID ini malah akan membuat pemerintah daerah saling bersaing. Sebab, kondisi perekonomian di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Ada daerah yang mengalami surplus pangan. Tapi ada juga daerah yang defisit pangan. "Daerah-daerah yang sedang mengalami surplus, dengan iming-iming insentif tadi malah akan menahan untuk memberikan stok [pangan] lebih ke daerah lainnya. Jadi harus tetap dengan kerangka koordinasi antardaerah," ia menjelaskan.

Seharusnya, Bhima mengungkapkan, untuk menekan laju inflasi, pemerintah bisa memberikan opsi penurunan harga BBM. Mengingat saat ini harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Penguatan ketahanan pangan juga sangat penting. Pemerintah harus mencari cara untuk melakukan substitusi lokal pada komoditas pangan ekspor, tujuannya agar ketahanan pangan tidak terpengaruh ketika negara asal impor melakukan proteksi. "Sekarang ini ada 30 negara yang tercatat melakukan pembatasan ekspor pangan," ucapnya. ■

RYAN PUSPA BANGSA

ANIES

DI PERSIMPANGAN JALAN

ANIES BASWEDAN DIHADAPKAN KEPADA DUA PILIHAN SEUSAI MENUNTASKAN MASA BAKTINYA SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA. KANS DUA PERIODE GUBERNUR MASIH TERBUKA, MESKI BUKAN YANG UTAMA. HARUS BERGEGAS MENGUNCI TIKET PARPOL GUNA MENGAMANKAN PELUANG CAPRES.

Slepas menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 11 jam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keluar dari lobi gedung KPK pada pukul 20.25 WIB. Di luar Gedung KPK, sudah tersedia mikrofon lengkap dengan *sound system*. Layaknya panggung pidato, Anies berdiri memberikan pernyataan kepada wartawan yang menunggunya seharian.

“Insyaallah keterangan yang tadi kami sampaikan bisa mengungkap dan menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan terang benderang dan memudahkan KPK menjalankan tugas,” katanya.

Rasa percaya diri Anies masih tebal meski kedatangannya kali ini terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Layaknya tingkat popu-

laritas dan elektabilitasnya dalam beberapa rilis survei terakhir yang cukup digdaya sebagai sosok capres potensial dari luar parpol.

Ia selalu muncul dalam tiga besar di antara capres potensial lainnya. Padahal bukan kali ini saja Anies disengol perkara hukum. Sebelum diperiksa terkait dugaan korupsi Formula E, ia juga pernah diperiksa KPK dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangun, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.

Begitu pula saat tandang ke rapat paripurna pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa lalu. Ia menunjukkan *gesture* serupa seperti saat diperiksa di KPK. Memberi pernyataan kepada media, lengkap dengan mikrofon. Padahal, sebelum sidang paripurna, Anies kerap

mendapat tekanan. Ia dianggap sibuk menempatkan orang-orangnya di akhir masa jabatan, alih-alih menyelesaikan program yang dinilai tidak berjalan.

Tudingan itu dilempar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi. Ia menunjukkan bukti di mana pada akhir Agustus lalu Anies melantik tiga pejabat eselon II, Asisten Deputy Kebudayaan Mawardi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Atika Nurahmania dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Nasrudin Djoko.

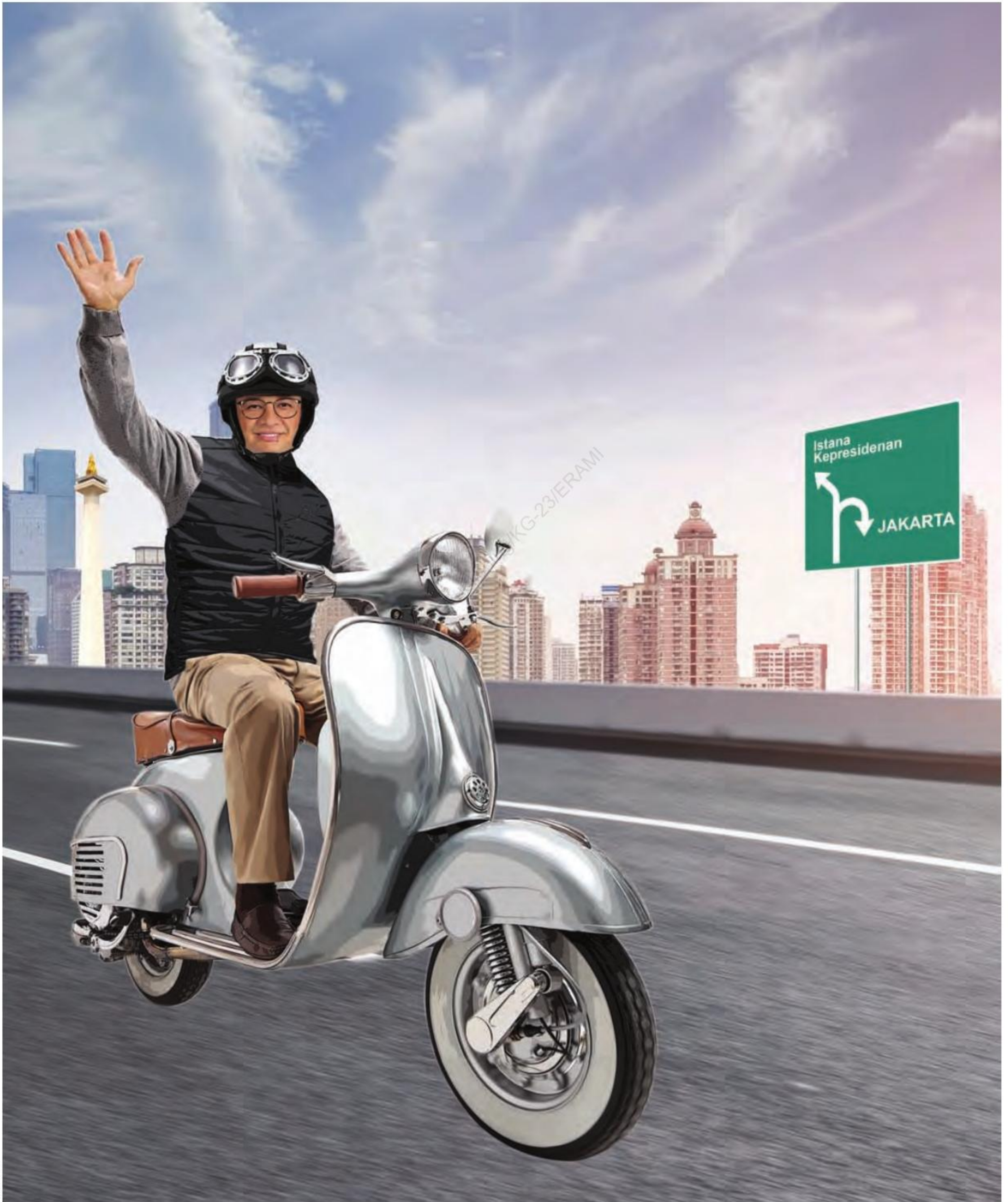
Prasetyo juga menyoroti pergantian direksi perusahaan milik pemerintah provinsi atau (BUMD) strategis, seperti Perumda Pasar Jaya, PT MRT Jakarta hingga PT Pembangunan Jaya Ancol. Untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, misalnya, Anies menempatkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi Komisaris Utama menggantikan Rene Suhardono. Ada juga nama eks Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Geisz Chalifah yang dikenal sebagai loyalis Anies.

“Ada apa? Kan masa jabatannya sebentar lagi akan habis. Kok malah bangun dinasti,” Prasetyo mengungkapkan dalam keterangan tertulis, Jumat lalu. Menurut dia Anies harusnya menuntaskan RPJMD di akhir masa jabatan. Mengutak-atik dan menempatkan orang di sekitar SKPD dan BUMD sangat ia sayangkan secara etika.

Seusai sidang paripurna, Anies mengaku akan terus melanjutkan tugas sebagai Gubernur, hingga masa jabatan berakhir. Ia bahkan masih akan menghadiri sejumlah agenda peresmian ke depan. Apakah ada agenda selain urusan administrasi gubernur setelah ia resmi meletakkan jabatannya, termasuk soal kandidat pemilihan presiden? ia memilih tidak berspekulasi lebih jauh.

“Sekarang masih 13 September,” katanya sambil tertawa. “Ancang-ancangnya kejauhan. Nanti kalau sudah dekat *aja*,” tambahnya kepada wartawan.

Popularitas Anies di beragam survei rupanya menjadi salah satu pertimbangan partai politik dalam menja-



jaki pilihan capres. Sudah Dua parpol yang kerap mengumbar ketertarikan pada sosok Anies, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem. keduanya menjadikan survei sebagai salah satu patokan menentukan capres selain suara kader akar rumput.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Syaikh kepada GATRA menegaskan, Hasil Rapat Pimpinan Nasional yang berlangsung Juni 2022 lalu mengusung sejumlah kriteria terkait capres dan cawapres. Meski masih digodok dan keputusan ditangan Majelis Syuro, suara kader akar rumput cenderung mengarah kepada sosok Anies Baswedan.

“Suasana hati [kader] tertangkap dari sisi survei. Terjadi peningkatan (dukungan pemilih PKS) terhadap Anies Baswedan, dari sekitar 10% menjadi 53%. Kita mengukur dari survei-survei itu,” katanya dalam wawancara khusus kepada GATRA (wawancara lengkap di edisi 28/46).

Meski begitu, menurutnya, untuk sampai kepada nama Anies masih sebatas persepsi kader yang tertangkap survei, bukan keputusan resmi partai. Artinya, keputusan tentang capres masih terbuka. Ia mengaku PKS masih terus berkomunikasi dengan sejumlah poros koalisi. PKS, menurutnya, banyak berkomunikasi dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat. Baginya, PKS tidak ingin berhenti di level penjangkakan, tapi ada titik kesepakatan.

“Kalau nanti disepakati tiga partai (PKS-NasDem-Demokrat), ini perahunya. setelah disepakati, siapa kandidatnya, untuk mengisi perahu dan nakhoda,” ia menambahkan.

Sementara itu, Partai NasDem dikabarkan jadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada 10 November 2022 mendatang, tepat pada momen Hari Pahlawan. Adalah Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang menyebut Anies telah menyatakan kesiapannya jika akhirnya dipilih menjadi capres.

Sebelumnya, NasDem pada rakernas Juni 2022 lalu memang sempat menetapkan tiga bakal capres diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies



Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria usai Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wagub DKI Jakarta

Baswedan, dan Panglima TNI Andhika Perkasa.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menjelaskan bahwa memang benar Anies masuk rekomendasi rakernas. Tentu, setelah

rakernas komunikasi antara NasDem dan Anies terus terbangun. Namun, sampai hari ini Anies belum secara terang-terangan mengatakan kesiapan dan partai juga belum menetapkan calon.

“Belum ada, baru sebatas rekomendasi rakernas. Tiga nama itu kan tidak mungkin semuanya, akan dipilih satu,” ia mengungkapkan kepada Alfiansyah Ramdhani dari GATRA.

Meski begitu, yang menjadi tolok ukur salah satunya adalah popularitas dan elektabilitas. Anies diakuinya menjadi salah satu figur menarik, karena selalu berada di tiga besar dalam survei. Padahal, ia bukan sosok yang terikat parpol.

“Dia menjadi menarik di situ. betul-betul terbebas dari kepentingan parpol. ini yang kemudian coba dilihat NasDem,” dia mengungkapkan.

Pandangan menarik soal Anies justru muncul dari Surya Tjandra, eks Wakil Menteri ATR/BPN dan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusannya mendukung Anies bertolak belakang dengan sikap PSI yang dikenal lantang menentang kebijakan Anies. Bagi Surya, tidak ada sosok lain yang lebih tepat sebagai capres selain Anies. Keputusannya itu didasarkan kepada penilaian objektif.

Selama menjabat sebagai wakil menteri, ia mengaku sering berinteraksi dengan Anies dalam sejumlah program bersama Pemprov DKI Jakarta. “Saya melihat Anies itu sosok lengkap. Memiliki pemahaman, konsep, keberanian, dan kemampuan mengeksekusi,” katanya kepada wartawan GATRA Muhammad Muttaqin.

Sementara itu, dari sisi dinamika pencapresan, Anies menurutnya berpeluang paling besar. Indikatornya, percakapan publik yang ramai khususnya di dunia maya. Di media sosial, berita *online*, Anies salah satu yang tertinggi menyaingi Ganjar. Percakapan publik itu menandai sosok Anies dalam konteks elektoral. Di tahap awal, ia memenuhi syarat sebagai tokoh yang paling dikenal.

“Kedua disukai, baru kemudian dipilih. Sekarang tinggal bagaimana strateginya agar yang suka lebih banyak,” ia menjelaskan.

Justru, berakhirnya

masa jabatan sebagai gubernur, menurut Surya, bisa menjadi momentum Anies meningkatkan elektabilitas, memperluas dukungan karena tidak hanya terfokus di Jakarta. Kesempatan berkeliling Indonesia lebih luas, menyapa daerah dan mendengarkan langsung harapan masyarakat. Soal dukungan parpol yang masih minim, tidak menjadi soal.

Ia melihat partai yang ada sudah memiliki kecocokan. “PKS itu memang oposisi, saya kira sangat serius.

“Dia menjadi menarik disitu. Betul-betul terbebas dari kepentingan parpol. Ini yang kemudian coba dilihat NasDem.”

AHMAD ALI

Wakil Ketua Umum Partai NasDem



Sementara NasDem mulai mengambil posisi mempersiapkan masa depan. Mereka punya pertimbangan. Keduanya menurut saya masuk akal mendukung Anies,” katanya.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai Anies harus segera mempersiapkan diri merebut tiket capres. Kiprah di level gubernur menurutnya sudah tidak menantang lagi, meski diakuinya masih terbuka lebar mengingat ia meninggalkan kesan mendalam. Terlebih, sejauh ini hanya ada dua partai saja yang ‘bising’, bahkan ada yang pasang badan meski Anies tidak berpartai.

“Jika melihat hasil survei mengindikasikan, ada orang Indonesia di ujung sana di berbagai daerah yang menghendaki lebih dari sekedar gubernur. Ini harus ditangkap positif oleh Anies,” katanya.

Anies, menurutnya lebih ingin menunjukkan kapabilitasnya lebih dari seorang gubernur. Dan apa yang dilakukannya sudah di atas rata-rata gubernur yang ada. Misal, cara dia membangun global network. Itu sudah satu nilai lebih dibanding yang lain, dan bagaimana mengurus Jakarta yang kompleks ini dengan relatif baik.

Justru setelah melepas posisinya sebagai gubernur, Anies memiliki peluang mempromosikan diri. Momen ini harus dipersiapkan, dan ia yakin Anies akan mendapat dorongan dari berbagai kalangan dan partai yang siap mengusungnya menjadi capres.

Soal dinamika pada sejumlah poros koalisi baginya tidak menyebabkan figur seperti Anies menghilang. “Saya tidak melihat manuver Puan sangat berpengaruh bagi Anies,” katanya.

Dua partai utama yang saat ini terindikasi mengarah kepada Anies seperti NasDem dan PKS, menurutnya, sudah cukup. Hanya perlu merapikan barisan saja. Yang membuatnya pelik, justru tawar menawar posisi RI 2, karena ia melihat Partai Demokrat sangat *concern* pada posisi tersebut. ■

SANDIKA PRIHATNALA



PILIHAN-PILIHAN ANIES



MAJU CAPRES

Anies Baswedan punya peluang menjadi Capres/Cawapres asal membawa 'tiket' dari Parpol.

POTENSI DUET:

- ▶ **Survey Indopol:** Anies-AHY (Poros potensial: Nasdem-Demokrat-PKS)
- ▶ **Survey SMRC:** Anies-AHY (Poros potensial: Nasdem-Demokrat-PKS)
- ▶ **Survey DTS Indonesia:** Anies-RK
- ▶ **Survey Trust Indonesia Research and Consulting:** Anies-Ganjar

Anies pernah berjanji tidak akan maju pemilihan presiden jika Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai Capres. Sejauh ini, Prabowo mengisyaratkan maju kembali karena menerima mandat Capres dari Partai Gerindra. Jika janjinya dipenuhi, peluang menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya terbuka lebar.



ORANG-ORANG DI BELAKANG ANIES



▶ TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TGUPP)

Dibentuk sebagai mata, telinga, Gubernur Anies Baswedan demi memastikan visi dan misi tercapai sepanjang masa bakti. Berisi puluhan tokoh-tokoh, ahli, dan tenaga profesional. Diantaranya eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Marco Kusumawijaya, Alvin Wijaya. Belakangan, nama-nama itu menyatakan mundur. Kerap dikritik karena nir-efektif dan cenderung boros anggaran.

▶ SUNNY TANUWIDJAJA - SURYA TJANDRA

Dua nama diatas belakangan diperbincangkan karena berbalik mendukung Anies. Sunny sebelumnya dikenal sebagai 'tangan kanan' eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sementara Surya Tjandra merupakan eks Wakil Menteri ATR/BPN. Keduanya merupakan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang rajin mengkritik kebijakan Anies.

Sumber: Riset GATRA, diolah

Anies Baswedan selalu muncul dalam tiga teratas survei popularitas/elektabilitas diantara para capres unggulan

POPULI CENTER

(FEBRUARI 2022)



INDIKATOR POLITIK INDONESIA

(APRIL 2022)



SURVEI INDO RISET

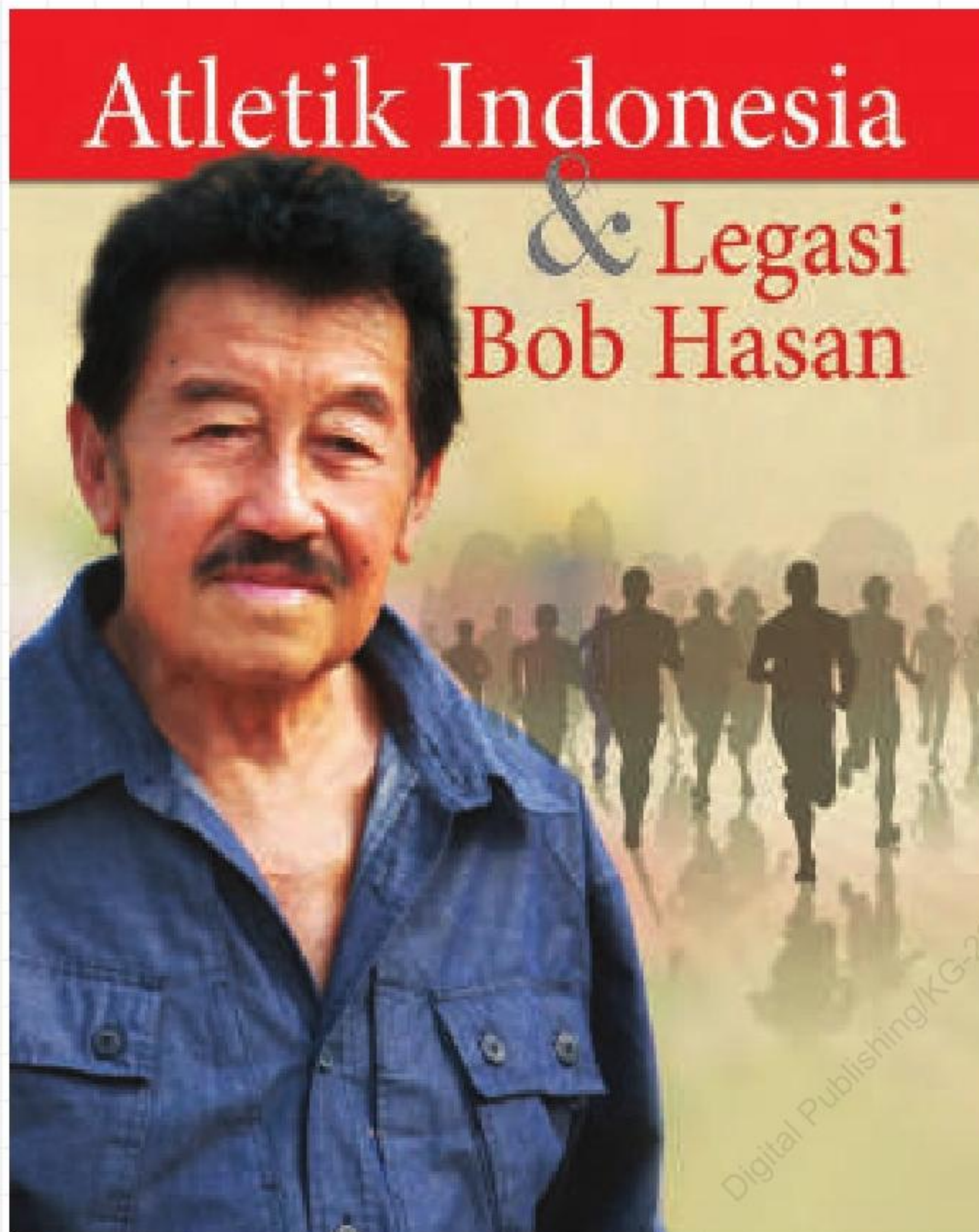
(SEPTEMBER 2022)



SURVEI SMRC

(SEPTEMBER 2022)





TELAH TERBIT

Atletik Indonesia dan Legasi Bob Hasan merangkum beberapa periode perjalanan atletik dari era sebelum kemerdekaan, terutama dari 1976 hingga 2020. Buku ini mengisahkan jerih payah Bob Hasan membangun fondasi atletik di Indonesia, hingga akhirnya menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional melalui PB PASI.

HARGA
Rp120.000,-



Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Umum PB PASI 2021-2025

”

Buku ini tidak hanya mengungkapkan tantangan-tantangan dan strategi dalam pembinaan atletik, tetapi juga mengajak kita semua sebagai bangsa untuk berkontribusi dalam menyehatkan masyarakat, sekaligus mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional melalui ajang atletik.



Tigor Tanjung
Sekjen PB PASI 2021-2025

”

Orang boleh saja bilang bahwa dia ini, kan, temannya Pak Harto. Namun ketika Pak Harto sudah tidak berkuasa, Pak Bob tetap berkomitmen dalam memimpin PASI. Bagaimana gilanya dia kepada atletik.

Pemesanan bisa menghubungi Layanan Pelanggan :

Telp. (021) 7973535 | Direct: 081288002822 (Puspita) | E-mail: sirkulasi@gatra.com



GATRA/ARDI WIDIYANSAH

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menerima berkas rekomendasi dari masing-masing fraksi saat memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta

PENGGANTI ANIES PILIHAN ISTANA

DPRD DKI MENGAJUKAN TIGA NAMA CALON PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA PENGGANTI ANIES BASWEDAN, MULAI KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN HINGGA SEKRETARIS DAERAH DKI JAKARTA. SECARA PARALEL, KEMENDAGRI MENYIAPKAN TIGA NAMA LAIN. KEPUTUSAN AKHIR ADA DI TANGAN PRESIDEN.

Hanya ada empat nama yang muncul dalam pembahasan usulan calon penjabat Gubernur DKI Jakarta di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Tiap-tiap fraksi di DPRD DKI Jakarta mengusulkan tiga nama, yang setelah dikumpulkan dan dikelompokkan ternyata hanya berputar di empat nama itu saja. Nama yang dimaksud adalah Heru Budi Hartono, Juri Andiantoro, Bahtiar, dan Marullah Matali.

Akhirnya, Rapimgab melakukan pemungutan suara untuk mencari tiga nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Ini dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri memang hanya meminta tiga nama untuk diajukan. Hasil pe-

mungutan suara menyatakan bahwa Heru Budi Hartono mendapat sembilan suara, Marullah Matali sembilan suara, Juri sebanyak tiga suara, dan Bachtiar mendapat enam suara.

Rapat yang dihadiri oleh pimpinan sembilan fraksi itu pun memutuskan bahwa tiga nama dengan suara terbanyak itulah yang akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri. "Heru Budi Hartono, Bahtiar, dan Marullah Matali. Ditandatangani ketua Wibi Andriano Caniago," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa lalu.

Nama-nama yang muncul ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu belakangan. Ketiganya dianggap punya peluang yang sama besar untuk menjadi penjabat Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Sedikit membahas nama-nama yang muncul, pertama adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, yang telah menduduki jabatan itu sejak 27 Juli 2020. Sebelumnya, lulusan STPDN asal Bone, Sulawesi Selatan, ini pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri dan Kasubdit Ormas Ditjen Polpum.

Pada tahun 2020 lalu, Bahtiar menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau. Jabatan itu hanya diembannya selama 73 hari. Ia menduduki jabatan itu karena Gubernur Kepri eksisting, Isdianto, sedang cuti untuk menghadapi Pilkada 2020.

Sejak masuk bursa pengganti Anies, Bahtiar irit bicara mengenai kansnya terpilih menjadi Penjabat Gubernur. Saat dimintai tanggapan oleh GATRA melalui pesan teks, ia hanya menjawab dengan stiker animasi kartun wayang yang sedang memohon doa dan stiker ucapan terima kasih dengan motif merah putih, tanpa sepatah kata apa pun.

Kandidat berikutnya adalah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali. Salah satu keunggulan Marullah dibanding

kandidat lainnya adalah bahwa ia merupakan putra Betawi asli yang sudah berkiprah di Pemprov DKI sejak tahun 1996. Sebelum menduduki jabatannya sekarang, Marullah pernah menjadi Walikota Jakarta Selatan.

Ia menjabat posisi itu selama kurang lebih tiga tahun dari 5 Juli 2018 hingga 5 Februari 2021. Selain itu, ia juga pernah bertugas sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian dan Kependudukan. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Provinsi DKI Jakarta.

Semasa berkarier, Marullah pernah mendapatkan dua penghargaan. Ia memperoleh Penghargaan Masa Kerja 15 Tahun dari gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011. Setahun kemudian, ia memperoleh Penghargaan

Satyalancana Karya Satya Kelas 1 dari Presiden RI.

Nama terakhir adalah Heru Budi Hartono yang menjabat posisi Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Di lingkup Provinsi Jakarta, ia punya pengalaman sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2015-2017.

Ia juga merupakan eks Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014. Ia sudah cukup lama malang melintang di Jakarta, setidaknya sejak menjadi Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 1993.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan bahwa fraksinya punya tiga kriteria tersendiri untuk penjabat yang pantas menjadi pemimpin ibu kota. Pertama,

MEKANISME PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA



KEMENDAGRI BERSURAT PADA DPRD
DKI Jakarta meminta usulan tiga nama

PIHAK DPRD MENGADAKAN RAPAT
dan sidang untuk memberikan usulan nama

KEMENDAGRI JUGA MENYIAPKAN USULAN 3 NAMA
di samping nama yang diusulkan DPRD

ENAM NAMA YANG MASUK
diusulkan ke forum TPA



SIDANG TPA YANG DIPIMPIN PRESIDEN
mengeluarkan keputusan nama Penjabat Gubernur DKI

NAMA KANDIDAT DIBAHAS
di sidang TPA yang dipimpin Presiden

KANDIDAT DICEK RIWAYAT DAN REKAM JEJAKNYA
oleh lintas kementerian dan lembaga

Sumber: Pernyataan Mendagri dalam Raker dengan Komisi II DPR RI

ia harus menguasai persoalan dasar dan kultur Jakarta. Kedua, ia haruslah seorang ASN eksekutor yang bisa melakukan percepatan eksekusi terhadap program pemprov yang masih tertunda. Ketiga, ia punya kemampuan menjaga harmonisasi antara eksekutif, legislatif, Forkopimda, dan pihak-pihak lain. “Ini penting. Ketika lakukan percepatan, maka dibutuhkan harmonisasi itu,” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengirimkan surat kepada DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan usulan tiga nama. Inilah yang membuat DPRD DKI melakukan Rapingab untuk menentukan nama usulan calon pejabat. Sementara itu, secara paralel Kemendagri juga mengajukan tiga nama untuk dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga total ada enam nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan kepada Presiden.

Setelah enam nama diterima, Kepala Negara akan menggelar rapat untuk menentukan siapa pejabat gubernur yang dipilih dari usulan tersebut. Sebelumnya dilakukan proses *screening* oleh tim penilai akhir (TPA) yang bekerja sama dengan lembaga lain, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mekanisme pemilihan pejabat gubernur dan pejabat bupati/wali kota itu dijelaskan Tito kepada Komisi II. Meski undang-undang menyatakan bahwa presiden dan mendagri punya kewenangan penuh untuk menunjuk siapa pejabat kepala daerah, tetapi kata Tito, hasil diskusi dengan ombudsman, masyarakat sipil, dan ahli tata negara menyatakan perlu diambil jalan tengah yang lebih demokratis dan transparan.

Maka dibuatlah mekanisme pemilihan nama pejabat kepala daerah dengan mengambil usulan dari DPRD, Kemendagri dan gubernur. “Mekanisme ini sudah mencukupi untuk mekanisme demokrasi, kemudian dari segi transparansi ini lebih transparan, tidak otoriter ditentukan presiden atau mendagri sendiri. Meskipun UU memberikan kewenangan itu,” Tito menjelaskan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus lalu.

Di luar itu, Tito menegaskan bahwa pejabat harus merupakan pimpinan tinggi madya atau eselon I. “Aturannya kan jelas sekali. Aturannya harus pejabat pimpinan tinggi madya. Artinya harus berasal dari aparatur sipil negara. Undang-undang mengatakan seperti itu. Kriterianya pejabat pimpinan tinggi madya, artinya eselon I,” kata Tito.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, melihat kemungkinan adanya intervensi pemerintah pusat dalam pemilihan pejabat Gubernur DKI Jakarta. Meski begitu, Ujang memaklumi hal tersebut karena memang ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Jalur pengajuan dari DPRD pun dinilainya hanya jadi formalitas belaka. “Yang menunjuk tetap pusat, Kemendagri atau Presiden. Kecuali berdasarkan pemilihan,” kata Ujang saat dihubungi GATRA pada Senin malam lalu.

Maka dari itu, Ujang mengatakan bahwa pemilihan ini boleh jadi dilakukan berdasarkan kedekatan dan kepentingan dengan Istana. Inilah yang menurutnya harus diwaspadai. Menurutnya, Kemendagri dan Presiden harus berjiwa negarawan dengan tidak mencampurkan pemilihan pejabat dengan kepentingan politik di luarnya.

“Ucapan gagasan dan tindakan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, dalam konteks pemilihan pejabat, tunjukkan pemerintah itu berjiwa negarawan, tidak untuk kepentingan pragmatis pemilu atau pilkada,” katanya.

Hal berbeda disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw. Dia coba mengumpulkan ingatan publik soal polarisasi yang terjadi di pemilihan gubernur 2017 lalu. Menurutnya, residu polarisasi tersebut menjadi pekerjaan

“Anies ini termasuk salah satu figur yang, katakanlah, pemicu politisasi SARA di pilkada 2017 lalu. Mestinya penggantinya adalah orang atau pejabat yang bisa menetralsisir ini dan membangun Jakarta yang lebih kondusif dalam konteks pemilu dan pilkada 2024.”

JERRY SUMAMPOUW

Koordinator Komite Pemilih Indonesia

CALON PENJABAT DKI USULAN DPRD



HERU BUDI HARTONO

- Kepala Sekretariat Presiden
- Memperoleh 9 suara di voting DPRD DKI
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta tahun 2015-2017
- Walikota Jakarta Utara tahun 2014



MARULLAH MATALI

- Sekretaris Daerah DKI Jakarta
- Memperoleh 9 suara di voting DPRD DKI
- Walikota Jakarta Selatan tahun 2018-2021
- Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan



BAHTIAR

- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
- Memperoleh 6 suara di voting DPRD DKI
- Penjabat Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2016

**Diolah dari berbagai sumber*

rumah untuk pejabat terpilih nantinya.

"Anies ini termasuk salah satu figur yang, katakanlah, pemicu politisasi SARA di pilkada 2017 lalu. Mestinya penggantinya adalah orang atau pejabat yang bisa menetralkan ini dan membangun Jakarta yang lebih kondusif dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024," kata Jerry saat dihubungi pada Selasa lalu.

Figur yang dibutuhkan itu adalah sosok yang netral yang bisa membangun sinergi dari pembelahan yang terjadi sampai saat ini. Netral, Jerry menuturkan, maksudnya bukan berarti dia merupakan sosok antitesis dari Anies. Sebab, bisa saja pilihan itu tidak terlalu baik karena justru akan memperuncing pembelahan. "Dengan netral, konsolidasinya akan lebih oke di tingkat masyarakat, penerimaannya lebih baik dan tidak meneruskan polarisasi ini," katanya.

Sependapat dengan Ujang, Jerry juga berpandangan sosok yang dibutuhkan Jakarta adalah pejabat yang punya kepemimpinan kuat. Nama-nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta

sekarang, bagi Jerry, sudah cukup masuk dalam kriteria itu.

"Ini penting karena birokrasi sedikit banyak digunakan dalam kegiatan politik atau dipolitisasi untuk kepentingan kepala daerah atau gubernurnya. Pembelahan terjadi di sana, sehingga orang yang punya kemampuan memahami betul birokrasi itu akan menolong," kata Jerry.

Kriteria lain, orang itu tak punya kepentingan politik praktis di Pemilu 2024. Pejabat yang hanya menjalankan masa transisi ini sampai November 2024, diharapkan bisa mengelola pemerintahan dengan lebih proporsional dan tidak ada kepentingan lainnya selain memperlancar proses pemerintahan dan Pilkada 2024 nanti.

"Figur itu juga harus bisa diterima DPRD. Karena mereka akan jadi mitra kerja. Jadi, penerimaan ini penting agar polemik antara pemprov dan DPRD mungkin bisa diminimalisir atau dihilangkan karena bisa menyita konsentrasi," katanya.

Jerry pun mencatat bahwa konsolidasi masyarakat masih menjadi tugas

prioritas pejabat DKI selanjutnya. Tak hanya meredam polarisasi, pejabat juga harus bisa memperbaiki birokrasi dan pelayanan masyarakat.

Baik Ujang maupun Jerry sepakat bahwa posisi pejabat di DKI Jakarta begitu strategis. Jerry mengatakan bahwa pejabat ini selevel dengan menteri. Artinya, Pejabat atau Gubernur DKI Jakarta lebih tinggi sedikit posisinya dibanding kepala daerah lain.

"Di situ saya kira kepentingan strategisnya karena ibu kota negara jadi barometer negara. Isu-isu besar juga dari sini. Makanya kalau di sini adem, saya agak optimistis bahwa proses Pemilu 2024 akan lebih adem," kata Jerry.

Dengan posisi strategis ini, pada hemat Jerry, Presiden Jokowi harus memikirkan dengan matang siapa sosok yang cocok. "Fokus dan prioritas Presiden ini ke isu apa, itu juga penting. Kalau pintar tapi enggak fokus isu, itu juga kurang efektif kerjanya. Tetapi kalau orang biasa, cocok dengan agenda Presiden, tentu dia akan berhasil," ujarnya. ■

HIDAYAT ADHININGRAT P.,
ERLINA FURY SANTIKA, DAN YOGA A. PRATAMA

PRASETYO EDI MARSUDI

Ketua DPRD DKI Jakarta

SEMUA DEKAT DENGAN JOKOWI

DPRD DKI JAKARTA SUDAH MEMILIH TIGA NAMA CALON PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA. SOSOK TERPILIH DIHARAPKAN BISA LANGSUNG MENYELESAIKAN PERMASALAHAN JAKARTA YANG TERSISA HINGGA 2024. KERJA TGUPP SELESAI BERSAMA DENGAN BERAKHIRNYA JABATAN ANIES BASWEDAN SEBAGAI GUBERNUR DKI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk menentukan tiga nama usulan calon penjabat gubernur pengganti Anies Baswedan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 13 September lalu.

Tepat pukul 14.50 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, selaku pimpinan rapat membuka rapat. Kemudian, Prasetyo meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Firmansyah, mengumpulkan tiap usulan dari masing-masing fraksi. Setelah terkumpul, Prasetyo membacakan nama-nama kandidat Penjabat Gubernur. Tiga nama terpilih untuk diusulkan sebagai calon penjabat gubernur dan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tiga nama itu masing-masing Heru Budi Hartono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan, Marullah Matali, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Usai rapat, Prasetyo menjelaskan mekanisme pemilihan dan harapannya pada penjabat Gubernur DKI Jakarta

kepada para wartawan termasuk Erlina Fury Santika dari GATRA. Berikut petikannya:

Bagaimana tindak lanjut dari tiga nama calon penjabat gubernur yang diusulkan oleh DPRD DKI?

Besok (Rabu, 14 September 2022) akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Bahwa yang terjaring nama ada tiga nama yaitu Pak Heru Budi Hartono, Pak Marullah Matali, dan Pak Bahtiar. Angkanya [jumlah suara] juga 9-9-6. Dan yang keempat adalah Pak Juri Ardiantoro, tapi karena tiga terbesar, hasilnya ya itu tadi yang kita bicarakan di dalam rapat pimpinan gabungan.

Menurut Anda, apa ketiga nama itu sudah sesuai kriteria ideal sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta?

Saya rasa mereka menguasai. Dari satu sisi, Pak Bahtiar itu dari kementerian (Kemendagri). Dia pernah juga menjabat sebagai Plt. gubernur, Pj. gubernur, ya. Terus Pak Marullah sebagai Sekda DKI pernah menjadi Wali Kota Jakarta Selatan. Begitu juga Pak Heru, pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala BPKD (DKI Jakarta) zamannya Pak Jokowi. Saya rasa mumpunilah. Tinggal kami serahkan kepada Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) dan Pak Presiden (Jokowi) siapa yang dipilih di antara tiga.

Bagaimana pertimbangan awal nama-nama itu muncul?

Kalau nama-nama di sini kan dari fraksi masing-masing. Saya enggak tahu. Tadi saya kumpulkan di Rapimgab, itu hasilnya. Jadi bukan intervensi saya, intervensi Bu Zita (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani), Pak Khoirudin (Wakil Ketua DPRD DKI, Khoirudin), atau teman-teman lain, Bu Rani (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani) atau siapa pun. Enggak. Ya silakan. Ternyata, kok, kumpulan nama itu hampir sama, gitu loh. Ya itulah, putra-putra terbaik yang bisa memperbaiki masalah-masalah Jakarta.

Nama-nama ini bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di Jakarta?

Ya, itu terserah Pak Jokowi, siapa nama di antara tiga, kan dia meminta melalui surat edaran menteri dalam negeri. Kami serahkan tiga nama. Karena apa pun ceritanya, ya, harus tahu masalah Jakarta.

Jadi, Jakarta ini enggak bisa dibuat main-main, karena satu kilometer dari Istana masih ada daerah kumuh, daerah banjir. Jadi perlu ada pemerataan pembangunan juga. Nanti setelah penjabat itu terpilih, kami dengan teman-teman DPRD akan membuat suatu seremoni, *coffee morning*-lah. Yuk, kita mau *apain nih* Jakarta.

Dari nama-nama tersebut, siapa yang paling dekat dengan Jokowi?

Semua dekat.

Kedekatan itu jadi landasan?

Pak Presiden dan Menteri Dalam Negeri meminta kepada kita usulan tiga nama. Ini terjadi sekarang hari ini,

secara demokratis ya, transparan dan akuntabel. Dan ini semua kesepakatan kami. Jadi kami sebagai anggota fraksi, walaupun pimpinan DPRD, turut patuh kepada putusan fraksi.

Kemarin-kemarin DPRD melakukakan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Apakah dalam pertemuan itu sempat membahas soal tiga nama calon penjabat gubernur ini?

Enggaklah.

Apa harapan dari Jokowi soal pilihan DPRD?

[Keputusan akhir] Itu haknya Pak Jokowi. Yang penting, pekerjaan rumah permasalahan Jakarta yang belum terselesaikan harus dieksekusi.

Kemendagri juga mengantongi tiga nama untuk diusulkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Apakah nama-nama itu sama dengan yang diusulkan DPRD?

Enggak mengerti kalau itu.

Kalau tiga nama dari DPRD tidak terpilih, tetapi yang terpilih dari Kemendagri, apa tidak masalah bagi DPRD?

Tidak ada masalah, yang penting kita mengusulkan. Kan kami disuruh mengusulkan tiga nama secara demokratis. Kami rapat

pimpinan, Bamus (Badan Musyawarah), dan akhirnya kami putuskan ada tiga nama.

Ada perbedaan kewenangan antara penjabat dengan gubernur?

Sama. Haknya sama. Dia eselon satu dan dari Kementerian [atau dari unsur lain]. Silakan. Pak Bahtiar itu kan dari Dirjen [Kemendagri]. Bukan Plh atau Plt, beda, ini penjabat. Jadi dia punya hak penuh untuk merombak perencanaan, apa saja yang menjadi masalah Jakarta.

Apakah penjabat boleh membuat program baru atau melanjutkan program yang sudah ada?

Boleh saja kalau itu baik.

Dalam menjalankan tugas, penjabat dibantu siapa? Tidak ada wakil?

Kan ada asisten, sekda, deputi. Deputi tidak diganti. Yang diganti jabatan politik, seperti gubernur dan wakil gubernur. Termasuk saya, 2024 nanti berlomba masuk sini lagi.

Kalau misalnya Sekda DKI (Marullah Matali) yang dipilih Jokowi, nantinya harus ada sekda lagi atau bagaimana?

Harusnya sih ada.

Nanti akan ada tim seperti TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) setelah pimpinan pemerintahan DKI dipimpin penjabat?

TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia (Anies Baswedan) yang banyak merugikan. Ini sebagai salah satu contoh, jalan di Jakarta sekarang pendek-pendek. Saya menemukan di Kemang, ada tali air, lalu ditambah trotoar, dilebarkan. Ternyata tali air itu enggak *nyambung* dengan trotoarnya. Jadi buntu tengah-tengah. Apa dampaknya? Banjir.

Jadi, harus rasional kalau bangun. Yang mana yang harus dibangun? Pinggir daerah Jakarta juga harus dapat persamaan pembangunan. Jangan hanya di tengah kota, *casing* saja bagus tetapi pinggirnya jelek. Itu enggak boleh. Itu ide TGUPP. Enggak perlu, *ngapain* dengan *segitu* banyaknya. Banyak orang-orang pintar di sini.

TGUPP ini selesai dengan masa jabatan Anies Baswedan selesai?

Iya, 16 Oktober 2022 nanti. ■



PRESIDENSI G20

Pemikir G20 Memikirkan Pemulihan Dunia



YOUTUBE T20 INDONESIA

Komunike T20 menjadi Bank Ide pemikiran *think-thank* di seluruh dunia. Memberikan rekomendasi bagi pemimpin negara dalam Presidensi G20 Indonesia November nanti. Menjadi landasan konsensus dan kerja sama yang menurunkan tensi dalam konferensi G20 mendatang.



T20 Summit yang berlangsung di Nusa Dua, Bali

Lima rekomendasi disampaikan Komunike T20 pada gelaran T20 Summit pada 5-6 September lalu di Nusa Dua, Bali. Ini merupakan pembahasan panjang melalui berbagai forum diskusi dari kelompok pemikir atau *think thank* yang inti anggotanya adalah peneliti yang asalnya dari 20 negara-negara anggota G20.

Setidaknya T20 Indonesia telah mengumpulkan 764 abstrak kebijakan singkat. Serta menghasilkan 130 ringkasan kebijakan yang ditulis oleh lebih dari 200 penulis dari jaringan *think tank* di seluruh dunia.

Rekomendasi ini telah dikembangkan melalui proses secara selektif. Untuk memastikan output yang ketat, T20 Indonesia juga telah menyelenggarakan tiga acara sampingan utama, yaitu Global Solutions Summit, Global Policy Forum, dan Global Dialogue. “Selain itu, Satgas T20 Indonesia juga menggelar lebih dari 200 *side event* dari sembilan satgas,” Lead Co-Chair T20 Indonesia Bambang Brodjonegoro menjelaskan dalam KTT Summit T20 di Nusa Bali, Senin pekan lalu.

Sebagai informasi, Think20 (T20) adalah grup keterlibatan resmi G20 yang menyatukan lembaga *think tank* dan pusat penelitian terkemuka di seluruh dunia. T20 Indonesia ini dipimpin oleh Centre For Strategic and International Studies (CSIS) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FE UI).

Ada sembilan satgas dengan masing-masing tugas, yaitu Satgas 1 mengenai Perdagangan Bebas, Investasi dan Industri berkelanjutan. Satgas 2 tentang Konektivitas Digital, Keamanan siber, dan Pemberdayaan.

Satgas 3 membahas tentang Target Iklim, Transisi Energi dan Perlindungan Lingkungan. Adapun Satgas 4 mengenai Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan.

Untuk Satgas 5 fokus pada Ketimpangan, Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan. Kemudian Satgas 6 mengenai Keamanan Kesehatan Global dan Covid-19. Satgas 7 tentang Keuangan Internasional dan Pemulihan Ekonomi dan Satgas 8, yakni mengenai Infrastruktur dan Pembiayaan yang Tangguh. Terakhir Satgas 5- Kerja Sama Global untuk pembiayaan SDGs.

“Ini (T20) berfungsi sebagai Bank Ide G20, dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20,” ungkap Bambang, mantan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju ini. Ia menjelaskan, dalam Komunike T20, T20 Indonesia mendorong lima rekomendasi kebijakan utama.

Rekomendasi pertama adalah dalam hal mendorong pemulihan dan ketahanan. Lalu kedua untuk mempercepat kemajuan menuju Net Zero Emissions (NZE). Serta ketiga untuk mengatur transformasi menuju masyarakat digital. Keempat adalah menjadikan ekonomi lebih inklusif dan berpusat kepada rakyat serta terakhir adalah menghidupkan kembali tata kelola global.

Menurutnya, posisi T20 sangat penting dalam memastikan masalah yang akan diselesaikan oleh para pe-



Bambang Brodjonegoro

GATRA/EVA AGRANA ALI

Lima rekomendasi kebijakan utama T20 Komunike untuk KTT G20

- Mendorong pemulihan dan ketahanan
- Mempercepat kemajuan menuju Net Zero Emissions (NZE)
- Mengatur transformasi menuju masyarakat digital
- Menjadikan ekonomi lebih inklusif dan berpusat pada rakyat
- Menghidupkan kembali tata kelola global.

Sumber : Komunike T20 Indonesia



mimpin G20. Selain itu, kebijakan yang direkomendasikan oleh T20 dapat membekali para pemimpin G20 dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu penting melalui analisis akademis yang ketat, beserta rekomendasi yang harus diambil.

Pada kondisi saat ini, Bambang menuturkan, pemulihan ekonomi masih terlihat tidak merata, peningkatan ketidaksetaraan, dan gesekan global yang menyerukan tindakan terkoordinasi global, sehingga kehadiran T20 menjadi makin penting. “Melalui *output* utamanya, Komunike T20 Kepresidenan Indonesia mendorong beberapa rekomendasi kepada para pemimpin G20 untuk mengatasi gejolak saat ini,” paparnya.

T20 Indonesia juga mendesak para pemimpin G20 agar segera melakukan upaya bersama untuk mencapai pemulihan yang inklusif dan lebih kuat, restrukturisasi arsitektur kesehatan global, dan memanfaatkan transformasi digital. Serta mempercepat transisi energi berkelanjutan, juga membangun kerjasama yang lebih baik dan solid.

Dalam semangat kerja sama, G20 dapat mengatalisasi pemulihan bersama dari berbagai guncangan yang menimpa dunia setelah krisis keuangan berkala. Juga pergeseran kekuatan geopolitik serta berbagai dampak perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan efek riak dari Perang Rusia- Ukraina

dan sanksi ekonomi terkait.

Hal lain yang juga menjadi bahasan dari T20 di bidang keuangan global dan pemulihan ekonomi adalah mengenai upaya mengatasi utang pada negara berpendapatan menengah dan rendah. Seperti apa jumlah stimulus yang dibutuhkan untuk menahan dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Isu lain adalah gelombang krisis akibat kenaikan harga komoditas yang menempatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah ini dalam risiko serius gagal bayar utang negara. Dalam hal ini, T20 berpandangan, perlunya penguatan dan jaminan fasilitas restrukturisasi utang secara global. Tujuannya melindungi perekonomian dunia dari pecahnya krisis utang yang berdampak masif.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah memastikan daya beli orang miskin dan rentan ditengah kondisi inflasi global akibat kenaikan harga energi dan komoditas pertanian. Ketegangan geopolitik telah menempatkan kesejahteraan masyarakat rentan kelompok dan orang miskin dalam bahaya. Dengan peningkatan inflasi yang cepat, sangat penting untuk memastikan kelompok ini masih memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Wakil Ketua Satgas 7 dari T20,

Chatib Basri, menyebutkan bahwa situasi global saat ini mirip dengan “Dilema Ekonom yang Terpenjara”, di mana kepentingan jangka pendek satu negara membatasi mereka dari untuk berkolaborasi satu sama lain.

Ia menyoroti beberapa faktor yang menghambat kerja sama dan mendorong tindakan jangka pendek ini adalah meningkatnya ketegangan geopolitik, meningkatnya ekonomi dan nasionalisme vaksin, dan ketakutan akan gangguan rantai pasokan.

Mantan Menteri Keuangan ini juga memaparkan dilema kebijakan yang dihadapi negara-negara ketika menghadapi kenaikan harga energi dan pangan yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Sehingga, hal itu memaksa banyak negara membatasi pengeluaran fiskal dan stimulus, meskipun diperlukan bagi perlindungan sosial pascapandemi Covid-19.

Chatib Basri pun menyatakan, agar situasi global yang memburuk ini bisa dipulihkan, perlu ada kalibrasi ulang dari strategi umum masyarakat internasional. Di mana G20 perlu bertindak sebagai forum koordinasi. Dia menyebutkan bagaimana penerapan transisi energi yang adil dan terjangkau dalam wacana agenda G20 menjadi contoh bagaimana perbedaan perspektif dan kebutuhan negara maju dan berkembang dapat digabungkan secara produktif.

Namun ini juga bukan berarti mengharap penguraian masalah secara keseluruhan, atau yang ia sebut sebagai solusi *big bang* dari G20 ke semua masalah dunia. Namun hanya perlu ada sepotong-sepotong solusi yang akan menjadi titik awal untuk kerja sama saat ini dan masa depan. Termasuk bagaimana untuk membantu negara berkembang, di mana dengan Presidensi G20 yang ada di tangan Indonesia, penting juga untuk menyuarakannya. Dilanjutkan dengan Presidensi G20 Tahun 2023 di India dan Presidensi G20 Tahun 2024 di Brasil.

“Bukan dikotomi ekonomi negara berkembang. Isu negara berkembang di G20 menjadi agenda. Ini isu yang global, harus bawa balik isu ini,” Chatib menegaskan. Momentum yang lebih besar karena Kepresidenan G20 berge-

rak berturut-turut ke India, Brasil, dan Afrika Selatan sebagai rangkaian Kepresidenan yang diselenggarakan oleh negara berkembang.

Bahkan juga sangat dimungkinkan untuk membangkitkan kembali semangat “Konferensi Bandung” atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang membangkitkan negara berkembang. Dalam pertemuan 18-24 April 1955 ini juga mengusung kerja sama ekonomi dalam melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan perang Ukraina-Rusia telah membuat lanskap kerja sama global berubah. Ia juga menyayangkan bagaimana perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam mencegah penerapan pendekatan efektif dalam mengatasi krisis dunia.

Bagaimana ketegangan meningkat, serta konflik dan mobilisasi senjata lebih banyak, daripada bekerja sama. Karena itulah, ia meminta agar T20 dapat memberikan masukan agar mendukung kerja sama di dalam G20. Di mana fokusnya adalah bagaimana upaya untuk keluar dari krisis dunia, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 dan krisis iklim yang koheren dan terkoordinasi.

“Kedua, bagaimana membangun kembali arsitektur kerja sama internasional secara global untuk menciptakan iklim yang kondusif, lingkungan untuk kepercayaan dan kolaborasi strategis, menghormati PBB Piagam dan hukum internasional, memastikan tidak ada negara yang tertinggal,” kata Retno.

Emeritus Professor of Economics at the Australian National University (ANU), Peter Drysdale, mengapresiasi langkah Indonesia yang terus mengadvokasi kerja sama multilateral dalam G20 meskipun ketegangan geopolitik meliputi masyarakat internasional.

Menurut dia, Presidensi Indonesia di G20 akan menjadi yang pertama dari serangkaian Konferensi G20 yang dipimpin oleh negara berkembang, seperti India, Brasil, dan Afrika

Selatan. Hal ini akan menjadi landasan penting bagi pembangunan konsensus dan kerja sama dalam konferensi G20 mendatang.

Drysdale menyebut hal ini sebagai sarana untuk mengatasi defisit kepercayaan global akan isu-isu dan kebijakan internasional yang menonjol. Namun juga mengingatkan semua orang bahwa konsensus pembangunan tidak hanya memberikan suara kepada perspektif negara-negara berkembang yang memang telah diabaikan di masa lalu. Tetapi menghubungkan perspektif ini dengan perspektif negara maju yang memegang peranan penting dalam perekonomian global.

Co-Chair T20 Indonesia, Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa apa yang direkomendasikan T20 ini merujuk dari perspektif negara berkembang dalam menghadapi semua tantangan dan kondisi saat ini. Satu hal penting yang harus disepakati dalam Forum G20 ini adalah kerja sama bagaimana semuanya berjalan bersama untuk menghadapi krisis dan masalah global yang dihadapi.

“Kerja sama ini bisa lebih sulit. Kita tidak lagi berharap dapat suatu substansial dibandingkan membuat proses dan diskusi tetap berjalan, bagaimana G20 tetap berdampak dengan ide yang bisa diimplementasikan dan berjalan baik,” ungkapnya.

Executive Director Center for Strategic and International Studies ini menyebut, yang perlu dilakukan Pre-

sidensi G20 Indonesia saat ini adalah menyelamatkan Forum G20 tersebut dahulu. Sebab, dengan kondisi geopolitik dan krisis ekonomi dan pangan saat ini, belum ada kesepakatan jelas dalam hal pernyataan bersama di level menteri negara G20.

Kesepakatan bersama yang terbilang sudah terdepan adalah Health Working Group yang sepakat memformalkan Lembaga Dana Kesehatan Global dengan pembentukan dana persiapan pandemi alias *financial intermediary fund* (FIF).

Usulan tersebut telah didukung sepenuhnya oleh beberapa negara-negara, seperti Italia, Cina, Argentina, serta Korea, dan Uni Eropa. Negara seperti Amerika Serikat, India, serta Prancis, dan Afrika Selatan juga mendukung. Namun dengan sejumlah rekomendasi, seperti mekanisme pembiayaan lebih detail dan penekanan kepada pentingnya keadilan akses akan tindakan medis esensial.

Saat ini, dana yang telah terkumpul sekitar US\$1 miliar, di mana Indonesia telah menyumbangkan US\$50 juta. Targetnya, dana yang terkumpul adalah sebanyak US\$15 miliar sampai US\$20 miliar. Distribusinya bisa melalui jalur organisasi dunia, seperti GAVI dan UNICEF. Setelah dana dan lembaga itu terkumpul, maka berikutnya adalah cara bagaimana anggaran tersebut dapat digunakan untuk mengakses obat-obatan, vaksin, serta alat tes pandemi.

“Semua tidak keluar Ministerial Joint Statement (kesepakatan bersama), kecuali untuk kesehatan. Ada kemungkinan saat Leader Summit (KTT G20) enggak keluar *joint statement* komunike,” Yose menjelaskan. Namun, menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana komitmen untuk terus maju dengan mengeluarkan ide baru untuk ide diskusi.

“Yang dilakukan sekarang ini menyelamatkan G20 dulu. Ada beberapa agenda yang bisa kita majukan, seperti kesehatan tadi itu kita berhasil, juga isu digital meski belum ada komunike, tapi ada beberapa hal diadopsi. Enggak apa-apa yang penting *working group level* tetap gerak, bisa dilanjutkan di India, paling tidak di sana tensinya menurun,” Yose mengungkapkan. ■

BIRNY BIRDIENI

Chatib Basri



VIRUS

Melawan Risiko Cacat pada Anak



ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA

Indonesia menargetkan eliminasi virus rubela pada 2026. Namun saat ini sebanyak 28 Provinsi masih melaporkan kasus rubela. Mengenjut program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).



Petugas medis menyuntikan imunisasi campak rubella kepada anak di salah satu Pusat Perbelanjaan, Jakarta

Saat kehamilan kedua, Diah Ratnaningsih mengaku menjadi lebih ekstra hati-hati dalam menjaga kandungannya, apalagi ini hamil kembar. Perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu rutin menjalani beberapa tes kesehatan. Mulai pengecekan laboratorium lengkap untuk tes HIV, toksoplasma, hingga rubela. “Masuk hamil tiga bulan atau 12 minggu, di suruh cek laboratorium lengkap dengan diambil darah tiga tabung kecil, sama air pipis. Alhamdulillah hasilnya bagus (negatif),” ungkapnyanya kepada GATRA.

Awalnya Diah merasa, banyaknya tes kesehatan membuat ribet dan menambah beban biaya. Sebab untuk melakukan tes itu, ia harus merogoh kantong lebih dalam dengan biaya Rp1,3 juta. Padahal saat kehamilan pertama, hal itu tak terjadi. Namun Diah menyadari dengan kehamilan kembar, beberapa risiko memang bisa saja muncul.

“Awalnya *ngerasa* ribet, dan *nam-bah* biaya lab, yang biasanya Rp200.000-Rp 300.000. Ini malah jadi jutaan. Tapi ya, karena buat kesehatan janin dan diri sendiri, mau *gimana* lagi. Untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dari awal kehamilan, sehingga bisa segera diantisipasi,” ujar Diah.

Kekhawatiran Diah sebenarnya sangat masuk akal. Sebab, jika sederet tes kesehatan itu tidak dilakukan, bahaya fatal akan mengancam janinnya. Sebut saja tes rubela, tes itu untuk mendeteksi kemungkinan adanya virus rubela. Bahaya virus ini pada ibu hamil adalah dapat menyebabkan kecacatan pada janin di kandungan (*congenital rubella syndrome* atau CRS).

Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan campak Jerman itu bisa membuat bayi menjadi tuli, katarak, hingga

penyakit jantung kongenital. Selain itu paru-paru, organ hati, hingga otak juga tidak dapat berfungsi secara normal. Virus yang berasal dari keluarga virus *Togaviridae* dari genus *Rubivirus* ini lebih sering menyerang anak-anak. Rubela dapat menginfeksi bagian saraf atau otak, yang ditandai dengan timbulnya ruam atau bercak merah pada kulit, seperti pada campak biasa.

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Anggraini Alam, Sp.A (K), membenarkan bahwa sindrom rubela kongenital ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan cacat lahir bagi anak. “Kecacatan anak yang tampak oleh tua adalah kepala kecil, mata tidak melihat karena katarak, ketulian, tumbuh kembang lambat, hingga jantungnya bocor,” kata kata dokter spesialis anak yang karib disapa Anggi itu.

Kecacatan ini, menurut Anggi tidak tergantikan dengan uang. Sebab meski dilakukan tindakan operasi, tetap akan ada label cacat. Padahal semua risiko yang disebabkan oleh rubela dapat dihindari, jika anak mendapat imunisasi MR (*measles rubella*). “Sindrom kongenital itu benar-benar dapat dicegah dengan imunisasi, bukan dengan air bersih, bukan dengan cuci tangan,” katanya.

Anggi menjelaskan bahwa penyebaran rubela yang berawal dari infeksi ini sangat mungkin terjadi, karena penularannya dari manusia ke manusia. “Namanya penyakit infeksi, yang bawaan manusia, sangat *transportable* ke mana-mana,” ia mengungkapkan. Sama halnya seperti penyebaran Covid-19, jika salah satu wilayah di Indonesia masih mengalami infeksi rubela, ini artinya status wilayah lain juga bisa terpengaruh statusnya rentan terjadi penularan.

Virus rubela mudah menyebar, dengan masa inkubasi satu atau dua pekan. Penyakit ini juga bisa menular melalui saluran pernapasan. Seperti ketika penderitanya bersin ataupun batuk. Atau karena ada percikan liur yang tak sengaja terhirup, juga karena berbagi makanan dan minuman dengan penderita. Bahkan dapat menular jika menyentuh bagian tubuh seperti mata, hidung, dan mulut penderitanya.

Secara ciri, antara rubela dan campak juga sangat mirip. Gejala umumnya, antara lain, demam, rasa lelah, mata merah, batuk, pilek. Saat demam tinggi muncul ruam yang mulai muncul di daerah wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh.

Lalu bagaimana membedakan antara gejala rubela dan campak, Anggi menyebut bahwa gejala keduanya

mirip. Bedanya pada campak, tanda dan gejala campak akan lebih nyata untuk demam ruamnya, sedangkan pada rubella, selain ada demam ruam juga disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher.

Anggi mengungkapkan bahwa memang agak sulit untuk membedakan ciri tersebut yang cenderung mirip. Hanya saja, dia menegaskan, jika menemukan gejala demikian, maka ia merekomendasikan untuk segera mendatangi dokter. Minimal jika muncul demam selama dua hari, untuk memastikan diagnosis.

Kasus rubela di Indonesia juga masih tinggi. Merujuk kepada data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020, dari 51 total darah serum suspek yang diterima, ditemukan ada lima kasus campak, 11 kasus rubela, dan 35 kasus negatif. Sayangnya, penyebaran ini makin masif dan sebarannya sudah meluas nyaris di semua provinsi di Tanah Air.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, pada tahun 2022 ini, ada 28 provinsi yang melaporkan rubela di wilayahnya. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tercatat ada di 25 provinsi. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, menjelaskan, kejadian meningkatnya kasus rubela ini salah satunya disebabkan oleh penurunan cakupan imunisasi pada masa pandemi Covid-19.

“Kekhawatiran orangtua bahwa untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan karena kasus Covid-19 sedang tinggi. Pada awal masa pandemi, banyak Posyandu yang tutup karena ada pembatasan,” kata Maxi kepada Alfiansyah Ramdhani dari GATRA.

Survei Kemenkes dan UNICEF pada 2020 juga menyebut bahwa setengah dari orangtua yang disurvei tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk di imunisasi. Alasan mereka karena takut anaknya tertular Covid-19. Padahal, lanjut Maxi, imunisasi rutin se-

harusnya dapat mencegah penyakit seperti campak, rubela, difteri, dan pertusis.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan target sasaran yang besar juga membuat tenaga kesehatan lebih fokus pada vaksinasi Covid-19. Termasuk juga kekhawatiran jumlah tenaga kesehatan, serta jumlah APD (alat pelindung diri) yang terbatas di awal masa pandemi.

Indonesia berkomitmen mencapai eliminasi campak dan rubela pada 2026 mendatang. Eliminasi ini dapat tercapai jika tidak ada transmisi virus campak dan rubela yang dibuktikan dengan surveilans campak dan rubela selama minimal tiga tahun berturut-turut. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan melakukan imunisasi MMR (*mumps, measles, dan rubella*) pada anak usia 15 bulan dan kemudian dilakukan *booster* saat anak menginjak usia lima tahun.

Salah satu strategi pemerintah untuk mendukung target itu adalah dengan melakukan kampanye dan sosialisasi imunisasi campak dan rubela pada 2017 lalu. Ketika itu, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah kampanye tahap I di Pulau Jawa.

Selain mendapatkan suntikan MMR, setiap bayi usia 0-11 bulan juga wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Yakni mulai dari satu dosis hepatitis B, satu dosis BCG, dan tiga dosis DPT-HB-HiB. Juga empat dosis polio tetes atau *oral polio vaccine* (OPV), satu dosis polio suntik atau *inactivated polio vaccine* (IPV) dan satu dosis campak dan rubela pada usia 15 bulan.

Namun kondisi pandemi Covid-19 telah menghambat cakupan imunisasi di Tanah Air, di mana Kemenkes menyebut ada 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi lengkap selama periode 2019-2021. Dari jumlah tersebut, ada lebih dari 600.000 atau sekitar 37,5% bayi berasal dari wilayah Jawa dan Bali.

Data Kemenkes juga menyebut bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) menurun signifikan selama pandemi. Yakni yang pada 2020 mencapai 84,2%, menurun menjadi 79,6% pada 2021. Berikutnya hanya 200 kabupaten atau kota yang sudah mencapai imunisasi

“ Sindrom kongenital itu benar-benar cuma bisa dengan imunisasi, bukan dengan air bersih, bukan dengan cuci tangan, pakai imunisasi. ”

DR. ANGGRAINI ALAM, SPA(K)

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)



DOK. PRIBADI

lengkap lebih atau dari 80%. Akan tetapi masih ada 401 wilayah yang di bawah persentase tersebut. Padahal, imunisasi lengkap ini bisa mencegah hingga 3 juta kematian secara global setiap tahunnya, serta mencegah 26 penyakit berbahaya.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menerapkan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Menurut Maxi, kegiatan ini dilaksanakan dalam dua fase, yakni Mei dan Agustus lalu. Tahap pertama dilaksanakan Mei lalu di 27 provinsi di luar Jawa dan Bali, yakni memberikan imunisasi campak dan rubela pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Imunisasi diberikan di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kemudian memberikan imunisasi campak dan rubela bagi anak usia 9 bulan hingga 12 tahun di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Juga melakukan imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum lengkap imunisasi rutinnya untuk seluruh provinsi tersebut.

Untuk tahap II, Maxi melanjutkan, dilaksanakan pada Agustus lalu di Jawa dan Bali. Yakni melaksanakan imunisasi tambahan campak dan rubela pada anak usia 9-59 bulan di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Juga melakukan imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum lengkap imunisasi rutinnya bagi seluruh provinsi di Jawa dan Bali.

“BIAN dilaksanakan sebagai upaya untuk menutup kesenjangan imunitas yang telah terjadi karena penurunan cakupan imunisasi. Dalam kegiatan dilaksanakan pemberian imunisasi tambahan campak rubela dan upaya melengkapi imunisasi yang belum lengkap pada anak balita,” katanya.

Capaian BIAN tahap I kurang-lebih sudah sampai 63%, dan sudah lebih dari 11 juta anak mendapatkan imunisasi campak dan rubela. Sedangkan untuk imunisasi kejar ada sekitar 138.000 anak yang mendapat imunisasi tetes, imunisasi polio suntik sekitar 140.000 anak, dan imunisasi pentavalen hampir 16.000 anak. Sejauh ini cakupan terbesar untuk



Maxi Rein Rondonuwu

imunisasi ini ada di Jawa dan Bali.

Di Jawa Barat, misalnya, ada sekitar 332.400 anak yang belum diimunisasi. Namun berdasarkan laporan hasil BIAN, pada hari kedua terpantau di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah menunjukkan cakupan imunisasi campak dan rubela sebanyak 103.266 anak, atau 3,1%. Lalu imunisasi OPV 13.095 anak, imunisasi IPV 1.655 anak, dan DPT atau Pentabio sebanyak 17.255 anak.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan pemerintah Jawa Barat berkomitmen untuk mengejar target 90% cakupan imunisasi campak-rubela dan 80% cakupan imunisasi kejar. “Cakupan ini akan kami terus tingkatkan. SDM Indonesia harus sehat, penyakit yang potensi menyerang anak-anak kita harus mencegahnya dengan imunisasi,” kata gubernur yang akrab disapa Emil ini dikutip dari keterangan tertulisnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa BIAN me-

rupakan momentum penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, seperti campak, hepatitis, polio, tetanus, rubela, dan difteri. Program BIAN berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan imunitas di masyarakat, dimana salah satu targetnya adalah imunisasi campak dan rubela hingga 95% di wilayah tertentu.

Berdasarkan pengalaman dari vaksinasi Covid-19, menteri yang akrab disapa BGS ini optimistis target bisa tercapai. Hal ini belajar dari vaksinasi Covid-19 yang dalam 15 bulan bisa mencapai 400 juta. “Kita mau mengejar 95% atau sekitar 9,4 juta anak di Jawa-Bali untuk tiga jenis vaksin ada MR, DPT dan polio. Jadi harusnya bisa, resepnya satu, tidak bisa sendiri-sendiri, harus melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya. ■

BIRNY BIRDINI



Tim Antasena ITS bersama prototipe mobil Antasena Alpha

INOVASI

ANTASENA, Kendaraan Hidrogen Karya ITS

ITS meluncurkan mobil bertenaga hidrogen yang dinamai Antasena. Didesain ramah lingkungan dengan aerodinamis tinggi. Siap beroperasi dan menjajal kompetisi level internasional.

Seperlima atau 20% emisi karbon dioksida global disumbangkan oleh sektor transportasi. Menurut data Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), kendaraan yang digunakan

untuk perjalanan darat menghasilkan tiga perempat emisi yang bersumber dari transportasi.

Sumber emisi global dari sektor transportasi berasal dari kendaraan penumpang mobil dan bus (45,1%) dan lainnya berasal dari truk pengangkut

barang (29,4%). Data IEA juga menyimpulkan kendaraan penumpang menyumbangkan 15% dari total emisi karbon dioksida.

Persoalan tersebut menuntut banyak pihak berinovasi di sektor energi bersih. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, emisi efek rumah kaca global ditargetkan turun pada 2025 dengan angka kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius. Karena, sumbangan emisi gas rumah kaca dari kendaraan yang besar, kebutuhan akan energi bersih berkelanjutan menjadi perhatian.

Karena itu, masyarakat kini beralih ke penggunaan kendaraan berbasis energi bersih yang menghasilkan emisi ringan seperti kendaraan listrik baterai, kendaraan hibrida, atau *plug-in hybrid electric vehicle* (PHEV). Hal ini yang melatarbelakangi tim peneliti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, mendesain mobil hidrogen yang dinamai Antasena. Penelitian Antasena dirintis pada 2010 dan kini sudah beroperasi.

“Idenya sudah dari 2009, sejak salah satu dosen kami memperkenalkan teknologi sel bahan bakar (*fuel cell*), teknologi yang mengonversi hidrogen dan oksigen menjadi listrik. Saat itu, tim Antasena generasi pertama melihat teknologi ini peluang untuk menghadapi banyak permasalahan,” ujar General Manager Antasena ITS Hydrogen Team, Gerald Rafi, ketika diwawancara GATRA di Kampus ITS pada awal September lalu.

Gerald menjelaskan, terdapat tiga permasalahan mendasar yang melatarbelakangi pengembangan Antasena. Pertama, kecenderungan Indonesia yang sampai saat ini masih bergantung kepada bahan bakar fosil. Sementara itu, bahan bakar fosil merupakan sumber daya tak terbarukan dengan tingkat konsumsi yang terus naik saban tahun.

Kedua, tantangan global agar setiap negara berperan menekan sumbangan emisi gas rumah kaca dan respons perubahan iklim. “Alhamdulillah sekarang sudah menjadi perhatian besar dan sudah banyak yang berfokus untuk memperbaikinya bagi kehidupan kita dan anak cucu di masa mendatang,” ucap mahasiswa Jurusan Teknik Material ITS itu.

Terakhir, desain Antasena mendorong kemandirian teknologi yang bersumber dari kampus. Menurut Gery, sapaan akrab Gerald Rafi, setiap negara berlomba membikin teknologi *fuel cell* yang digunakan dalam mobil hidrogen. Ia menceritakan, saat awal berdiri, Antasena ITS Team masuk dalam lingkup Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS.

Namun, saat ini Antasena Team berdiri sendiri dan membuka kesempatan lebih luas untuk jurusan lainnya. Gery menambahkan, Antasena kini menaungi 12 jurusan di ITS. Termasuk melibatkan mahasiswa atau peneliti Jurusan Sistem Informatika (SI) untuk pembuatan sistem informasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Penelitian dari Antasena Alpha—Antasena modifikasi terbaru—ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kendaraan sebesar 1.000 km/m³. Penelitian difokuskan kepada rancangan gigi

(*planetary gear*), sasis serat karbon (*carbon fiber chassis*), dan antarmuka (*interface*) Antasena. Mobil Antasena Alpha memiliki panjang 272,7 cm, lebar 78,55 cm, dan tinggi 70,95 cm. Mobil dibuat menggunakan material serat karbon-plastik, sasis aluminium, bahan kaca polikarbonat, dan daya motor 350 watt. Sementara, sel bahan bakar memiliki efisiensi 59%.

Menurutnya, salah satu komponen paling penting dari mobil hidrogen adalah sel bahan bakar atau *fuel cell*. Meski, jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS memiliki laboratorium pengembangan sendiri, tapi dalam rancangan Antasena kali ini peneliti ITS tetap membutuhkan *fuel cell* performa tinggi yang banyak dipakai industri.

Singkat cerita, tim peneliti mendapatkan *fuel cell* spesifikasi khusus yang diperoleh dari manufaktur luar negeri. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan bantalan mekanis (*bearing*) dari pihak sponsor. Ketersediaan bahan, Gery melanjutkan, membuat pihaknya percaya diri merancang Antasena.

Dalam pengembangan mobil hidrogen ini, peneliti memperhitungkan semua aspek teknis mulai dari kebutuhan daya, presisi, dan desain mobil. Antasena Alpha buatan ITS memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, rancangan ini

dilengkapi teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam perangkat *fuel cell*. Artinya, mesin pengolah hidrogen secara otomatis dikendalikan lewat laptop bahkan dari ponsel canggih.

Selain itu, Antasena Alpha mampu memperbarui atau *men-upgrade* semua sensor yang terpasang dalam setiap komponen. Sensor ini membantu komunikasi visual dengan pengemudi untuk mendapatkan efisiensi tertinggi. Dari sejumlah jenis mobil hidrogen keluaran ITS, Antasena Alpha memiliki aerodinamis atau pergerakan udara tertinggi.

Dalam perancangan Antasena, tim peneliti mendapatkan dukungan penuh dari internal kampus ITS terutama dalam hal pendanaan. Gery menuturkan, proyek penelitian mobil hidrogen berbiaya mahal karena tingginya investasi material. Selain itu, model mobil hidrogen ini terbilang yang pertama di Indonesia. Sehingga, peneliti membutuhkan rangkaian percobaan dan simulasi riset secara berulang.

“Rintangannya benar-benar banyak. Kita pelajari secara teori misalnya metode A cara kerjanya seperti ini, tiba-tiba ada hal-hal yang muncul tak terduga seperti kebocoran, ada yang meledak, itu semua sudah kita alami,” ujar Gery.



Gerald Rafi

MELY SANTOSO



MELY SANTOSO

Antasena menggunakan *fuel cell* bertipe *proton exchange membrane* (PEM). PEM *fuel cell* berbahan bakar hidrogen yang kemudian bereaksi dengan oksigen di katoda. “PEM *fuel cell* ini merupakan *low temperature fuel cell* atau *fuel cell* bertemperatur rendah karena operasinya sekitar 50 derajat Celcius. Ada yang lebih tinggi sampai ratusan,” ujar dosen teknik material dan metalurgi di Fakultas Teknologi Industri ITS, Sutarsis, kepada GATRA.

Secara teknis, PEM terdiri dari membran, anoda, dan katoda. Hidrogen (H) akan dimasukkan dari sisi anoda, berinteraksi dengan katalis yang disebut Pt, dan akan pecah menjadi H₂ menjadi H⁺ ditambah elektron (e). Elemen H⁺ akan berpindah dari sisi anoda ke katoda. Selanjutnya elektron akan mengalir ke eksternal sirkuit menjadi arus listrik. Oksigen akan dialirkan dari sisi katoda menjadi H⁺ + O₂ + e yang selanjutnya berkonversi menjadi H₂O.

Mekanisme itu menjadi keunggulan dari mobil hidrogen Antasena yang menggunakan generator listrik ramah lingkungan. “Bahan bakarnya adalah gas hidrogen yang bisa dielektrolisis dari H₂O atau air dan menghasilkan H₂+OH₂ lalu dimasukkan ke PEM dan dipecah menjadi H⁺ + elektron. Lalu elektron dialirkan menjadi arus listrik dan nanti menggerakkan macam-macam, di sisi katodanya akan bertemu dengan oksigen dan menjadi air,” doktor bidang *material science and engineering* dari National Central University, Taiwan, itu menjelaskan.

Sederhananya, proses kimia mobil hidrogen mereduksi produksi zat berbahaya seperti karbon monok-

sida (CO), karbon dioksida (CO₂), dan nitrogen oksida (NO atau NO_x). Limbah dari buangan kendaraan berbasis hidrogen adalah air atau H₂O. Ini yang membuat mobil hidrogen diklaim sebagai kendaraan nol emisi (*net zero emission*).

Sutarsis menyebut, dua keuntungan pemakaian mobil hidrogen oleh masyarakat, yakni ramah lingkungan dan *sustainable*. “Mobil hidrogen itu betul-betul berbasis *renewable* dan *green energy*. Dari sisi *renewable*, sumber hidrogennya bisa dari air yang dielektrolisis. Dari sisi *green*, sampah hasil reaksi kimia alat ini kan air, dan itu ramah lingkungan,” Sutarsis menjelaskan.

Dari sisi efisiensi, penggunaan PEM *fuel cell* bisa mencapai efisiensi mendekati 80% dibanding kendaraan biasa yang efisiensinya hanya di angka 20 persen. Keunggulan lain dari PEM *fuel cell* dengan energi hidrogen, yakni tingkat kebisingannya yang sangat minim (*low noise*). Di sisi lain, Sutarsis menyebut, pasar mobil hidrogen sejatinya belum terbentuk.

“Pasar sendiri belum siap. Padahal, teknologi PEM *Fuel Cell* berbasis hidrogen ini tidak hanya bisa digunakan untuk mobil penumpang tetapi juga kendaraan lain seperti kapal, pesawat dan kereta api,” Sutarsis memaparkan.

Tidak sebatas riset, tim peneliti Antasena ITS juga mendorong kiprah kampus di tingkat nasional hingga internasional. Di kancah internasional, tim Antasena berhasil meraih peringkat dua ajang Shell Eco Marathon (SEM) Asia 2019 kategori Urban Concept Hydrogen dan Driver's World Championship

Asia Qualifiers 2019. Gery menyebut, kompetisi SEM diadakan tiap tahun dalam upaya menemukan inovasi terbaik di bidang optimasi energi.

Karena itu, ia optimistis bahwa tim dapat mengikuti SEM 2022. Dalam kompetisi SEM 2022 yang digelar di Sirkuit Mandalika pada 11-15 Oktober 2022, tim ITS akan memboyong prototipe mobil hidrogen jenis baru, yaitu Antasena Alpha. “Kita sangat tertantang untuk mencoba mobil hidrogen di Mandalika ini. Lawan kami tahun lalu itu NUS (National University of Singapore),” kata Gery.

Dalam kompetisi SEM mendatang, tim ITS akan berfokus kepada efisiensi dan kecepatan. “Dalam kategori ini, kami tidak fokus ke ergonomis, tetapi yang ditingkatkan adalah aerodinamisnya. Bagaimana mobil itu ketika meluncur performa aerodinamisnya itu tinggi,” ucapnya.

Dosen pembina Antasena Alpha ITS Team, Sutarsis, menyatakan bahwa keikutsertaannya tim peneliti ITS dalam kompetisi SEM 2022 merupakan prestasi luar biasa. Bagi Indonesia, kompetisi tersebut adalah yang pertama setelah diikuti negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia, India, dan Jepang.

“Karena saya punya *background* teknologi hidrogen *fuel cell*, saya mengajak teman-teman untuk mengaplikasikan PEM *fuel cell* di kendaraan satu penumpang untuk kompetisi efisiensi bahan bakar,” ujar Sutarsis.

Menurutnya, tim Antasena ITS siap menjajal medan kompetisi di Mandalika dan mengincar kemenangan. Tim ITS, Sutarsis melanjutkan, punya target konsumsi bahan bakar sebesar 400

km/cm² H₂O. “Manufaktur, kerangka, sistem mekanik, bodinya sudah selesai. Juga karena kami lomba efisiensi, maka butuh latihan seperti menguji sistem mekanik, menguji strategi efisiensi, dan juga menguji *driver*-nya,” kata Sutarsis.

Rencana besar dari tim Antasena ke depan adalah meningkatkan kemampuan produksi mesin. Sutarsis mengaku saat ini belum ada manufaktur besar yang melirik Antasena. Meski demikian, ia optimis dengan proyek yang berkolaborasi dengan PT Industri Kereta Api (INKA) dan disetujuinya proposal pengembangan PEM *fuel cell* oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan menjadi langkah awal pengembangan teknologi Antasena.

Sutarsis mengaku pihaknya beberapa kali menyampaikan presentasi

teknologi hidrogen dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Komunikasi kami dengan Kemenperin terus berlanjut. Terutama juga dengan industri karena saat ini industri itu diminta untuk menurunkan emisi karbon,” Sutarsis memaparkan.

Dalam proyek penelitian berikutnya, pihaknya akan mencoba menemukan desain mobil Antasena berskala ekonomis. Menurut Sutarsis, mobil hidrogen memiliki ukuran minimalis dan hanya diisi satu penumpang. Nilai investasi dari mobil hidrogen sejatinya sekelas mobil komersil murah ramah lingkungan (LCGC) yang ada di pasaran.

“Komponen yang paling mahal itu ada pada mesinnya. Karena kami di Antasena sendiri saat ini masih mem-

beli bagian-bagiannya di luar negeri. Ketika nanti komponen yang mahal ini kita bisa *develop*, saya pikir itu bisa memotong biaya 30% sampai 40%,” kata Sutarsis.

Ia berharap, dengan dimulainya riset pengembangan mesin berbasis PEM *fuel cell*, Indonesia akan mampu memproduksi komponen mobil hidrogen di dalam negeri. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang mampu memproduksi PEM *fuel cell* dari komponen termurah hingga termahal. “Kendala besarnya itu di investasi riset dan pengembangan. Nilainya kalau dibandingkan dari negara lain, masih sangat kecil,” ujarnya. ■

ANDHIKA DINATA

DAN MELY SANTOSO (JAWA TIMUR)

CARA KERJA MOBIL ANTASENA



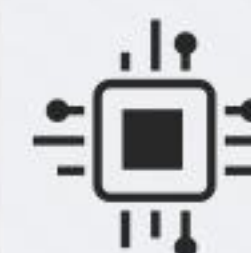
TANGKI HIDROGEN

Tangki menyimpan hidrogen sebagai bahan bakar



TUMPUKAN FUEL CELL

Tumpukan yang mengubah input hidrogen menjadi energi listrik



UNIT KONTROL DAYA

Mekanisme untuk mengontrol kedua keluaran tumpukan *fuel cell* dalam berbagai kondisi operasional, mendorong pengisian & pengosongan baterai



MOTOR

Motor digerakkan oleh listrik yang dihasilkan oleh *fuel cell* & dipasok oleh baterai

SUPERKAPASITOR



Superkapasitor menyimpan energi pemulihan & mendukung output tumpukan *fuel cell* selama akselerasi

Sumber: ITS

IRAK

Kekacauan di Irak dan Afganistan

Kegagalan koalisi usai pemilu 2021, membuat krisis politik makin mendalam terus terjadi di Irak. Iran dituding menjadi pihak luar yang paling berpengaruh dalam kisruh internal Irak ini. Negara tetangga Afghanistan masih juga belum bisa bangkit dari keterpurukan usai dikuasai oleh Taliban.

ANTARA FOTO/REUTERS/ ALAA AL-MARJANI TPX IMAGES OF THE DAY



Pendukung pemimpin populis Irak Muqtada al-Sadr berkumpul selama aksi duduk di gedung parlemen, di tengah krisis politik di Baghdad, Irak

Konfrontasi bersenjata yang ekstensif, penyerbuan Istana Kepresidenan, dan jatuhnya sejumlah korban, telah membuat Baghdad menjadi kota yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Masa depan Irak masih sulit diprediksi selama perselisihan-nya tetap belum terselesaikan.

Ratusan warga Irak, yang sudah muak dengan krisis politik selama berbulan-bulan, melancarkan sejumlah aksi protes di Ibu Kota Baghdad. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah bentrokan mematikan antara kelompok-kelompok Syiah yang bersaing sehingga memicu kekhawatiran akan kerusuhan yang meluas.

Kantor Berita Irak melaporkan, demonstrasi di Baghdad cukup sering terjadi. Tetapi jumlah massa yang relatif besar pada Jumat, 2 September lalu, terjadi setelah krisis politik Irak makin dalam. Bentrokan antara pendukung ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, dan kelompok-kelompok Islam pesaing mereka pada akhir Agustus silam telah mengubah Zona Hijau Baghdad menjadi medan perang. Padahal ini merupakan area gedung-gedung pemerintah dan kedutaan-kedutaan besar.

Sebanyak 30 pendukung Sadr tewas dalam bentrokan hampir 24 jam yang meletus pada hari Senin, 29 Agustus lalu, setelah para pendukungnya menyerbu markas pemerintah, dilansir dari *AFP*. Kekerasan meluas ke selatan negara itu pada Kamis, 31 Agustus, di mana bentrokan semalaman antara kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Sadr dan pasukan Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran menewaskan empat orang.

Kekerasan mematikan di Baghdad itu terjadi setelah ulama Muqtada al-Sadr mengatakan berhenti dari politik. Sedikitnya 15 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan antara milisi di Zona Hijau Baghdad dan jam malam nasional diberlakukan, tulis *Guardian*. "Saya telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan politik. Oleh karena itu sekarang saya mengumumkan pensiun definitif. Jika saya mati atau terbunuh, saya meminta

doa Anda," ujar al-Sadr dalam sebuah pernyataan di Twitter.

Pada Juli lalu, Sadr mengirim pengikutnya untuk menduduki parlemen. Setelah melakukan aksi duduk selama berminggu-minggu di parlemen di Zona Hijau, para pendukung tersebut menerobos pintu masuk Istana Republik, tempat pertemuan kabinet biasanya diadakan. "Saya memperingatkan mereka yang terus menabur benih kekacauan, konflik, dan pertikaian, serta mereka yang menolak mendengarkan akal sehat. Jika mereka melanjutkan aksi ini, saya akan mengambil keputusan moral dan patriotik untuk mengosongkan posisi saya sesuai dengan Pasal 81 Konstitusi dan meminta pertanggungjawaban mereka kepada rakyat Irak," Perdana Menteri Irak, Mustafa Al Kadhimi, menegaskan.

Dia mengatakan telah membentuk sebuah komite untuk mencari mereka yang bertanggung jawab atas kerusuhan dan pertumpahan darah.

Sejumlah kelompok politik telah mengadakan putaran kedua dialog nasional pada Senin, 5 September lalu. Kantor PM Al-Kadhimi melaporkan pertemuan tersebut, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Dilansir dari *Anadolu Agency*, putaran pertama dialog diadakan pada 17 Agustus. Tetapi kemudian diboikot oleh ulama Muqtada al-Sadr.

Sebelas bulan telah berlalu sejak pemilihan umum terakhir. Irak tidak memiliki pemerintahan baru maupun presiden. Pasalnya, kelompok-kelompok Syiah masih belum mencapai kesepakatan untuk membentuk koalisi sejak pemilu

Kabinet resmi adalah syarat bagi Afghanistan untuk bisa diakui secara internasional sehingga kerja sama dengan negara lain dapat segera terjalin, yang akan membantu Afghanistan keluar dari krisis ekonominya.



Muqtada al-Sadr

ANTARA FOTO/ REUTERS/ ALAA AL-MARJANI

Kota Kabul, Afghanistan



PURSCHE/123RF

Oktober 2021 silam. Ketidakberdayaan negara dan kesia-siaan upaya politik bisa mengubah Irak menjadi negara gagal, kecuali jika tercapai kesepakatan tentang struktur pemerintahan.

Penyebab krisis yang paling signifikan adalah bahwa Irak telah lama menjadi negara yang sangat tidak stabil dan kacau sejak proses pemilunya tidak berjalan lancar. Dengan demikian, tidak mengherankan ketika pertempuran akhirnya meletus antara dua kelompok besar yang sama-sama kuat secara agama dan politik. Gerakan Sadrist

(Al-Sadr Movement/Sadrist Trend) merupakan gerakan nasional di Irak yang dipimpin oleh Muqtada al-Sadr. Di sisi lain terdapat organisasi sesama Syiah yaitu Kerangka Koordinasi Syiah (The Coordination Framework). Ini merupakan blok yang menaungi partai-partai Syiah Irak, yang sebagian besar dipersatukan karena sikap oposisi mereka atas gerakan Sadrist.

Krisis saat ini adalah efek langsung dari pemilu 2010. Saat itu, Ayad Allawi memenangkan mayoritas. Pria kelahiran Bagdad tersebut merupakan

anggota partai Iraqi National Accord, oposisi terhadap partai beraliran Sunni yang dipimpin Saddam Hussein. Sebagai pimpinan Koalisi Negara Hukum, dia dikenal dekat dengan semua pihak, termasuk Gerakan Sadrist dan Kerangka Koordinasi Syiah.

Tapi, Allawi lantas memilih untuk memberikan kursi kemenangan sekaligus hak untuk membentuk pemerintahan kepada pemenang nomor urut dua, Nouri al-Maliki. Sayangnya, ketika menjabat sebagai PM, dia tertatih-tatih membentuk koalisi mayoritas demi mempermudah pembentukan pemerintahan.

Pada pemilu 2021, Gerakan Sadrist memenangkan sebagian besar suara. Namun, Kerangka Koordinasi Syiah bertekad untuk menjadi pihak yang membentuk pemerintahan. Upaya ini hendak diwujudkan melalui perolehan suara dari partai-partai koalisi.

Beberapa pengamat mengklaim bahwa nasib Irak akan ditentukan bukan di ibu kota yang berdaulat, melainkan di salah satu dari dua pusat spiritual Islam Syiah: Najaf di Irak dan Qom di Iran.

Sejumlah analis meyakini, Iran adalah pihak yang paling berperan mendorong Irak menuju kekacauan mendalam ini. Iran merupakan negara paling berpengaruh di Irak sejak AS angkat kaki dari negara ini. Dimana

THE MEDIA OFFICE OF THE PRIME MINISTER OF IRAQ

“ Jika mereka melanjutkan aksi ini, saya akan mengambil keputusan moral dan patriotik untuk mengosongkan posisi saya sesuai dengan Konstitusi dan meminta pertanggungjawaban kepada rakyat Irak. ”

MUSTAFA AL KADHIMI

Perdana Menteri Irak



militer AS yang tadinya mencapai 170.000 orang, kini hanya tersisa 2.000 tentara saja, dilansir Al-Arabiya.

Iran menjadi satu-satunya pihak yang harus disalahkan karena berusaha merebut kendali atas pemerintahan negara Irak. Namun, upayanya telah digagalkan oleh entitas politik Irak yang sejauh ini berhasil menggagalkan upaya Teheran untuk menempatkan politisi bonekanya di pemerintahan maupun parlemen Baghdad.

Sesungguhnya, akar dari semua krisis ini adalah invasi Saddam Hussein ke Kuwait. Kemudian diikuti oleh invasi AS dengan konfrontasinya. Kekosongan politik saat ini di Irak telah menjadi masalah yang berkelanjutan selama lebih dari satu dekade. Alhasil, kondisi kacau melanda sekitar seperempat dari seluruh negara bagian yang ada.

Melewati perbatasan Iran, negara tetangga Afghanistan masih juga tak jelas masa depannya. Sudah lebih dari satu tahun sejak pasukan Amerika Serikat angkat kaki dari Afghanistan dan Taliban menyatakan menang serta menguasai pemerintahan. Tapi hingga hari ini, masih belum ada kabinet resmi yang telah dibentuk.

Portal media lokal Afghanistan *Tolo News*, yang dikutip oleh *Ani News*, menulis bahwa hingga kini, walaupun penjabat kabinet telah dibentuk, kabinet formal masih belum diumumkan. Semua menteri masih menjabat sebagai penjabat kepala yaitu kepala kabinet sementara dalam masa transisi sejak 15 Agustus 2021 lalu. "Ini terkait dengan kurangnya konstitusi dan belum terbentuknya dewan. Juga ada beberapa masalah lainnya terkait pemerintahan sebagai alasan utama mengapa kabinet resmi belum diumumkan," sebut Juru Bicara Taliban, Zabiullah Mujahid.

Sementara itu, beberapa pengamat politik mengungkapkan akan sulit bagi Afghanistan untuk membentuk kabinet resminya dikarenakan beberapa hambatan yang ada di negaranya. "Di mana tidak ada undang-undang, hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak terjalin dengan baik, struktur pemerintahan yang tidak ditentukan, tanggung jawab, kewajiban, serta tugas masing-masing kekuasaan pun tidak disebutkan. Akan sulit bagi Taliban untuk mengumumkan kabinet resminya," ujar analis politik Sayed Javad Sajadi.

Kabinet resmi adalah syarat bagi Afghanistan untuk bisa diakui secara internasional. Dengan demikian kerja sama dengan negara lain dapat segera terjalin, yang akan membantu Afghanistan keluar dari krisis ekonominya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, Afghanistan menghadapi kemiskinan yang semakin parah dengan 6 juta orang berisiko kelaparan. Koordinator Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, mendesak para donor memulihkan dana untuk pembangunan ekonomi dan menyediakan dana sebesar US\$770 juta untuk membantu warga Afghanistan melewati musim dingin. 

FLORA LIBRA YANTI

GATRA

MAJALAH BERITA MINGGUAN

SIUPP: No. 297/SK/Menpen/SIUPP/C.1/1994, tanggal 13 Oktober 1994. ISSN: 0853-1706

Pendiri:

M. Hasan

Penerbit:

PT Era Media Informasi

Komisaris:

Tommy S. Kusuma

Pemimpin Umum:

Hendri Firzani

Direktur Utama:

Hendri Firzani

Direktur:

Budi Irawan

Direktur Kreatif:

M. Prasandi Hasan

Penasihat:

Edy Sumarso

MAJALAH GATRA

Pemimpin Redaksi:

Mukhlison S. Widodo

Redaktur Pelaksana:

Bambang Sulistyö, Sujud Dwi Pratisto (Plh)

Sidang Redaksi:

Aditya Kirana, Andhika Dinata, Birny Birdieni,

Flora Libra Yanti, Gandhi Achmad,

Hendry Roris P. Sianturi, Hidayat Adhiningrat P.,

Putri Kartika Utami, Sandika Prihatnala

Sekretariat Redaksi & Marketing:

Jumadi, Pamungkas Sapto Handoyo,

Puspita Sari

Produksi:

Desain:

Amin S. Putra (Kepala), Rico Wahyu

Foto:

Ardi Widi Yansyah, Adi Wijaya, Eva Agriana Ali

Bahasa:

Agus Teguh (Kepala), Rhea Febriani Tritami

GATRA TV

Pemimpin Redaksi:

G.A. Guritno

Produser Eksekutif:

Fajar Lukito

Produser:

Hermas, Riana Astuti

Produksi:

Ardhika, Bowie, Fandi, Karim, Samira

GATRA.COM

Pemimpin Redaksi:

Mukhlison S. Widodo

Redaktur Pelaksana:

Nur Hidayat, Rohmat Haryadi

Sidang Redaksi:

Anthony Djafar, Bernadetta Febriana, Rosyid

Liputan:

Iwan Sutiawan (Koordinator)

Erlina Fury, M. Almer,

M. Guruh Nuary, Ryan Puspa,

Ucha Julistian, Wahyu Wachid

Biro Daerah:

Abdul Aziz (Pekanbaru), Arif Koes Hernawan

(Yogyakarta), Ibrahim (Palembang), Slamet

(Semarang)

Foto:

Jongki Handianto (Kepala)

M. Thohir (Palembang)

GATRA PEDIA

Pemimpin Redaksi:

G.A. Guritno

Kepala Bagian Produksi:

Yustinus Sarjana

Redaksi:

Endang Sukendar (Kepala)

Annisa Setya Hutami, Arif Sugiono,

Fitri Kumalasari

Desain:

Anas Priyo (Kepala), Rio Nugroho

Foto:

Erry Sudiyanto

Digital/Ecommerce & Data:

Fatikhin

Pengembangan Bisnis dan Kreatif:

Fajar Lukito (Kepala)

Medsos & Event:

Fazri, Rikha, Vivi

Digital Marketing:

Dewan Nugraha

TIM PEMASARAN:

Kepala:

Vinca S. Soemantri (Wilayah I)

Gembong Wiroyudo (Wilayah II)

Wakil Kepala:

Cicik, Fahrudin

Group Head:

Leo Iqbal (Wilayah I)

Maria I. Pakpahan (Wilayah II)

Staf Pemasaran:

Edria Fausta K., Wanda Oktavia

Dewi Hapsari (Jateng)

E-mail: iklan@gatra.com

Support:

Fatmawati

Sirkulasi:

Yudi Riyanto (Kepala)

Jupri B. Dair, Yudho (Jateng)

E-mail: sirkulasi@gatra.com

Layanan Pelanggan:

Puspita Sari

Telepon: (021) 79196935

Fax: (021) 79196936

E-mail: langganan@gatra.com

Pencetak: PT. Naga Ular Bersatu, Jakarta

Alamat Kantor: Gedung GATRA, Jl. Kalibata Timur IV No. 15, Jakarta 12740

Telepon: (021) 7973535 (hunting), Fax: 79196941, 79196942, E-mail: redaksi@gatra.com



Kelompok musik Senyawa di Panggung Lumbini dalam Festival Indonesia Bertutur 2022 di kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang

FESTIVAL KEBUDAYAAN

Dari Borobudur, Indone

Festival Indonesia Bertutur digelar perdana di kompleks Candi Borobudur. Diklaim sebagai festival kebudayaan terbesar dengan menampilkan 900 seniman dan 100 karya secara kreatif. Bagian kegiatan Presidensi G20 bidang kebudayaan.

Sebuah waluku sepanjang 5 meter terpacak di panggung. Bukan sembarang alat bajak, karena di ujungnya terentang senar-senar bak gitar raksasa, sementara di bagian pangkalnya juga dilengkapi semacam tamborin dan gendang. Alat pertanian yang disulap jadi instrumen musik itu

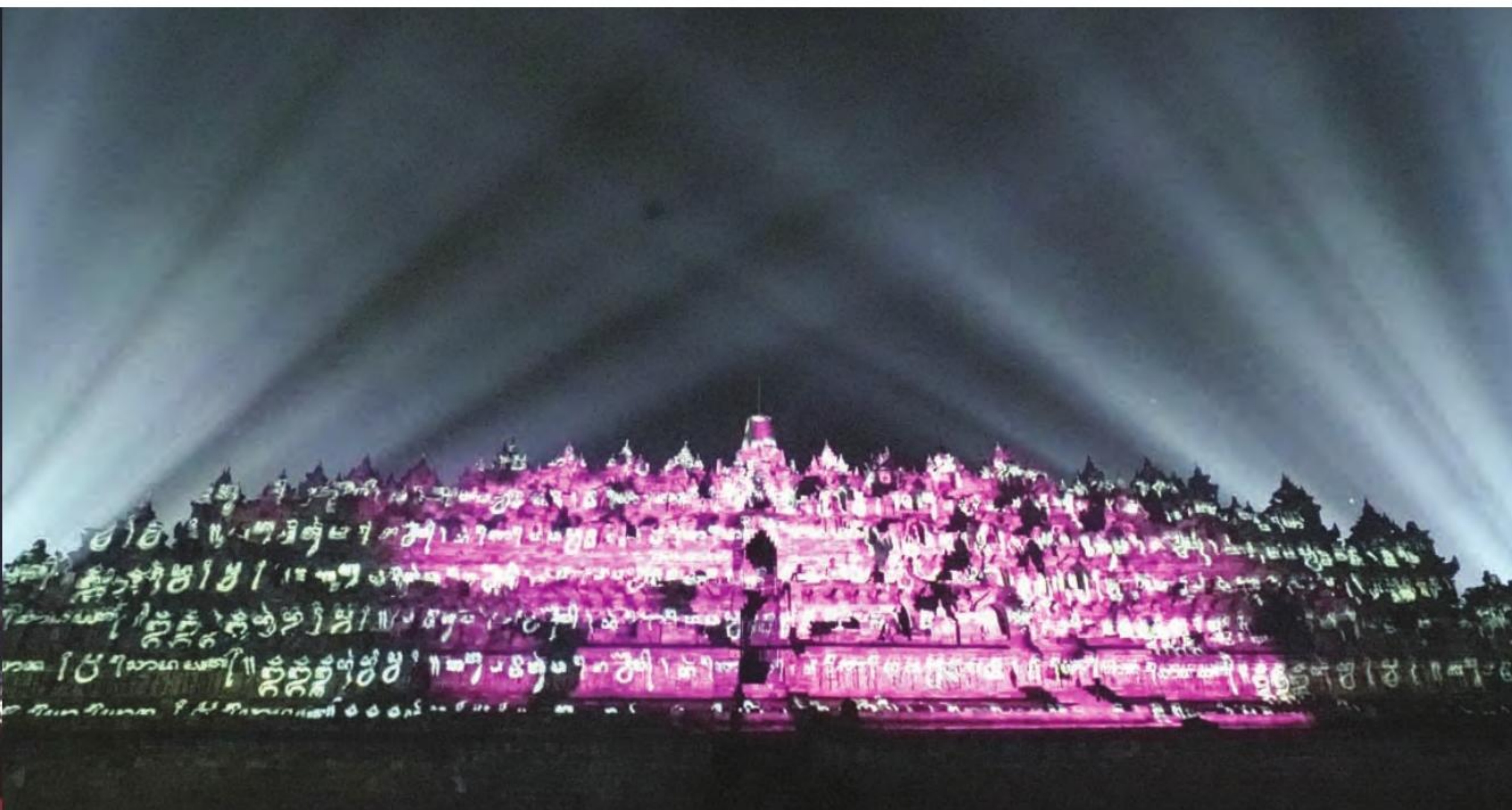
menanti dalam kegelapan untuk dimainkan kelompok musik Senyawa di Panggung Lumbini, di area Candi Borobudur, Ahad malam lalu.

Panggung Lumbini hanya salah satu tempat pentas di Festival Indonesia Bertutur 2022 di kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, 7-11 September 2022. Selama beberapa hari

itu, acara yang dihelat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut menampilkan berbagai pertunjukan, seperti musik, tari, teater, performance art, hingga *video mapping*.

Pertunjukan di Panggung Lumbini dikemas dengan tajuk "Anarta". Selama lima hari, tampil 11 artis, antara lain Teater Garasi, penari Fitri Setianingsih, dan Mila Rosinta, hingga penyanyi Tulus. Malam itu, Senyawa membawakan komposisi "Vajranala".

Dalam lidah Jawa, kata itu menjadi Bajranala, nama lain Candi Pawon, candi kecil dua kilometer di timur Borobudur. Susunan kedua candi itu mengikuti rasi bintang Orion, di Jawa orang menyebutnya Waluku. Itulah sebabnya



Salah satu pertunjukan video mapping di Candi Borobudur

sia Bertutur

Senyawa memboyong instrumen musik dari waluku.

Rully Shabara, sang vokalis, menjelaskan bahwa “Vajranala” adalah komposisi musik tiga babak karya Senyawa yang bercerita tentang manusia dan tempat-tempat, seperti candi, yang menjadi penanda suatu kisah dan simbol atas adanya ilmu langit dan tanah yang abadi. “Semoga tidak terlalu berat. Kalau terlalu berat, nikmati musiknya saja,” katanya.

Penampilan Senyawa memang meninggalkan kesan. Raungan vokal dan narasi dari Rully ditingkahi permainan Wukir Suryadi lewat instrumen kreasinya yang punya penanda tersendiri. Mereka juga memboyong monumen—semacam candi kecil—

dengan kobor api di tengahnya beserta dupa-dupa di pinggir panggung.

Bagian pertunjukan itu sempat dikira sesaji penolak hujan. Maklum saja, kompleks Borobudur yang mendung sedari siang tak disambangi hujan hingga malam. Langit bersih. Meski tak ada rasi bintang seperti nyanyian Senyawa, bundar bulan terlihat dengan jelasnya.

Apalagi jauh ratusan meter di belakang sana stupa-stupa Borobudur disemprot permainan cahaya yang memukau. Pentas itu pun mengguncang malam di Borobudur dan memungkasi Indonesia Bertutur secara penuh makna.

Toh, menikmati musik Senyawa juga bukan perkara enteng. Pertunjukan itu pun jelas bukan untuk semua

penonton yang datang dari berbagai kalangan dan usia itu. Sebagian penonton pun berangsur-angsur meninggalkan lokasi di tengah pertunjukan—mungkin juga karena pentas yang dimulai cukup malam, jam 21.00 WIB.

“Senyawa menarik, tapi yang bisa menikmati ya terbatas. Anak-anak [penggemar musik] rok mungkin masih bisa masuk,” kata Rimba, penyuka musik cadas yang datang dari Yogyakarta, yang asyik merekam pentas itu dengan kamera ponselnya.

Reportoir Brajanala tentang Candi Pawon dari Senyawa hanya satu dari 20 cagar budaya yang dipresentasikan di Festival Indonesia Bertutur. Selain Borobudur sebagai lokasi acara dan candi-candi lain, situs Sangiran, Liang Bua, Leang-Leang, Sangkulirang, Lore Lindu, Kutai, hingga Gugus Misool di Raja Ampat, juga terlihat jejaknya dalam pertunjukan dan karya seni di lima panggung di festival ini.

FOTO: FOTO: INDONESIA BERTUTUR 2022

Di sisi timur Anarta, pada waktu yang lebih sore, terdapat Panggung Senja Virama. Panggung ini diseting dengan dikelilingi 37 gerai kuliner dan kerajinan UMKM. Virama menampilkan pertunjukan yang lebih ramah penonton dari semua segmen, mulai dari tari, dongeng, hingga musisi dan grup populer, macam Ardhito Pramono, Letto, dan The Finest Tree.

Melangkah ke utara dari Virama, pengunjung dapat menikmati sejumlah instalasi dalam rangkaian Festival Cahaya Kiranamaya. Tiga seniman memajang karya yang atraktif lewat permainan cahaya.

Seperti kelompok Kirana Darma dengan instalasi "Nirleka" yang mereka ulang kehidupan prasejarah. Termasuk dalam olah cahaya ini, Indonesia Bertutur juga menghadirkan 12 seniman video mapping yang membuat Candi Borobudur bermandi cahaya tiap malam.

Seturut langkah kaki ke utara dari instalasi cahaya ini, pengunjung dapat duduk santai menyaksikan layar tancap di pentas bertajuk Layarambha. Sebanyak 24 film tari dari berbagai penjuru dunia ditayangkan di layar besar luar ruang tersebut. Pada hari terakhir,

“ Dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang media, kami ingin mendorong pemanfaatan teknologi agar publik memiliki akses yang semakin besar terhadap warisan budaya yang kita miliki dan dapat memanfaatkan warisan budaya tersebut sebagai sumber ilmu pengetahuan. ”

Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

film *Sekala Niskalakarya* Kamila Andini ditayangkan beserta diskusi bersama sang sutradara.

Kemeriahan Indonesia Bertutur tak hanya berpusat di kompleks Candi Borobudur. Empat galeri di sekitar candi itu juga menjadi lokasi pameran seni puluhan karya seni bertajuk "Visaraloka". Jika datang dari luar Magelang, seperti Gatra yang menyusuri satu per satu pameran yang digelar hingga 13 September itu, lokasi

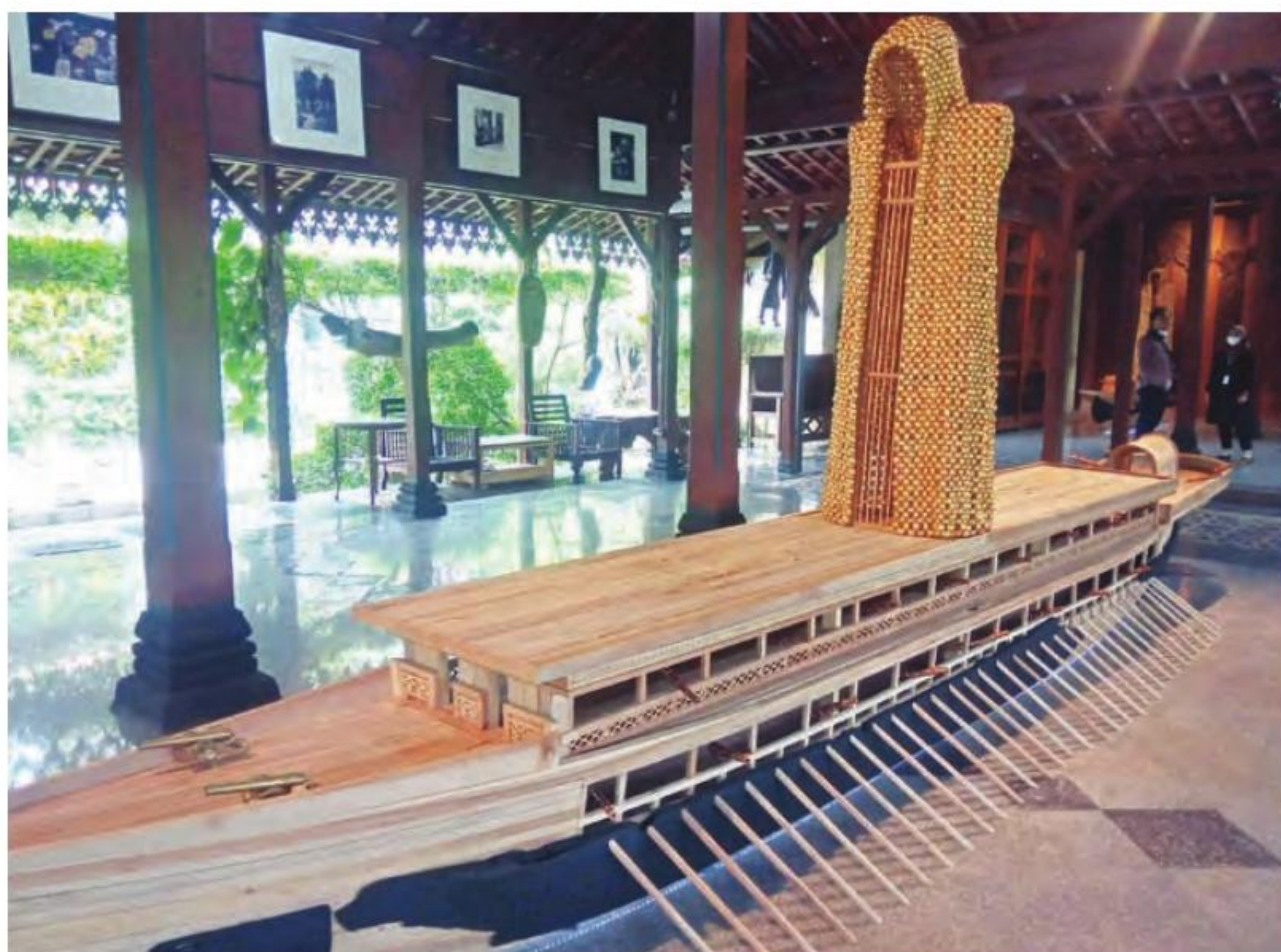
Visaraloka pertama berada di Museum Haji Widayat.

Tanpa ajang ini pun museum ini layak dikunjungi karena menyimpan 1.000 lebih karya maestro pelukis Widayat. Khusus untuk Indonesia Bertutur, di salah satu pendopo terpajang miniatur tiga kapal Aceh, Banten, dan Madura dengan jubah berornamen pala berlapis emas. Instalasi bertajuk "History Repeats Itself" (2016) karya Titarubi ini menggambarkan terulangnya sejarah penjajahan yang terus berulang bahkan hingga kini.

Selain itu, ada karya "Pertama Ada Hitam" (2021), instalasi kostum dan kain kulit kayu dari seniman Mella Jaarsma dan Agus Ongge. Instalasi ini coba menggugat fungsi pakaian yang mencerminkan struktur sosial, tradisi, etnis, agama, ekologi, dan kondisi geografis, terutama di masa Orde Baru.

Dalam paparannya, Mella menjelaskan, pada 1971-1972, pemerintah Orde Baru memprakarsai "Operasi Koteka" untuk memberantas penggunaan koteka pada laki-laki Papua. "Koteka akan diganti dengan celana panjang dan kemeja yang dianggap lebih modern. Bentuk-bentuk represi dengan dalih modernitas tersebut sebagian besar telah menghilangkan pengetahuan lokal termasuk dalam mengolah dan mendesain kulit kayu," tutur Mella.

Selanjutnya, di Limanjawi Art House, karya Ade Darmawan, "Tuban" (2019), menyita perhatian dan lagi-lagi menyinggung Orde Baru. Dalam satu ruang, ia bak menciptakan penelitian di laboratorium dengan menyuling se-



Instalasi bertajuk "History Repeats Itself" (2016) karya Titarubi

jumlah rempah, dan bahan alam dari Indonesia dengan air laut dari Tuban.

Di tiap sulingan, lewat tiap tetes sulingan air itu, buku-buku tentang propaganda Orde Baru dihancurkan. Karya ini terinspirasi dari novel *Arus Balik* karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Tempat pameran berikutnya, Eloprogo Art House, adalah galeri dan rumah yang eksotis. Di lahan sekitar 10.000 hektare, berdiri bangunan-bangunan kayu jati lawasan, di tepi pertemuan dua sungai, Elo dan Progo—meski kala itu airnya terlihat coklat keruh akibat luapan air hujan. Di ajang ini, si empunya rumah, seniman Sonny Santosa memajang sejumlah lukisan karyanya di rentang 2013-2019, berdasar reka ulang relief Borobudur tapi dengan mengeksplorasi warna tanah liat.

Sementara itu, di ujung galeri, di tanah lapang tepat di pinggir jurang di titik temu Elo-Progo, Tromarama memacak karya “Madakaripura”, berupa video dari situs air terjun di Probolinggo yang dipercaya sebagai tempat Patih Gajah Mada moksa itu. Video itu menampilkan foto yang terdistorsi secara real time berdasar input data cuaca aktual di lokasi aslinya.

Sejumlah seniman juga menampilkan *performance art* di area yang benar-benar cocok untuk healing ini, termasuk prosesi Ritual Air di pembukaan Indonesia Bertutur.

Tak ketinggalan, di Apel Watoe Art Gallery, salah satu karya yang dipamerkan, Timur Merah Project VII: Divine Comedia 2021-2022 karya Citra Sasmita terasa berbeda di tengah karya lain. Karya ini membentangkan kanvas 90 x 600 cm dari kain kamasan tradisional. Di sana termuat kisah surga-neraka dalam teks Bhima Swarga dari Balidi abad ke-19. Teks sinkretisme Hindu-Buddha ini ternyata mirip dengan Divina Commedia karya Dante Alighieri dari Italia di abad ke-14.

Mengusung tema “Mengalami Masa Lalu, Menumbuhkan Masa Depan”, Indonesia Bertutur menjadi bagian kegiatan Presidensi G20 bidang



Karya Ade Darmawan, "Tuban" (2019)

FOTO: GATRA/ARIF KOES

kebudayaan. Namun semaraknya Indonesia Bertutur, bukan hanya ada di area candi dan galeri yang dapat dihadiri secara gratis itu.

Saat GATRA menyusuri sudut-sudut desa di kawasan Borobudur, kemeriahan ajang seni dan kebudayaan pun teramat kental. Dalam beberapa malam, pihak desa menggelar pentas wayang kulit. Sementara itu, pada Senin, 12 September, berlangsung kirab budaya yang menampilkan ogoh-ogoh berbagai satwa yang mewakili tiap desa.

Festival ini melibatkan 900 pegiat budaya dan seniman, dari dalam negeri maupun mancanegara, dengan menampilkan ratusan karya seni. Direktur Artistik Indonesia Bertutur, Melati Suryodarmo, bahkan menyatakan inilah “festival kebudayaan terbesar di Indonesia”.

“Saya berharap kebudayaan dalam format kekinian dapat memantik ketertarikan generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan kebudayaan Indonesia,” tutur seniman *performance art* ini.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid menjelaskan, ajang ini menjadi sarana untuk menjaga budaya dan cagar budaya

sebagai sumber ilmu pengetahuan. Indonesia Bertutur juga berupaya memfasilitasi para pelaku budaya sekaligus memperluas akses publik atas warisan budaya di Indonesia.

Namun, supaya lebih menarik, langkah itu dikemas melalui teknologi terkini, seperti memanfaatkan instalasi cahaya dan video mapping. “Dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang media, kami ingin mendorong pemanfaatan teknologi agar publik memiliki akses yang semakin besar terhadap warisan budaya yang kita miliki dan dapat memanfaatkan warisan budaya tersebut sebagai sumber ilmu pengetahuan,” katanya.

Ia berharap festival ini dapat memicu kreativitas para seniman, terutama seniman muda, sehingga makin banyak karya yang mengenalkan budaya Indonesia. Setelah ajang perdana ini, Indonesia Bertutur direncanakan digelar berkala setiap dua tahun sekali.

“Saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut dalam berbagai bentuk yang lain di masa mendatang. Festival ini juga menunjukkan betapa pentingnya kebudayaan dalam upaya kita untuk bangkit dari pandemi,” ujar Hilmar. ■

ARIF KOESHERNAWAN

PAPUA

Petaka Setelah Transaksi Senjata

Empat warga sipil menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua. Pelaku diduga melibatkan oknum prajurit TNI Angkatan Darat. Presiden Jokowi meminta pengusutan kasus tanpa pandang bulu.

“**B**umi Amungsa” digegerkan peristiwa keji di tengah suasana perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Senin, 22 Agustus 2022, empat warga sipil menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka di antaranya Arnold Lokbere, Lemanion Nirigi, Irian Nirigi, dan Jenius Tini alias Atis Tini.

Dari sejumlah pemeriksaan, polisi menduga pelaku kejahatan sadis merupakan enam oknum prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) dan empat warga sipil. Motifnya, perampokan dengan rekayasa pembelian senjata api. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, tragedi berdarah itu bermula ketika korban hendak membeli senjata jenis AK-47 dan FN dari pelaku.

Kemudian, pelaku menyiapkan benda menyerupai senjata api untuk meyakinkan korban. Ketika korban hendak bertransaksi, pelaku melakukan eksekusi dengan membunuh korban. Tak hanya itu, korban dipotong kepala dan kakinya, semua organ dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Mimika.

“Kita sudah lakukan penangkapan terhadap tiga pelaku dari masyarakat

sipil dan enam dari TNI. Proses ini bergabung dengan POM (Polisi Militer) TNI untuk melakukan pendalaman atau proses hukum terhadap kasus pembunuhan berencana ini,” ucap Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal dalam keterangannya kepada GATRA, awal September lalu.

Kamal menyebut, sejauh ini sudah mengamankan sembilan dari 10 tersangka. Tiga terduga pelaku dari masyarakat sipil yakni Andre Pudjianto Lee alias Jeck, Dul Umam, dan Rafles. Satu tersangka lain berinisial RMH masih buron (DPO) dan dalam pengejaran polisi.

Sementara itu, anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam insiden pembunuhan warga sipil Mimika itu antara lain Mayor Infanteri Hf, Kapten Infanteri Dk, Prajurit Kepala Pr, Prajurit Satu (Pratu) Ras, Pratu Pc, dan Pratu R. Sejumlah prajurit diketahui berasal dari Brigade Infanteri Raider/20 Ima Jaya Keramo.

Saat ini, keseluruhan tersangka ditahan di Mapolres Mimika dan Sub-Pomdam XVIII/Cenderawasih di Timika. Kamal membenarkan ada motif ekonomi di balik kasus perampokan berujung mutilasi yang turut melibatkan oknum tentara itu. “Iya, ada modus jual-beli senjata api, maka itu korban menyiapkan uang Rp250 juta, dan uang tersebut sudah dibagi oleh para pelaku,” kata Kamal.

Dari hasil penyidikan, polisi



ANTARA FOTO/SEVANTO PAKIDING

mengungkap salah satu korban mutilasi, Lemanion Nirigi, terindikasi sebagai simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga pimpinan Egianus Kogoya. Jaringan ini disebut aktif mencari senjata dan amunisi di wi-



Tiga tersangka melakukan adegan saat mengikuti rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi empat warga di Timika, Papua

layah Mimika. Sementara, korban lain bernama Irian Nirigi merupakan tokoh terkemuka yang menjabat Kepala Kampung Yugut, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua.

Atas kejadian itu, Kepala Dinas

Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna mengatakan, pihaknya sudah memeriksa enam oknum TNI yang menjadi tersangka. Tim penyidik dari POM kini melakukan penahanan 20 hari ter-

hadap tersangka untuk memudahkan pemeriksaan dan penyidikan.

“Saat ini para tersangka ditahan di ruang tahanan Subdenpom XVII/C Mimika terhitung 29 Agustus sampai 17 September 2022,” kata Brigjen Tatang Subarna dalam keterangannya. Menurutnya, TNI AD akan mengungkap tuntas kasus tersebut serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum berlaku.

Kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika menambah daftar kekerasan dan tragedi yang dialami warga sipil. Sebelumnya, ada kasus penembakan di Intan Jaya terhadap Pendeta Yeremias Zanambani, kasus penghilangan secara paksa serta pembunuhan terhadap Luther dan Apinus Zanambani, serta pembunuhan terhadap Sem Kobogau.

Data dari Amnesty International Indonesia mengungkap, terjadi 61 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat yang melibatkan aparat keamanan, dengan total 99 korban. Angka kekerasan itu dicatat dalam rentang Februari 2018 hingga Juli 2022.

Presiden Joko Widodo angkat bicara tentang kasus pembunuhan dan mutilasi warga di Mimika. Di sela-sela kunjungan kerja ke Papua untuk peresmian Papua Football Academy dan pertemuan dengan perwakilan perusahaan tambang Freeport, Jokowi meminta peristiwa tersebut diusut tuntas.

“Saya kira yang paling penting usut tuntas kemudian proses hukum,” ujar Jokowi kepada wartawan di Gedung Olahraga (GOR) Toware (HMS), Kabupaten Jayapura, 31 Agustus lalu. Ia memerintahkan Panglima TNI membantu proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Karena, kasus mutilasi tersebut melibatkan oknum prajurit TNI AD.

“Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tetapi di-back up oleh TNI. Sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar,” ia menegaskan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyambut baik arahan Jokowi agar TNI bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengusut kasus mutilasi di Mimika. Usman mengatakan pentingnya transparansi atau keterbukaan terhadap proses hukum pelaku, sehingga memudahkan kontrol masyarakat terhadap kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan.

“Mengingat sejarah panjang impunitas dan hampir tidak ada catatan akuntabilitas di Papua, kami menyerukan kepada TNI dan aparat hukum memastikan semua tersangka, termasuk [pelaku] dari unsur militer, diadili di pengadilan terbuka di bawah hukum pidana sipil,” kata Usman.

Aparat, menurutnya, harus melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan atas kasus

yang menyita perhatian publik tersebut. Kasus penegakan hukum yang tak tuntas hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. “Kita tidak membiarkan kasus ini berhenti begitu saja tanpa penyelesaian, seperti yang terjadi pada banyak kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua,” ujarnya.

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan investigasi terhadap kasus di Mimika. “Sekarang tim Komnas HAM masih memeriksa, tapi belum semua kita dapatkan. Karena, untuk akses ke Denpom (Detasemen Polisi Militer) untuk memeriksa anggota TNI, ya harus ada prosedur tersendiri,” kata Taufan ketika diwawancara wartawan GATRA Alfiansyah Ramdhani di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu.

Taufan menerangkan, Komnas HAM menerima laporan kasus tersebut sebagai pidana biasa, yakni perampokan uang korban dengan modus transaksi jual-beli senjata. Karena itu, pihaknya ingin mendalami apakah ada motif lain di balik pembunuhan sadis tersebut. Komnas HAM membentuk tim investigasi yang dipimpin Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B Ramandey dan Komisio-ner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam.

“Ya memang motifnya kriminal, tapi kita masih belum sepenuhnya meyakini itu. Artinya, kita masih mau mencari lagi apakah ada motif lain di belakangnya,” ujar Taufan. Ia menyebut, Komnas HAM kerap menerima laporan dari pihak keamanan, masyarakat sipil, dan LSM terkait kasus transaksi senjata dan amunisi dari aparat keamanan kepada



Tersangka Mayor HFD (kedua kiri) saat mengikuti rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi

ANTARA FOTO/SEVANTO PAKDING

kelompok bersenjata Papua.

“Ini (transaksi senjata) kan sudah lama terjadi dan sudah menjadi perhatian serius dari Panglima TNI, jajaran militer, dan kepolisian,” katanya.

Taufan menyatakan, terdapat ketidakpuasan dari elemen masyarakat sipil terhadap pengusutan kasus tersebut. Banyak tokoh masyarakat Mimika termasuk perwakilan keluarga korban yang meminta kesediaan Komnas HAM turun tangan. Mereka menginginkan adanya lembaga Negara independen untuk melakukan investigasi. Meski kronologis dan fakta penyidikan sudah terungkap, Komnas HAM belum menyimpulkan kasus mutilasi tersebut sebagai *extra judicial killing*.

Meski begitu, pihaknya akan mendorong penjatuhan hukuman pidana setimpal bagi para pelaku, termasuk pada oknum TNI. Hukuman terhadap perbuatan ini harus berat, ditambah sanksi pemecatan, pemberhentian tidak hormat. Karenanya, Komnas HAM mendorong penegakan hukum terhadap oknum TNI melalui jalur peradilan umum. Ia menyebut, kasus kriminalitas yang melibatkan TNI di Papua bukan hanya saat ini. Sebelumnya, terdapat indikasi keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai perlu pengusutan mendalam terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi di Papua. Tak kalah penting, kasus yang melibatkan oknum TNI tersebut harus diproses transparan untuk melahirkan

“Ya memang motifnya kriminal, tapi kita masih belum sepenuhnya meyakini itu.”

AHMAD TAUFAN DAMANIK
Ketua Komnas HAM



Ahmad Musthofa Kamal

DOK. POLDA PAPUA

rasa keadilan di masyarakat. “Diusut siapa yang terlibat, siapa pelakunya, dan juga disampaikan secara terbuka,” ucap Dave kepada wartawan GATRA Yoga Aditya Pratama.

Selain pengusutan terhadap motif dan pelaku, penyidik perlu mengonfirmasi kabar dugaan penjualan senjata oleh oknum aparat kepada KKB. Karena itu, dibutuhkan inventarisasi terhadap kejadian yang terjadi sebelumnya. Politikus Golkar itu mengaku belum mengetahui detail kejadian nahas tersebut. Karena itu, Komisi I berencana memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrachman untuk rapat kerja bersama DPR.

“Sehingga bisa ditelusuri kebocorannya di mana dan diketahui apakah itu pencurian senjata dari stok TNI ataukah itu barang selundupan,” kata Dave.

Selain itu, DPR mendorong dilakukannya penyidikan kasus secara komprehensif serta perlu dilihat dari perspektif berbeda. Menurutnya, fakta penyidikan yang diungkap polisi baru sebatas pidana pembunuhan. Padahal, di sisi lain, korban mutilasi adalah mereka yang melakukan pembelian senjata yang amunisinya digunakan untuk membunuh aparat dan masyarakat sipil Papua.

“Kalau misalnya yang terjadi ada OPM beli senjata, lalu mereka melakukan pembunuhan terhadap prajurit TNI, itu juga melanggar hak prajurit. Jadi kalau kita mau usut, kita harus usut

semuanya dari kedua belah pihak,” kata Dave.

Namun, ia enggan menanggapi apakah Komisi I akan mendorong peradilan umum bagi tersangka mutilasi dari oknum TNI. Pasalnya, menurutnya itu ada prosesnya sendiri.

Sementara itu, pengamat militer Soleman B. Ponto mengatakan, kasus mutilasi di Papua sudah menemui titik terang. Di mana sanksi etika sudah dijatuhkan TNI kepada para pelaku, sementara sanksi penegakan hukum dijalankan Polri. Ponto berpandangan, pemerintah tidak perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus mutilasi di Mimika, Papua, seperti diusulkan Front Mahasiswa Papua.

“Menurut saya, TGPF itu sudah tidak perlu. Karena di militer sudah jelas [pelakunya], itu orangnya, namanya ada, pangkatnya ada. Tinggal yang dilaksanakan adalah penegakan hukum terhadap para pelaku,” kata Ponto kepada GATRA.

Pembentukan TGPF, Ponto melanjutkan, dibutuhkan jika pengungkapan kasus mengalami kemandekan. “Lain kalau ini belum ketemu [pelakunya] atau ini berbelit-belit. Tetapi dengan yang sekarang ini, semua sudah jelas. Tinggal penegakan hukumnya bawa dia ke pengadilan militer itu sah,” ujarnya.

Pemerintah, Ponto melanjutkan, perlu memperhatikan persoalan di Papua secara serius. Operasi penumpasan KKB/OPM harus dilakukan dengan tepat tanpa berakibat jatuhnya korban sipil. Menurutnya, operasi militer diberlakukan saat negara menghadapi *dissident armed forces* (angkatan bersenjata pembangkang). Suatu kelompok ditumpas dengan operasi militer apabila mempunyai hierarki yang jelas, wilayah kekuasaan atau teritorial yang jelas, serta kemampuan menyerang sewaktu-waktu.

“Kalau ini tidak terpenuhi ya mereka sebagai kriminal *aja*. Sebagian orang yang memiliki senjata tanpa izin, itu kriminal. Kalau kriminal maka yang ada adalah operasi penegakan hukum atau *law enforcement*,” Ponto memungkasi. ■

ANDHIKA DINATA

PENYELENGGARA PEMILU

Segudang Pekerjaan Rumah DKPP

Persoalan etik kerap mengganjal para penyelenggara Pemilu, dari pusat hingga daerah. Peran DKPP perlu lebih diketengahkan. Masih ada persoalan transparansi putusan yang membuat tegang antar penyelenggara.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN



Pemilihan umum (pemilu) adalah alat suksesi kekuasaan yang demokratis. Tapi, transisi kekuasaan politik melalui pemilu bukan cuma perkara hasil, melainkan rangkaian proses panjang tahapan kepemiluan, mulai pendaftaran hingga pengumuman pemenang. Proses panjang pemilu terkadang tak berjalan mulus. Ada banyak soal teknis hingga etik di sana.

Jika bicara soal etika, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) didapuk menjadi hakimnya. Secara historikal, DKPP sebenarnya sudah terbentuk melalui Undang-Undang 12 Tahun 2003. Saat itu, DKPP masih merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sifatnya *ad hoc*, bernama Dewan Kehormatan Komisi

Pemilihan Umum (DK-KPU).

Selanjutnya, melalui UU Nomor 15 tahun 2012, DKPP resmi menjadi lembaga bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional. Selain itu, tugas, fungsi, kewenangan DKPP menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.

Untuk mengawal proses kontestasi politik 2024, pemerintah dan DPR resmi menunjuk lima orang anggota DKPP yang baru, dan dua anggota *ex officio* dari KPU dan Bawaslu. Jika dirinci satu per satu, DKPP diisi oleh Heddy Lugito, Muhammad Tio Aliansyah, Ratna Dewi Pettalolo, J. Kristiadi, I Made Kade Wiarsa Raka Sandi, Yulianto Sudrajat, dan Puadi.

Nama pertama yang disebut didapuk menjadi Ketua DKPP.

Ketua DKPP RI periode 2022-2027, Heddy Lugito, mengatakan bahwa sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan sosialisasi menyeluruh mengenai persoalan etik di semua elemen penyelenggara pemilu. "Kita minta intern Bawaslu dan KPU jangan sampai ada pelanggaran etik. Bukan hanya pusat, tapi sampai daerah. Nanti kita lihat bobot pelanggarannya. Kalau sekali pelanggaran langsung berat, ya akan kita ambil. Kalau masih ringan kita serahkan ke internal Bawaslu atau KPU," ujar Heddy saat ditemui GATRA di Gedung DKPP.

Selain urusan sosialisasi, tiga penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP juga melakukan



Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin pengucapan sumpah jabatan saat pelantikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Negara, Jakarta

koordinasi tripartit. Bagi Bawaslu, langkah koordinatif ini penting agar semua aturan lintas penyelenggara ini tersinkronisasi dengan baik.

Bawaslu, misalnya, melakukan harmonisasi pada beberapa poin dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Begitu juga dengan Peraturan KPU (PKPU) yang juga dibahas bersama. “Kalau dulu jalan sendiri-sendiri seperti ini. Dengan seperti ini diharapkan ke depan tidak ada *dispute* di antara penyelenggara,” ujar Heddy.

Salah satu pekerjaan rumah di antara elemen penyelenggara pemilu adalah situasi di mana KPU dan Bawaslu kerap tak sejalan dalam berbagai hal. Menurut Heddy, komunikasi tripartit yang sekarang sedang dijalani oleh tiga lembaga itu bisa menjadi solusi. “Bikin

peraturan harus berbarengan. Jadi, insyaallah semoga tidak ada lagi saling menyalahkan ke depan ini karena kita komunikasi terus,” katanya.

Jika bicara masalah etik, Heddy mengakui tidak ada batasan atau parameter tertentu. Menurutnya, etika penyelenggara terlalu luas dan juga di saat yang bersamaan sifatnya abu-abu. “Masalah etik itu kan bukan masalah benar dan salah, tapi masalah kepatutan bertindak dan keadaban berperilaku. Parameternya memang sangat luas. Dibutuhkan kebijaksanaan dan kejeranian,” kata Heddy.

Sementara itu, dari sisi internal, Heddy mencatat ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh DKPP. Salah satunya adalah posisi DKPP sebagai lembaga. Saat ini, DKPP

secara administratif masih berada di bawah Kemendagri dan dipimpin oleh eselon II. “Padahal DKPP dulu dicita-citakan diselenggarakan secara mandiri,” katanya.

Persoalan lainnya adalah anggaran. Untuk tahun ini, kata Heddy, anggaran DKPP hanya Rp28 miliar. “Itulah kenapa kita kalau sidang-sidang di daerah kita melakukan lewat daring. Bukan semata pandemi, kalau mau luring tiket mahal,” katanya.

Masalah selanjutnya adalah masih minimnya sumber daya manusia. Berdasarkan Keputusan Mendagri, DKPP diamanahkan untuk mempunyai 220 pegawai analis. Saat ini, jumlah tersebut bahkan tak sampai setengahnya, yakni hanya berjumlah sekitar 80 orang. “Bagaimana kita bisa bicara optimal kalau tidak didukung SDM yang memadai?” ucap Heddy, retorik.

Walau begitu, Heddy menilai bahwa anggota DKPP yang saat ini sudah berpengalaman di bidang kepemiluan. Dengan demikian, untuk saat ini, tugas DKPP tampak tak akan terlalu berat. Heddy berharap pelanggaran etik di tahapan pemilu kali ini bisa diminimaisir.

Di sisi lain, DKPP merupakan lembaga yang sifatnya pasif. Artinya, DKPP tidak bisa berperan aktif dalam mengawasi perilaku para penyelenggara di semua lapisan. Dengan demikian, DKPP hanya menunggu laporan pelanggaran yang dilayangkan publik. “Kita sudah bikin aplikasi SIETIK. Itu mempermudah orang untuk melakukan pengaduan. Tidak semua pengaduan itu bisa kita terima. Kita lihat dulu. Apakah ini pelanggaran etik, apakah fitnah, apakah perilaku yang bersifat sangat pribadi. Sangat repot, itu harus kita pisahkan,” ia menjelaskan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyanti, punya penilaian tersendiri mengenai sepak terjang DKPP dari waktu ke waktu. Baginya, secara umum DKPP sebagai penjaga etik penyelenggara pemilu mengalami dinamika yang cukup tinggi. Misalnya, dimulai dengan adanya putusan DKPP yang masuk ke ranah administrasi pemilu sampai adanya putusan yang menimbulkan kete-



ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terpilih Heddy Lugito (tengah) didampingi para anggota (kiri ke kanan) Puadi, J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarasa Raka Sandi, Yulianto Sudrajat, Muhammad Tio Aliansyah se usai konferensi pers di kantor DKPP, Jakarta

gangan antar lembaga penyelenggara pemilu.

"Tapi saya masih melihat lembaga ini sebagai institusi yang penting sebagai penjaga etik penyelenggara pemilu. PR-nya saat ini bagaimana meningkatkan kewibawaan lembaga ini ke depan. Menghasilkan putusan yang profesional adalah hal yang sangat penting agar trust publik dan lembaga penyelenggara juga meningkat," tutur Khoirunnisa kepada wartawan GATRA Yoga Pratama.

Perludem juga memiliki sedikit catatan kritis untuk DKPP. Menurutnya, DKPP masih harus membenahi soal transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi hukum acara DKPP. Ia ingin DKPP membuka ruang untuk membuka kesempatan kepada semua pihak dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik. "Karena putusan etik akan memberi jejak serius pada seseorang penyelenggara pemilu. Maka perlu dilakukan dengan hati-hati," ujarnya.

Mengenai anggota-anggota DKPP yang baru dilantik, Khoirunnisa menilai bahwa beberapa di antaranya punya *record* sebagai penyelenggara

pemilu. "Tentu mereka paham soal tantangan penyelenggaraan pemilu. Saya melihatnya ini sebagai pertaruhan saja dari pilihan politik DPR dan Presiden. Apakah orang-orang pilihannya bisa menjaga etika penyelenggara pemilu," katanya.

Pemilu 2024 sudah dikenal sebagai suksesi kekuasaan paling rumit di dunia. Dengan kompleksitas pemilu, DKPP punya peran penting untuk menjaga

“DKPP juga harus bisa menjaga diri dari intervensi politik yang berpotensi mengganggu pemilu kita.”

FIRMAN NOOR

Profesor riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

etika para penyelenggara. Profesor riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor mengatakan, DKPP memiliki peran penting dalam mengawal marwah pemilu. Suka atau tidak, pemilu menjadi legitimasi sebuah pemerintahan. "Pemilu kita ini masih jauh dari bersih," katanya kepada GATRA.

Menurut Firman, ada beberapa soal penting yang selalu hadir dari pemilu ke pemilu. Mulai rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah yang memberikan peluang munculnya sosok yang jauh dari kata ideal. "Ada pesanan, intervensi, atau logika pembiaran sehingga dari sisi itu saja tidak semuanya sempurna. Belum lagi dengan tekanan di wilayah tertentu," ujarnya.

Mengingat lingkungan kepemiluan Indonesia belum terlalu bersih, maka tugas DKPP menjadi penting. Pekerjaan DKPP ke depan harus lebih transparan, adil, dan otoritatif kepada semua pihak. "DKPP juga harus bisa menjaga diri dari intervensi politik yang berpotensi mengganggu pemilu kita," Firman menjelaskan. ■

ADITYA KIRANA



Heddy Lugito

(KETUA DKPP)

Tempat tanggal lahir:

Boyolali, 5 Juli 1960

Pendidikan: Fakultas Sastra Universitas

Diponegoro

Karir:

- ♦ Wartawan Majalah Tempo 1987-1994
- ♦ Wartawan Majalah GATRA 1994-2019
- ♦ Pemimpin Umum Majalah GATRA 2016-2019
- ♦ Komisaris PT Pelindo III 2015-2019
- ♦ Komisaris PT Pertani 2021-2022
- ♦ Komisaris Independen PT Sang Hyang Seri 2021-2022
- ♦ Anggota Dewan Penasehat Forum Pemred
- ♦ Sekjen Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2009-2017
- ♦ Sekjen Forum Pemred 2014-2018



Muhammad Tio Aliansyah

(ANGGOTA)

Tempat tanggal lahir: Jakarta, 9 September 1974

Pendidikan: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Kotabumi

Karir:

- ♦ Anggota Panwaslu Kabupaten Lampung 1999
- ♦ Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara 2003-2014
- ♦ Anggota KPU Provinsi Lampung 2014-2024
- ♦ Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur KPU 2019-2022



Ratna Dewi Pettalolo

(ANGGOTA)

Tempat tanggal lahir: Palu, 10 Juni 1967

Pendidikan:

- ♦ (S1) Fakultas Hukum, Universitas Tadulako 1991
- ♦ (S2) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 2005
- ♦ (S3) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 2016

Karir:

- ♦ Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2012-2017
- ♦ Anggota Bawaslu RI 2017-2022
- ♦ Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah unsur Bawaslu 2014 - 2016
- ♦ Anggota DKPP RI Ex Officio Bawaslu (2017 - 2018)



J. Kristiadi

(ANGGOTA)

Tempat tanggal lahir:

Yogyakarta, 24 Maret 1948

Pendidikan:

- ♦ (S1) Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) 1976.
- ♦ (S2) Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM)
- ♦ (S3) Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) 1993

Karir:

- ♦ Anggota MPR RI 1987-1992
- ♦ Ketua Departemen Politik CSIS, Jakarta 1991-1999
- ♦ Wakil Direktur Eksekutif CSIS, Jakarta 1999-2004
- ♦ Sekretaris yayasan CSIS, Jakarta 2005 - Sekarang



I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

(ANGGOTA)

Tempat tanggal lahir:

Jembrana, 21 November 1970

Pendidikan:

- ♦ (S1) Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) 1999
- ♦ (S2 Double Degree) Program Studi Ilmu Hukum
- ♦ Program Studi Magister Kajian Budaya Universitas Udayana 2016

Karir:

- ♦ Anggota KPU Provinsi Bali periode 2008-2013
- ♦ Ketua KPU Provinsi Bali periode 2013-2018
- ♦ Anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023
- ♦ Anggota KPU RI 15 April 2020
- ♦ Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bali unsur KPU 2015-2017

ANGGOTA DKPP EX OFFICIO



Yulianto Sudrajat

(ANGGOTA)

Tempat tanggal lahir:

Sukoharjo, 9 Juli 1973

Pendidikan:

- ♦ (S1) FISIP

Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

- ♦ (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Karir:

- ♦ Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo 2008-2018
- ♦ Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023
- ♦ Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada DKPP 2019-2020
- ♦ Anggota KPU RI 2022-2027



Puadi

(ANGGOTA)

Tempat tanggal lahir:

Bekasi, 4 Januari 1974

Pendidikan:

- ♦ (S1) Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 1998

- ♦ (S2) Manajemen di Universitas Trilogi
- ♦ (S3 Sementara) Ilmu Politik di Universitas Nasional

Karir:

- ♦ Anggota Panwaslu Kota Jakarta Barat 2014.
- ♦ Ketua Panwaslu Kota Jakarta Barat 2016-2017
- ♦ Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
- ♦ Anggota TPD pada DKPP 2019-2020
- ♦ Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027



Sumber: Riset GATRA, diolah

NARAPIDANA KORUPSI

Diskon Banyak hingga Bebas

Korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa kini dianggap tak berbeda dengan tindak pidana umum. Selain tuntutan tak maksimal dan vonis ringan, kini koruptor mudah mendapat remisi hingga bebas lebih cepat.

Rombongan narapidana korupsi menghirup udara bebas pada Selasa 6 September lalu. Total ada 23 napi koruptor mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menerima beragam potongan masa tahanan atau remisi.

Di antara mereka, ada nama-nama besar, yakni mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah, mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Lalu ada mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, hingga Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Para terpidana ini bebas dari penjara lebih cepat ketimbang vonisnya. Contohnya mantan jaksa Pinangki, ia terbukti menerima suap dari terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, sebanyak US\$500.000. Sang jaksa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang senilai US\$375.229. Akibatnya, Pinangki divonis 10 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu dikorting menjadi 4 tahun penjara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pinangki baru menjalankan masa pidananya selama dua tahun. Semestinya, ia baru bebas murni pada 18 Desember 2023. Namun, ia bisa keluar dari penjara lebih cepat karena mendapatkan bebas bersyarat, setelah me-

nerima berbagai pengurangan masa kurungan. Korting kurungan itu mulai dari remisi Lebaran berupa diskon hukuman satu bulan dan remisi umum hari kemerdekaan Indonesia sebanyak tiga bulan.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjelaskan, pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana. "Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan nondiskriminasi. Tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Ditjen Pas Kemenkumham, Rika Aprianti.

Persyaratan tersebut, Rika melanjutkan, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pas), antara lain berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan sudah melewati dua pertiga masa pidana.

Pembebasan bersyarat para penjahat kasus korupsi ini memantik kecewa banyak pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, karena itu penanganan kasusnya dilakukan pula dengan cara-cara yang ekstra, termasuk soal pelaksanaan pembinaan.



Ratu Atut Choisyah

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penegakan hukum mengentaskan korupsi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa penegakan hukum kepada para koruptor bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, serta pembelajaran kepada masyarakat agar tidak korupsi. Karena itu, tidak seharusnya ada perlakuan khusus yang diberikan kepada para napi koruptor. "Dalam rangkaian penegakan hukum ini, sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus yang justru akan mencederai semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujarnya.

Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, turut kecewa dengan obral re-



sa dipulihkan, yang 80% tidak bisa dipulihkan karena rata-rata napi sering lebih senang menjalani pidana pengganti dibanding membayar uang pengganti,” ujarnya.

Kekecewaan serupa disampaikan para pegiat antikorupsi. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menganggap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada napi korupsi seolah menganulir penetapan korupsi yang selama ini digaungkan sebagai kejahatan luar biasa.

“Ini menunjukkan Indonesia sangat ramah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai satu ancaman yang serius bagi negara. Terpidana korupsi juga dianggap tidak berbeda dengan terpidana jenis tindak pidana yang lain,” kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan GATRA Muhammad Muttaqin.

Menurut Zaenur, obral remisi dan bebas bersyarat ini merupakan dampak dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP)

FOTO-FOTO: GATRA/ADI WIJAYA

remisi dan pembebasan bersyarat napi korupsi. Keringanan ini, Boyamin mengungkapkan, ibarat pesan kepada masyarakat bahwa konsekuensi korupsi tidak menakutkan. Ia merujuk kepada data Indonesia Corruption Watch (ICW), yang mencatat rata-rata putusan hukuman pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) hanya tiga tahun penjara.

Vonis ringan tersebut, menurut Boyamin, tidak mencerminkan ganjaran dari korupsi sebagai kejahatan luar biasa. “Hukumannya sudah ringan, lalu dapat keringanan-keringanan, bahkan bebas bersyarat seperti kasus Pinangki. Inilah yang kemudian melukai masyarakat sebagai korban korupsi,” ujarnya kepada GATRA.

Boyamin masih ingat penghapusan syarat khusus untuk remisi ko-

ruptor karena mempertimbangkan hak asasi terpidana, tanpa memikirkan rakyat yang jadi korban kejahatannya. Ia menilai, sejauh ini sistem penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, belum berdimensi pada korban. Segala bentuk diskon hukuman untuk napi korupsi telah menodai penetapan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. “Kini korupsi sama saja dengan pencopet atau jambret di pasar. Artinya, kita ini jatuh sejatuh-jatuhnya pada pelaksanaan putusan,” ia mengungkapkan.

Boyamin juga menyoroti kerugian keuangan negara akibat korupsi yang tidak bisa dipulihkan optimal. “Uang pengganti, saya yakin hanya 10%-20% yang bi-



Zumi Zola



Patrialis Akbar

GATRA/ADI WIJAYA

Nomor 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung (MA). Beleid yang kerap disebut PP pengetatan remisi ini mensyaratkan dua hal bagi napi korupsi untuk memperoleh remisi. Pertama, harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau *justice collaborator*. Kedua, terpidana membayar lunas denda dan uang pengganti kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan.

Sekadar informasi, PP pengetatan remisi ini berulang kali hendak dihapus, termasuk oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Zainur Rohmanyang diterbitkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pernah pula diuji materi ke MA sebelumnya, tetapi gagal.

Pada 29 Oktober 2021, aturan ini kembali digugat ke MA. Pemohon *judicial review* kala itu adalah lima kepala desa terpidana korupsi. Mereka mengujikan empat pasal di PP tersebut terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pas lama). Kali ini permohonan tersebut dikabulkan MA.

Putusan MA ini menuai kritik dari kelompok antikorupsi. Mereka

berharap ketentuan khusus yang dibatalkan MA tersebut dicantumkan kembali dalam aturan selevel UU, yakni UU Pas baru, yang saat itu revisi Rancangan Undang Undang (RUU)nya sedang disusun oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sayangnya, harapan itu tak terealisasi saat Presiden Joko Widodo mengundangkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pas). UU baru ini malah semakin memperkuat putusan MA. Kini syarat pemberian remisi disamaratakan. Pengecualian hanya berlaku bagi napi dengan vonis hukuman mati atau seumur hidup.

UU Pas baru, Zainur menambahkan, mengokohkan paradigma korupsi bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa oleh pembentuk kebijakan. "Padahal undang-undang adalah aturan yang paling tepat untuk membuat syarat-syarat khusus pemberian remisi," ujarnya.

Menurut Zainur korupsi tak dapat disamakan dengan tindak pidana umum lainnya. Sebabnya sifat, karakteristik, modus, terutama dampaknya berbeda dengan tindak pidana biasa. Korupsi merugikan keuangan negara, merusak sistem, sehingga UU Pas seharusnya mengatur syarat-syarat khusus pembe-

rian remisi bagi napi korupsi.

"Ketika UU PAS ini disusun, tidak ada spirit antikorupsi. Tidak punya tujuan untuk membuat jera para pelaku sehingga meniadakan syarat khusus, adanya hanya syarat umum (remisi) dan pembebasan bersyarat," ia mengungkapkan.

Zainur khawatir tren tuntutan tidak maksimal, vonis ringan hakim, kemudahan mendapat remisi hingga pembebasan bersyarat bagi koruptor berimbas pada makin suburnya praktik rasuah ini. Ke depan korupsi dianggap bukan kejahatan luar biasa dan tidak ada efek jera dalam upaya pemberantasannya. Ini diperparah dengan ketiadaan instrumen hukum yang bertaji dalam hal pengembalian aset-aset hasil tindak kejahatan.

"Seperti kita ketahui, rancangan UU tentang Perampasan Aset tak kunjung kelar, diam di tempat. Eksekutif dan legislatif tidak punya iktikad baik menyusun UU Perampasan aset untuk segera disahkan," ia menegaskan.

Zaenur meyakini urgensi UU Perampasan Aset sangat tinggi untuk menghadirkan efek jera bagi koruptor. Korupsi merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, maka harus

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

diberikan pendekatan disinsentif ekonomi. “Para pelaku tipikor itu khawatir hidup miskin, sehingga pemiskinan menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Kemenkum HAM punya alasan kenapa syarat khusus remisi bagi napi korupsi tidak dimuat dalam UU Pas baru. Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkum HAM, Rika Aprianti menjelaskan bahwa paradigma pemidanaan saat ini sudah bergeser dari keadilan yang bersifat retributive atau pembalasan menjadi korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni reintegrasi sosial antara narapidana dengan masyarakat.

“Perubahan paradigma pemidanaan dan filosofi pemasyarakatan ini merupakan semangat yang ingin disosialisasikan oleh pemerintah dan DPR kepada seluruh masyarakat melalui UU Nomor 22 Tahun 2022,” ujar Rika kepada wartawan GATRA Alfiansyah Ramdhani.

Ia menerangkan pemberian hak remisi, asimilasi, maupun reintegrasi merupakan hak seluruh narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi.



Pinangki Sirna
Malasari

HAK NARAPIDANA DALAM UU 22/2022:

- remisi
- asimilasi
- cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- cuti bersyarat
- cuti menjelang bebas
- pembebasan bersyarat
- hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Namun, Ditjen Pas akan melaksanakan putusan pengadilan jika ada pencabutan hak dalam vonisnya. “Seperti kita ketahui pada napi tipikor ada beberapa yang diputus pidana tambahan, yaitu pencabutan hak politik,” ujar Rika.

Tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Jika ingin mendapat remisi, dalam UU Pas, terpidana diwajibkan memenuhi syarat tertentu, yakni menunjukkan penurunan tingkat risiko. “Dalam menunjukkan penurunan tingkat risiko, narapidana kasus tindak pidana terorisme diharuskan telah menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” Rika menjelaskan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, membenarkan bahwa napi terorisme wajib mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI jika ingin mendapat remisi. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 8 Permenkum HAM RI Nomor 7 Tahun 2022.

“[Ikrar setia] Ini dianggap perlu karena sebagian besar dari tindak pidana terorisme berdasarkan pemahaman ideologi radikal

yang dimiliki pelaku, sehingga proses indoktrinasi untuk setia terhadap Pancasila dan NKRI merupakan langkah yang tepat,” kata Sahroni kepada GATRA.

Ia menjelaskan, remisi bagi koruptor pun tetap ada syaratnya, yakni mengganti kerugian keuangan negara. Adapun syarat *justice collaborator* dihapus karena seiring berjalannya waktu, ketentuan ini rawan penyelewengan. Tanpa menyebut siapa pelakunya, Sahroni menuding beberapa pihak kerap bermain agar narapidana korupsi bisa menjadi *justice collaborator*. Lembaga penegak hukum yang berhak memberikan status *justice collaborator* adalah kejaksaan, KPK dan Polri.

“Lapas (lembaga pemasyarakatan) yang sejatinya merupakan tempat pembinaan narapidana dalam memberikan hak-hak narapidana, tidak boleh diintervensi oleh pihak aparat penegak hukum lainnya. JC (*justice collaborator*) diterbitkan oleh pihak aparat penegak hukum lain,” ujar politisi Partai NasDem itu.

Menyikapi maraknya pemberian remisi dan bebas bersyarat kepada napi korupsi, KPK akan mempertimbangkan untuk membuat tuntutan hukuman yang lebih berat, apalagi jika terdakwa tidak kooperatif. Pemberatan tuntutan, misalnya dengan meminta hakim mencabut hak politik pelaku. Jaksa KPK juga dapat menuntut hak terpidana seperti remisi dan pembebasan bersyarat dihilangkan.

“Dalam tuntutan mungkin akan kita tambahkan [masa hukumannya]. Kalau itu pejabat publik yaitu mencabut hak dipilih. Dan mencabut supaya terdakwa tidak mendapatkan haknya selaku terpidana, itu bisa dicabut,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

KPK, Alex melanjutkan, saat ini tak berwenang mengurus remisi dan pembebasan bersyarat terpidana korupsi, pasca MA membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012. “Dulu, kalau itu tahanan perkaranya dari KPK, itu [remisi] dari rutan (rumah tahanan) minta rekomendasi KPK, sekarang dibatalkan PP itu oleh MA,” ucapnya. ■

PUTRI KARTIKA UTAMI DAN ERLINA FURY SANTIKA

KORUPSI

Drama Taipan Surya Rugikan Negara

Surya Darmadi didakwa rugikan negara Rp86,5 triliun. Penerapan nilai kerugian perekonomian negara sempat naik-turun. Pembuktian jaksa dinantikan dalam persidangan.

Bos Duta Palma Grup, Surya Darmadi, buka suara usai dirinya menjalani sidang perdana perkara dugaan penyerobotan lahan negara untuk perkebunan sawit di Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 8 September lalu. Bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menurut Surya, tidaklah benar.

“Saya dituduh kabur korupsi tapi

saya kooperatif. Apa yang saya punya perusahaan rekening diblokir karyawan semua tidak bisa bayar gaji, tidak ada bijak. Menghancurkan perusahaan saya. Saya lihat angkanya setengah gila, saya enggak *ngerti* naik-turun naik turun kan enggak *bener*,” kata Surya dengan nada yang meninggi sambil berjalan menuju mobil tahanan.

Surya didakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas 37.095 hektare.

Perkara ini diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar Rp86,5 triliun dari total kerugian telah sesuai dengan revisi hasil perhitungan dari ahli kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-



Surya Darmadi usai menjalani sidang perdana dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta

ngunan (BPKP) dan ahli perekonomian.

Surya juga pemilik Darmex Group yang terdiri dari 11 perusahaan yang berlokasi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jakarta dan Bekasi yang bergerak di usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan turunannya, pengangkutan serta properti. Ia merasa kesal karena rekening perusahaan miliknya telah diblokir Kejaksaan.

Alhasil 23.000 karyawan yang tersebar di korporasi afiliasi Duta Palma Group tidak bisa mendapatkan gajinya. Pihak Kejaksaan juga telah menyita berbagai aset perkebunan dan beberapa kantor Duta Palma Group. Surya beranggapan bahwa aset perkebunannya bernilai Rp4 triliun.

Berbeda jauh dengan kerugian yang didakwakan pada dirinya. Ia juga merasa bingung angka kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan berubah-ubah. Dari awal temuan Rp78 triliun kemudian membengkak jadi Rp104,1 triliun dan berbeda saat dakwaan.

Dalam dakwaannya, JPU menyatakan bahwa Surya Darmadi merugikan keuangan negara Rp4,7 triliun dan US\$7.885.857 atau bila dikurskan saat ini adalah Rp117.460.633.962, yang totalnya adalah Rp 4,9 triliun. Ditambah merugikan perekonomian negara Rp 73.9 triliun. Jika dijumlahkan seluruhnya, maka totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891.

Jaksa Bima Suprayoga membacakan dakwaan menyatakan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan.

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan. Bima, yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, menjelaskan dalam dakwaan perihal kerugian perekonomian negara dalam perkara Surya Darmadi berdasarkan ahli dari universitas. Yakni Laporan dari

Kejaksaan bukan baru sekali menerapkan kerugian perekonomian negara sebagai unsur yang bisa dibuktikan. Sebelum Duta Palma, Korps Adhyaksa sudah pernah menerapkan pada beberapa kasus seperti perkara pemberian kredit oleh bekas Dirut Bank Mandiri dan korupsi impor tekstil di Ditjen Bea dan Cukai.

Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada tanggal 24 Agustus 2022.

Di mana hasil pemeriksaan menghasilkan bahwa alih lahan ilegal telah memunculkan biaya eksternalitas negatif karena kualitas lingkungan mengalami penurunan. PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur bertanggung jawab untuk menanggung biaya *recovery* dan proses *recovery* lingkungan.

Apabila biaya *recovery* tidak dibebankan kepada PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur, maka biaya *recovery* akan menjadi tanggungan negara.

Hasil identifikasi terhadap kualitas tanah dan air di kawasan perkebunan menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada perubahan *nature* yang dihadapi rumah tangga dan dunia usaha di lokasi tersebut. Selain itu kerugian tersebut terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologis), biaya kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang.

Total biaya penurunan daya dukung lingkungan beserta biaya *recovery* lingkungan atas lahan yang dialih fungsikan secara ilegal bernilai total sebesar Rp73.920.690.300.000,00. "Alih lahan yang dilakukan tanpa izin memiliki konsekuensi adanya kewajiban perusahaan terkait alih lahan maupun pengusahaan kebun sawit tidak dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini berdampak pada hilangnya penerimaan pemerintah yang seharusnya diba-

yarkan oleh perusahaan," kata Bima saat membaca surat dakwaan dalam persidangan.

Negara seharusnya memperoleh haknya berupa pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan. Dari usaha perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik Surya Darmadi dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2020, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2,2 triliun.

Kemudian, di sekitar kawasan perkebunan terjadi penurunan pendapatan rumah tangga karena perusahaan sama sekali tidak menerapkan sawit rakyat. Hilangnya pendapatan rumah tangga dari program sawit rakyat merupakan bagian dari keuntungan ilegal yang diperoleh oleh perusahaan. Hasil perhitungan menunjukkan kerugian sebesar Rp556.086.968.453,00 akibat tidak diimplementasikannya ketentuan tentang sawit rakyat.

Koperasi rumah tangga yang mengelola sawit rakyat juga tidak mendapat kesempatan berkembang. Karena pola inti-plasma di sektor sawit pada umumnya terjadi melalui hubungan kerja sama antara perusahaan sebagai inti dengan para petani sawit rakyat yang tergabung dalam koperasi. Selain itu terdapat pelanggaran izin yang dilakukan PT Kencana Amal Tani, PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur telah menimbulkan sejumlah gejolak (konflik sosial) dalam masyarakat.



DOK. KEJAGUNG RI

“Efek domino dari akibat perbuatan korupsi itulah yang mengakibatkan perekonomian negara. Kasus SD (Surya Darmadi) termasuk pemanfaatan, pengelolaan dan penguasaan lahan secara ilegal itu dihitung sehingga masyarakat di sekitar terdampak akses ekonominya. *Excess* dari korupsi yang dihitung dari perekonomian negara ini *real loss*, bukan *potential loss*.”

KETUT SUMEDANA

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, kepada GATRA menjelaskan bahwa Korps Adhayaksa bukan kali pertama menerapkan kerugian perekonomian negara sebagai unsur yang bisa dibuktikan.

Menurutnya, Kejaksaan sudah pernah menerapkan pada beberapa kasus bahkan sejak 1987 sebelum ada-

nya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat terdakwa secara melawan hukum membangun tanpa izin di wilayah perairan milik negara. Hal itu mengakibatkan negara dan masyarakat tidak dapat memanfaatkan, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan yang merugikan perekonomian negara.

Di kasus lain, Majelis Hakim

dalam pertimbangannya menilai terdakwa Eduardus Cornelis William Neloe selaku Direktur Utama Bank Mandiri 2000-2005 yang memberikan pinjaman (*bridging loan*) secara melawan hukum termasuk merugikan perekonomian negara. Karena dengan memberikan jumlah kredit yang besar di saat kondisi negara dan masyarakat membutuhkan justru diberikan kepada pengusaha yang tidak produktif.

Sedangkan penerapan kerugian perekonomian negara oleh Kejaksaan, yang terbaru sebelum perkara Surya Darmadi adalah terkait kasus ekspor tekstil. Terdakwa Irianto selaku Direktur PT Peter Garmino Prima dan Komisaris PT Flemings Indo Batam, yang diputus Mahkamah Agung pada 8 Desember 2021.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan akibat terjadinya penyalahgunaan izin impor maka terjadi lonjakan jumlah impor barang yang masuk yang sebagian besar berasal dari Tiongkok berpotensi merugikan produk tekstil dalam negeri. Juga menyebabkan penutupan sejumlah pabrik tekstil dan UMKM hingga berdampak terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran selama 2018-2019.

“Efek domino dari akibat perbuatan korupsi itulah yang mengakibatkan perekonomian negara. Kasus SD (Surya Darmadi) termasuk pemanfaatan, pengelolaan dan penguasaan lahan secara ilegal itu dihitung sehingga masyarakat di sekitar terdampak akses ekonominya. *Excess* dari korupsi yang dihitung dari perekonomian negara ini *real loss*, bukan *potential loss*,” kata Ketut pada Selasa, 13 September lalu.

Ketut menjelaskan, hingga saat ini hitungan kasar dari aset yang disita Kejaksaan dari Surya Darmadi bernilai total Rp17 triliun. Hal itu terdiri dari uang Rp5,2 triliun dan aset yang berjumlah lebih dari 30 bernilai Rp11 triliun. Kejaksaan masih terus menyita aset milik Surya dan juga korporasi yang terafiliasi dengannya.

Ketut berharap nantinya dari hasil sita aset nanti bisa memenuhi rasa keadilan. Termasuk berkaca seluruh riwayat penerapan dan pembuktian kerugian

perekonomian negara, diharapkan dapat menjadi yurisprudensi bagi penegak hukum dalam mengambil pertimbangan dan keputusan.

"Nanti tinggal tergantung pengadilan berapa memutuskan kerugian negara yang diputus. Kita optimis tetap bekerja penyitaan *asset tracing*. Yang digunakan jaksa ada di surat dakwaan yang dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa," ia membeberkan.

Kemudian, kalau kemungkinan kerugian perekonomian negara berubah dari keputusan pengadilan, sambung Ketut, itu adalah hal yang wajar dan biasa. "Kemungkinan lebih tinggi lebih rendah hukumannya ada di pengadilan," ia menjelaskan.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Fach-

rizal Afandi, menyampaikan untuk menentukan kerugian negara dan menghitung besarnya kerugian negara khususnya dalam perkara Surya Darmadi bisa merujuk dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Unsur merugikan perekonomian negara sendiri disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Kata Fachrizal, memang Pasal 2 dan 3 di dalam UU tersebut sering menjadi favorit aparat penegak hukum karena tafsirnya bermacam-macam. "Perekonomian itu disebut tidak secara implisit. Jadi termasuk juga ada kerugian yang nyata. Kalau di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006, yang disebut kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ada *actual loss* atau *potential loss*. Jadi perekonomian negara juga bisa disebut sebagai potensi itu bisa masuk," Fachrizal menjelaskan.

Fachrizal mempertanyakan bagaimana kemudian kemampuan jaksa menghadirkan bukti di persidangan. Jangan sampai kerugian yang fantastis triliunan tapi yang dibuktikan di persidangan tidak sesuai itu bisa masalah. Seperti kasus mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan kemudian MA ditingkat kasasi itu dibebaskan karena bukan kerugian negara.

"Kalau kita lihat menarik perekonomian negara sangat abstrak kalau kerugian jelas. Dalam kasus SD (Surya Darmadi) menarik, karena ada kajian dari UGM. Kalau ada korupsi nilainya begitu banyak pembuktiannya sangat rumit. Saya kira kalau memang jaksa bisa membuktikan triliunan itu prestasi dan harus kita apresiasi," ujarnya.

Fachrizal berharap, langkah Kejaksaan tidak hanya menjadi *gimmick* saja namun harus dibuktikan dalam persidangan. Karena kaitannya dengan pengembalian uang negara dari hasil sita dan eksekusi proses perampasan aset. Karena dengan penjeratan melalui pemiskinan bisa dilakukan maksimal ketimbang hanya memenjarakan saja. ■

WAHYU WACHID ANSHORY

Fachrizal Afandi

KOMPETISI BAND

PELAJAR 2022

ONLINE OFFLINE

JUDGES

YOZAR AMRULLAH
Purwacaraka Teacher

BADAI
eks Krispatih

YANYAN ERYANA
Private Teacher

MUKHLISON WIDODO
PemRed Majalah GATRA

Registration

<https://tinyurl.com/FWVBAND>

more info:

082123533562

@funwithvirzi

@funtainment.co

@funwithvirzi

Registration

1 - 23 September 2022

Video submission

5-25 September 2022

PEJATEN MALL

Best 15th will be concert on Pejaten Mall

29 Oktober 2022

Registration fee

200K

Media Partner

GATRA

INGGRIS

MONARKI MENA



Ratu Elizabeth II

TAP TAK PASTI

RAJA INGGRIS YANG BARU NAIK TAKHTA, CHARLES III MENGHADAPI SEJUMLAH TANTANGAN BARU DI NEGERINYA. BERAGAM SKANDAL PRIBADI HINGGA WACANA MENOLAK MONARKI DARI RAKYAT KEMBALI MENGEMUKA. INSTITUSI KELUARGA KERAJAAN PUN HENDAK DIRAMPINGKAN.

Ketika Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis pekan lalu di usia 96 tahun, bisa dikatakan, satu lambang stabilitas Inggris tanggal. Begitu yang dirasakan mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Menurutny, Sang Ratu jadisosok tolok ukur stabilitas terhadap keberlangsungan Inggris. Bahkan lebih dari sekedar simbol, putri sulung Raja George VI tersebut juga menjadi sandaran di tengah turbulensi yang dihadapi Inggris selama tujuh dekade terakhir.

Dilansir *Time*, kini masa depan monarki Inggris menatap ketidakpastian. Memang, hasil survei pada Juni lalu menunjukkan bahwa sekitar 62% rakyat Inggris masih mendukung institusi kerajaan. Tetapi curahan dukungan dan kekaguman untuk Ratu tidak boleh disalahartikan sebagai dukungan yang tak tergoyahkan untuk keluarga kerajaan secara keseluruhan.

Kehebohan terbaru adalah keputusan Pangeran Harry dan Meghan Markle untuk mundur dari kehidupan serta ketentuan monarki dan memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Duke of Sussex tersebut diketahui menetap di Los Angeles, California.

Sementara itu, skandal terbesar jelas kasus pelecehan seksual yang dihadapi oleh putra kedua mendiang ratu, Pangeran Andrew. Sang Duke of York terungkap merupakan rekanan Jeffrey Epstein, ahli keuangan Amerika Serikat yang dipenjara setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran seksual.

Salah satu korban Epstein, Virginia Giuffre, menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual saat dirinya masih remaja. Andrew menyangkal tuduhan itu dan tidak didakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Namun, pada Januari 2022, dia kehilangan pangkat militer dan perlindungan bagi keluarga kerajaan, serta menyerahkan gelar Royal Highness.

Alhasil, dalam prosesi penghormatan jenazah Ratu Elizabeth II di Edinburgh, Skotlandia pada Senin lalu, kedua pangeran ini tidak berhak lagi mengenakan seragam. Peti jenazah Sang Ratu dipindahkan dari Istana Holyroodhouse ke Katedral St. Giles untuk upacara kebaktian.

Raja Charles III berjalan kaki di belakang mobil jenazah Ratu Elizabeth II yang melintasi jalan di Edinburgh. Ia didampingi ketiga saudaranya, yakni Putri Anne, Pangeran Edward, dan Pangeran Andrew.

Sayang, upacara khyusuk tersebut sempat terganggu akibat beberapa insiden. Kepolisian Skotlandia menangkap seorang pria berusia 22 tahun yang mengolok-olok Pangeran Andrew di sela-sela prosesi. "Andrew, kamu orang tua yang tercela," teriak pria yang belum diungkap namanya itu.

Sehari sebelumnya, seorang pria berusia 74 tahun ditangkap dan didakwa melanggar kedamaian upacara. Di tempat terpisah, seorang wanita berusia 22 tahun ditangkap polisi karena membawa papan slogan yang menggambarkan tanda anti-monarki.

Bagi sejumlah analis, ujian terbesar yang dihadapi Raja yang baru adalah, apakah dirinya dapat meniru citra stabilitas ibunya dan melestarikan institusi yang telah dilindungi mati-matian selama ini oleh Sang Ratu.

Ratu Elizabeth II, yang naik takhta pada usia 25 tahun, memiliki waktu seumur hidup untuk membuktikan dirinya. Charles, yang pada usia 73 tahun, adalah raja tertua yang naik takhta dalam sejarah Inggris, tidak akan memiliki kesempatan yang sama.

Ketika menyandang gelar sebagai Pangeran Wales selama ini, Charles telah membentuk beragam citra. Salah satu yang paling membekas bagi banyak orang adalah konflik rumah tangganya dengan Putri Diana

GOV.UK / ROYAL.UK



Raja Charles III bersama istrinya saat berkunjung ke Irlandia Utara

ROYAL LUK

beserta perselingkuhannya dengan Camilla Parker Bowles. Sebagai istri kedua, Camilla kini menyandang gelar Permaisuri (Queen Consort).

Charles juga dikenal kerap vokal terkait sejumlah isu. Dia tak segan menyuarakan pendapatnya atas beragam hal, mulai dari soal tanaman, perubahan iklim, hubungan Inggris dengan Cina, hingga ketidaksukaannya terhadap rencana pemerintah untuk mengirim imigran gelap ke Rwanda.

Pada 2015 silam, pers Inggris akhirnya sukses meminta agar memo-

memo rahasia Charles yang ditulis di era PM Tony Blair diungkap untuk publik. Setelah berjuang selama satu dekade, pemerintah berhasil membuka isi 27 korespondensi yang diberi julukan "Black Spider Memo" - karena ditulis dengan tulisan tangan dan menggunakan tinta hitam.

Memo rahasia itu merupakan lobi tingkat tinggi Charles dan dianggap di luar kewenangannya karena mencampuri kebijakan pemerintah. Dia diketahui memiliki kepentingan besar dalam kepemilikan pertanian di Devon, Cornwall,

Herefordshire, Somerset, dan Wales. Dia rajin menulis memo untuk menteri-menteri yang terkait dengan usahanya di bidang pertanian, kesehatan, makanan, dan perencanaan. Tak hanya itu, dia tak segan menulis kepada PM Blair soal helikopter militer di Irak.

Namun, Raja menjelaskan dalam wawancara *BBC* empat tahun lalu, bahwa dia mengerti dia harus berperilaku berbeda sebagai raja. "Jelas saya tidak akan bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan sebagai pewaris," katanya. "Saya tidak akan ikut campur dalam masalah politik yang berdaulat karena saya tidak sebodoh itu."

"Charles memiliki kecenderungan aktivis," ungkap pakar soal Keluarga Kerajaan, Richard Fitzwilliams. Ini bisa jadi karena dalam sebagian besar hidupnya, pekerjaan utama Charles adalah mengejar minatnya yang diwujudkan melalui berbagai yayasan dan amal.

"Dia tidak memiliki tingkat mistik yang sama seperti yang dikembangkan Ratu Elizabeth II dengan sangat sukses selama hidupnya. Ratu menjadi ikon di seluruh dunia karena dia menjaga Mahkota dengan cara yang tak mungkin dilakukan Charles, sebab Charles sudah mewakili satu isu tertentu," tambah Brooke Newman, seorang sejarawan Inggris modern awal di Virginia

NEGARA-NEGARA PERSEMAKMRAN INGGRIS (COMMONWEALTH OF NATIONS)

Negara Persemakmuran Ini Merupakan Persatuan Secara Sukarela Negara-Negara Berdaulat Yang Didirikan Maupun Pernah Dikuasai Oleh Kerajaan Inggris.

ANGGOTA: 56 NEGARA



- **AFRIKA** (21 NEGARA)
- **ASIA** (8 NEGARA)
- **AMERIKA & KARIBIA** (13 NEGARA)
- **EROPA** (3 NEGARA)
- **PASIFIK** (11 NEGARA)

BEKAS ANGGOTA: 3 NEGARA
(REPUBLIK IRLANDIA, ZIMBABWE, GAMBIA)

Sumber: Diolah dari beragam sumber

Commonwealth University.

Agar monarki terus dilihat sebagai sumber persatuan nasional dan bagi Raja untuk dapat melaksanakan tugas-tugas seremonialnya tanpa mengundang tuduhan keberpihakan, Fitzwilliam mengatakan bahwa raja baru perlu menjaga agar pendapatnya tetap terkendali.

Charles telah mengakui kenyataan ini di masa lalu. Dalam pidato nasional pertamanya sejak naik takhta, Jumat, 9 September lalu, dia mengakui bahwa ketika perannya berubah, tidak mungkin lagi bagi dia untuk memberikan begitu banyak waktu dan energi untuk amal maupun isu-isu lain yang dia pedulikan.

Dilansir dari *The Guardian*, pidato pertamanya itu telah memberikan penghormatan yang menyentuh kepada ibunya. Hasilnya, banyak respons positif publik terhadapnya dan banyak warga Inggris yang menginginkannya untuk berhasil memimpin kerajaan.

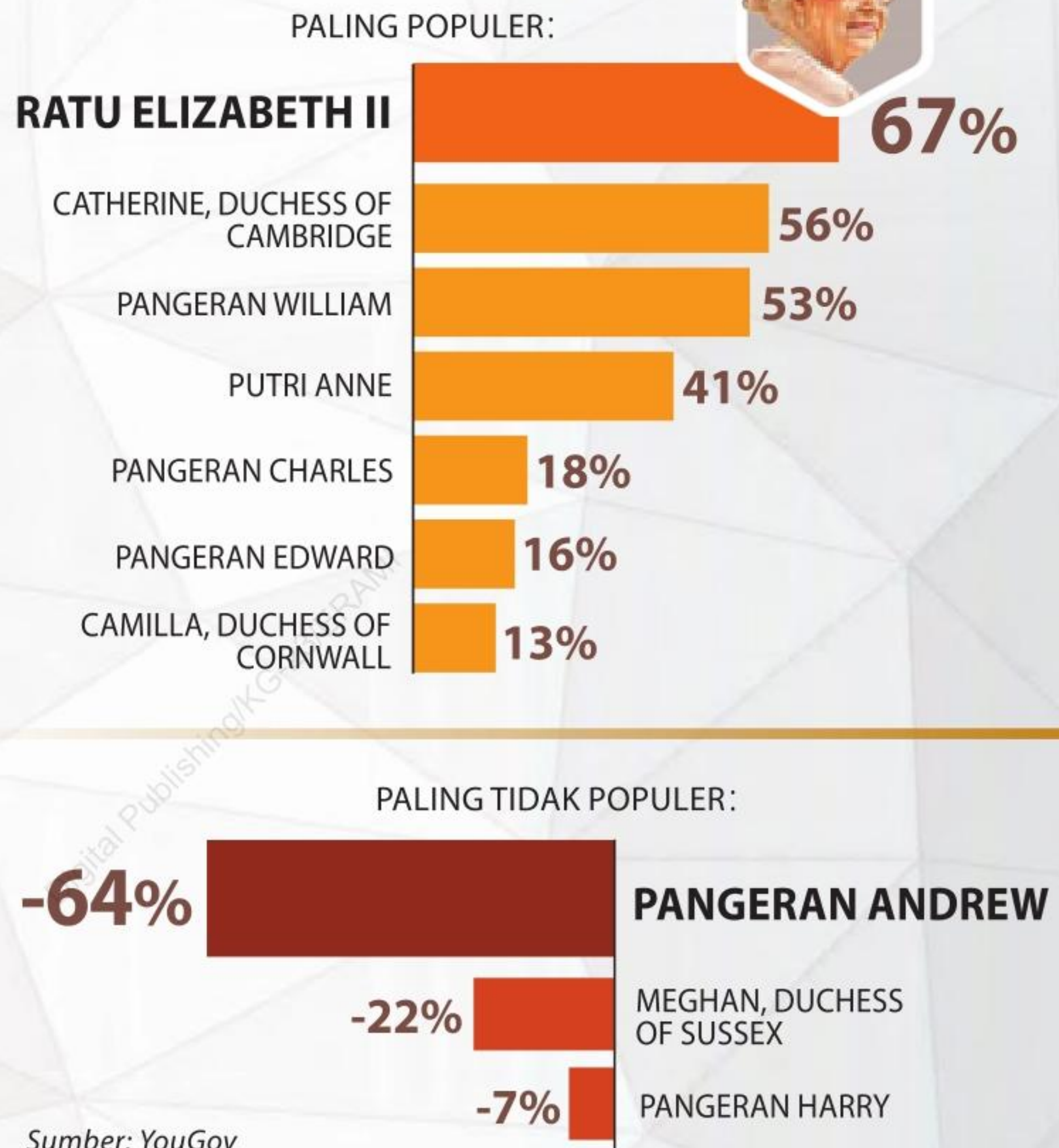
Tantangan lain yang dihadapi Charles adalah modernisasi monarki. Ketika masih ada di posisi putra mahkota, dia sudah bertekad untuk merampingkan komposisi keluarga kerajaan sebagai sebuah institusi. Di mana akan ada lebih sedikit anggota monarki yang mendapat gaji dari pajak warga Inggris. Putra bungsunya Harry kini menjadi katalis terkait wacana tersebut. Mengingat kehidupannya di AS tidak lagi banyak didukung pundi-pundi kerajaan.

Dalam era media sosial seperti sekarang ini, garis pemisah antara pejabat dan selebritas, ataupun antara publik dan swasta, kian kabur batasnya. Maka makin berat bagi keluarga kerajaan untuk menempatkan diri sebagai anggota monarki sekaligus harus dekat dengan warga.

Raja Charles III, naik takhta ketika tengah terjadi sejumlah tantangan eksistensial dalam skala yang tak pernah dia hadapi sebelumnya. Pengangkatannya ini hanya beberapa hari setelah perdana menteri baru ditunjuk oleh ibunya. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina telah memicu krisis energi yang akan menciptakan kesulitan keuangan yang parah bagi banyak rumah tangga dan bisnis.

Inggris sedang berjuang untuk mengatur kembali posisinya di tengah-tengah ketidakstabilan global yang

POPULARITAS ANGGOTA KERAJAAN INGGRIS DATA & GELAR PER KUARTAL-II 2022



hebat dan setelah keputusan yang sangat penting untuk meninggalkan Uni Eropa. Integritas Inggris Raya tetap dipertanyakan karena kampanye kemerdekaan Skotlandia terus mendesak untuk diadakannya referendum lain.

Nun jauh dari Karibia, negara Antigua dan Barbuda berencana untuk memutuskan apakah akan menjadi republik dalam tiga tahun ke depan. Meski tak hendak terpisah dari Negara Persemakmuran (Commonwealth), mereka hendak mencopot status Raja Charles III sebagai kepala negara mereka. "Ini adalah masalah yang harus

dibawa ke referendum dalam mungkin tiga tahun ke depan," ujar Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne, kepada *ITV News* pada Sabtu, 10 September lalu.

Setahun sebelumnya, Barbados membuat pemungutan suara terkait rencana untuk merdeka dari Inggris. Hasilnya, Barbados telah menjadi republik, menggantikan raja Inggris sebagai kepala negara, dan memutuskan ikatan kolonial terakhir yang tersisa hampir 400 tahun setelah kapal Inggris pertama tiba di pulau Karibia. Republik baru itu lahir 29 November 2021. ■

FLORA LIBRA YANTI

INGGRIS

RATU MANGKAT SAAT EKONOMI TERSUMBAT

EKONOMI INGGRIS TERANCAM RESESI. TAGIHAN ENERGI TERUS MELONJAK. INFLASI INGGRIS BERPOTENSI MELEWATI LEVEL 18%.

Mary Elizabeth Truss, Perdana Menteri Inggris, tak bisa menahan kesedihannya atas mangkatnya Ratu Elizabeth Alexandra Mary (Elizabeth II). Pasalnya, dua hari sebelum meninggal, Ratu Elizabeth II melantik Truss di Istana Balmoral, Skotlandia.

Pelantikan itu tak biasa, karena acara prosesi penyerahan kekuasaan seringnya berlangsung di Istana Buckingham, London. Terakhir kali penyerahan kekuasaan di Balmoral terjadi pada tahun 1885 atau 137 tahun lalu.

Truss mendapat kabar dari Sekretaris Kabinet Pemerintahan Inggris, Simon Case, tentang kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022 sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Dalam pidato penghormatan terakhir, Truss menyebut bahwa kematian Elizabeth II telah mengagetkan dunia. "Ratu Elizabeth II adalah fondasi di mana Inggris modern dibangun," pidato Truss, pada 8 September lalu.

Menurut Truss, pencapaian Inggris sebagai negara besar sekarang ini merupakan andil Elizabeth II. "Negara kita telah

Elizabeth Truss

tumbuh dan berkembang di bawah pemerintahannya. Dia naik tahta tepat setelah Perang Dunia Kedua,” ujar Perdana Menteri perempuan ketiga Inggris itu.

Salah satu warisan Elizabeth menurut Truss adalah memperbanyak anggota Persemakmuran Inggris. Dia memperjuangkan perkembangan persemakmuran dari tadinya tujuh negara menjadi 56 negara, yang mencakup setiap benua di dunia,” katanya.

Truss menegaskan bahwa Elizabeth II adalah penguasa Inggris terlama. “Merupakan pencapaian luar biasa, Inggris dipimpin dengan martabat dan rahmat seperti saat ini, selama tujuh puluh tahun,” ujarnya.

Bagi Truss, Elizabeth II adalah inspirator. Truss makin mengagumi Elizabeth II, karena meskipun dalam kondisi sedang sakit, Elizabeth II masih

sempat melantik Truss menjadi perdana Menteri Inggris baru, menggantikan Boris Johnson.

Truss terpilih sebagai perdana Menteri, setelah mengalahkan pesaingnya, sesama kader partai konservatif Inggris, yaitu Rishi Sunak, mantan Menteri Keuangan Inggris. Truss, yang sebelumnya adalah Menteri Luar Negeri Inggris, meraup suara 57,4%, sedangkan Rishi Sunak sebanyak 42,6%.

Kemenangan Truss tidak terlepas dari dukungan kuat Menteri Pertahanan Ben Wallace. Ben merupakan sosok yang dihormati di kalangan anggota partai konservatif karena penanganannya terhadap krisis Ukraina.

Persoalannya, Truss terpilih di tengah gonjang-ganjing ekonomi Inggris. Harga bahan bakar dan listrik melonjak, menyebabkan tagihan energi untuk masyarakat dan industri di

Inggris terus meningkat. Dalam 18 bulan terakhir, tagihan energi naik dari rata-rata 1.042 poundsterling per tahun atau setara dengan Rp18 juta menjadi 1.971 poundsterling per tahun atau setara dengan Rp33,87 juta. Atau hampir dua kali lipat.

Akibat kenaikan tagihan energi ini, diperkirakan 6,5 juta rumah tangga Inggris mengalami kemiskinan bahan bakar. National Energy Action (NEA), lembaga amal di Inggris, memperkirakan naiknya tagihan energi akan menyebabkan 8,8 juta rumah tangga di seluruh Inggris mengalami kemiskinan bahan bakar di akhir bulan ini, dan lebih dari 10 juta pada Januari tahun depan.

Di samping itu, kajian *Bloomberg* memperkirakan pasokan listrik Inggris hanya sekitar seperenam dari permintaan pada musim dingin nanti, yang berlangsung November-Februari. Ra-



Perdana Menteri Liz Truss bertemu dengan Raja Charles III

ROYAL LUK

ta-rata suhu di periode tersebut 3-10 derajat Celcius. Kondisi ini menyebabkan konsumsi energi rumah tangga makin meningkat.

Tekanan krisis energi ini membuat regulator listrik di Inggris, yaitu The Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem), sempat mengumumkan kenaikan batas atas tagihan energi tahunan, dari 1.971 poundsterling ke 3.549 poundsterling atau sekitar Rp61 juta per tahun. Aturan tersebut berlaku mulai Oktober mendatang.

Menurut otoritas Ofgem, harga energi melonjak sejak meletusnya invasi Rusia ke Ukraina. "Mulai melonjak saat dunia terlepas dari pandemi Covid-19, kemudian didorong lebih tinggi kembali ke level rekor oleh Rusia yang secara perlahan mematikan pasokan gas ke Eropa," demikian pernyataan resmi Chief Executive Officer Ofgem, Jonathan Brearley, seperti dikutip dari *AFP*.

Menurut Jonathan, keputusan menaikkan tagihan energi, adalah pilihan sulit. Jonathan mengatakan, kenaikan tersebut sangat berdampak kepada konsumsi rumah tangga. "Saya sudah berbicara dengan pelanggan secara teratur dan saya tahu bahwa berita hari ini akan sangat mengkhawatirkan bagi banyak orang," ujarnya bulan lalu.

Truss, yang baru terpilih menjadi perdana menteri, mengeluarkan kebijakan setelah menggelar rapat perdana dengan kabinetnya. Truss, meralat kebijakan Ofgem tadi, dengan membatalkan biaya tagihan energi sebesar 3.549 poundsterling.

Pada 8 September lalu, Truss mengumumkan bahwa pemerintah Inggris menurunkan batas tagihan energi menjadi 2.500 poundsterling atau sekitar Rp43 juta per tahun. Tarif ini tidak akan berubah selama dua tahun ke depan. Kebijakan jaminan harga energi ini diberlakukan agar pengeluaran dan biaya hidup rumah tangga, tidak membengkak hingga musim dingin nanti.

Selain memangkas harga tagihan Truss juga berencana menggelontorkan bantuan hingga 150 miliar poundsterling atau setara dengan Rp2.578 triliun. Dengan tujuan

Pembangkit listrik di Inggris



mengompensasi harga gas dan bahan bakar lainnya yang dibayarkan perusahaan energi untuk menghasilkan tenaga listrik.

Nilai tadi mencakup 90 miliar poundsterling untuk mendukung rumah tangga dan 60 miliar poundsterling untuk bisnis. Subsidi 150 miliar itu melebihi nilai subsidi gaji jutaan pekerja yang digelontorkan pemerintah selama pandemi untuk mencegah PHK massal, yaitu sebesar 80 miliar poundsterling.

Menurut Truss, kebijakan tersebut tidak hanya mengatasi tingginya tagihan energi, tetapi juga mengatasi akar persoalan krisis energi di Inggris. "Sehingga kami tidak berada dalam posisi ini lagi," ujarnya baru-baru ini.

Kenaikan tagihan energi ikut mengerek inflasi di Inggris. Sampai bulan Juli 2022, inflasi Inggris mencapai 10,1%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Angka inflasi tersebut diperkirakan terus meroket bahkan melebihi rekor di tahun 1976, sebesar 18%.

Office for National Statistics (ONS), kantor pusat statistiknya Inggris merilis, penyebab melonjaknya angka inflasi Inggris disebabkan kenaikan harga pangan, sebesar 12,7% sejak Juli 2021 lalu. Lalu harga listrik mengalami kenaikan sebesar 54% dan kenaikan harga gas sebesar 95,7% per Juli 2022 yoy.

Pada data yang dirilis ONS menunjukkan bahwa pendapatan pekerja yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen turun sebesar 4,1% dalam ti-



“Kami juga belum melihat investasi yang lebih besar dan lebih mendesak dalam peluncuran langkah-langkah efisiensi energi di seluruh rumah tangga di Inggris.”

MIKE THORNTON

Kepala Eksekutif Energy Saving Trust

bijakan lebih jauh, yaitu membantu masyarakat yang paling membutuhkan. “Dan daerah-daerah yang sangat membutuhkan efisiensi energi,” keterangan End Fuel Poverty Coalition.

Menurut Kepala eksekutif Energy Saving Trust, Mike Thornton, percepatan program energi terbarukan dapat menjamin pasokan energi di Inggris. Yang menjadi persoalan, katanya, ketergantungan masyarakat Inggris yang tinggi kepada bahan bakar fosil masih tinggi.

Mike menilai dari kebijakan yang disampaikan Pemerintah Inggris, tidak ada satu pun kebijakan untuk menghemat penggunaan energi. Padahal kebijakan ini mendesak dan cara tercepat mengurangi beban keuangan energi dan permintaan energi. “Kami juga belum melihat investasi yang lebih besar dan lebih mendesak dalam peluncuran langkah-langkah efisiensi energi di seluruh rumah tangga di Inggris,” ujarnya seperti dikutip dari *website* resmi Energy Saving Trust.

Sementara itu, ekonom dari Citibank, Benjamin Nabarro, meyakini inflasi di Inggris akan mencapai puncaknya di angka 18,6% pada Januari 2023 mendatang. “Pertanyaannya sekarang adalah kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mengimbangi dampak pada inflasi dan ekonomi riil,” kata Nabarro. ■

HENDRY RORIS SIANTURI

ga bulan terakhir hingga Juni. Angka itu merupakan penurunan terbesar sejak pencatatan dimulai pada 2001.

Konsumsi makin tertekan. Karena biaya energi naik terus, sebanyak 6 juta rumah tangga di Inggris sampai memiliki utang kepada penyedia energi, rata-rata sebesar 206 poundsterling atau setara dengan Rp3,5 juta. Utang energi ini diperkirakan akan naik sampai 82% pada bulan Oktober mendatang. Jutaan warga terancam jatuh miskin, jika pemerintah Inggris tidak menggelontorkan kebijakan fiskal yang tepat.

Bank of England meramal Inggris akan jatuh ke dalam resesi di akhir tahun ini. Pada periode kuartal II antara April dan Juni, ekonomi Inggris mengalami kontraksi sebesar 0,1% dibandingkan

dengan kuartal sebelumnya. Itu artinya, pada kuartal III tahun 2022, menurut BoE, Inggris masih mengalami kontraksi kembali.

End Fuel Poverty Coalition, salah satu Lembaga masyarakat di Inggris mengatakan, jika batas harga energi dibekukan pada 2.500 poundsterling, tetap saja 6,9 juta rumah tangga Inggris masih terancam krisis energi pada musim dingin tahun ini. “Terlepas dari rencana pembekuan harga energi, beberapa lingkungan akan mengalami kemiskinan bahan bakar hampir total pada musim dingin ini,” demikian pernyataan resmi End Fuel Poverty Coalition.

End Fuel Poverty Coalition menyarankan Truss agar mengambil ke-

PERNYATAAN TERKAIT RAJA CHARLES III



PRINCEOFWALES.GOV.UK

“Kami optimistis akan masa mendatang seiring dengan proklamasi Yang Mulia Raja Charles III sebagai Penguasa Kanada. Yang Mulia Raja Charles III telah menunjukkan dedikasinya untuk melayani. Kami tidak ragu bahwa komitmennya yang mendalam terhadap pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan kaum muda akan memberikan landasan yang kuat dari mana ia akan terus bekerja menuju perbaikan Persemakmuran dan rakyatnya. Atas nama Pemerintah Kanada, kami menegaskan kesetiaan kami kepada Raja baru Kanada, Yang Mulia Raja Charles III, dan menawarkan dukungan penuh kami kepadanya.”

PM KANADA, JUSTIN TRUDEAU

“Saya mendukung gerakan umum yang mendukung perwujudan sistem republik di negara ini. Saya secara pribadi juga, pada titik ini, mendukung agar kami menjadi republik.”

**MANTAN PM ST. LUCIA,
ALLEN CHASTANET**

“Negara ini berduka atas kematian Ratu Elizabeth II. Meski demikian, kami punya keinginan untuk berubah menjadi negara republik setelah ini. Monarki jarak jauh harusnya tidak terjadi pada abad ke-21.”

**PM JAMAICA,
ANDREW HOLNESS**

“Karena kematian dari Yang Mulia Ratu Elizabeth II, mahkota semata-mata menjadi hak Pangeran Charles Philip Arthur George. Semoga Raja Charles III memiliki tahun-tahun yang panjang dan bahagia untuk memerintah kita. Dengan sepenuh hati dan ketulusan, kami menjanjikan kesetiaan kepadanya.”

GUVERNUR-JENDERAL AUSTRALIA, DAVID HURLEY

“Sebanyak 51% responden menilai bahwa Kanada harusnya tidak lagi berada di bawah monarki Inggris. Oposisi terbesar terhadap monarki adalah responden di Quebec, yang mencapai 71%. Pangeran Charles adalah anggota keluarga kerajaan yang paling tidak disukai kedua, setelah Pangeran Andrew yang penuh skandal. Hampir setiap kelompok usia menilai monarki adalah sistem yang sudah ketinggalan zaman.”

SURVEI ANGUS REID INSTITUTE, APRIL 2022

“Raja Charles III harusnya tetap diizinkan bicara soal perubahan iklim. Isu itu penting baginya. Saya pikir tantangan perubahan iklim ini tidak boleh dilihat sebagai masalah politik, itu harus dilihat sebagai masalah tentang kemanusiaan dan tentang kualitas hidup dan kelangsungan hidup kita sebagai dunia. Ini adalah ancaman besar dan Raja Charles telah menyuarakan isu itu untuk jangka waktu yang lama. Saya pikir keterlibatan dia dalam masalah ini adalah sangat berbeda dengan keterlibatan dalam masalah politik.”

PM AUSTRALIA, ANTHONY ALBANESE

RUTH SAHANAYA & RINDU 3 DIVA

DIVA musik Ruth Sahanaya termasuk sosok yang lama bertahan di belantika musik Tanah Air. Mama Uthe, sapaan karib penyanyi senior ini, sempat *comeback* ke dapur rekaman dengan me-
lempar single berjudul "Satu" pada 2021 lalu.

"Satu" merupakan tembang yang dibawa oleh Uthe sebagai pembuka rangkaian perjalanan proyek mini album bertajuk: *Tiga Generasi*, yang dirilis RANS Music. Menariknya, dalam proyek tersebut, ia tampil bareng Nagita Slavina dan Anneth Delliencia, penyanyi muda yang tengah naik daun.

Namun pandemi tahun lalu membuat industri musik lesu, yang juga berimbas kepada proyek mini album itu. Uthe pun belum ada rencana mengerjakan proyek lagu baru. "Belum ada karya [lagu] lagi. Terakhir yang dikerjakan itu bersama Raffi (Raffi Ahmad) dan Nagita, bahkan ada *single* "Satu" [yang dibuat] khusus buat saya," ujarnya kepada wartawan GATRA Andhika Dinata.

Selain berfokus sebagai ibu penuh waktu, Uthe mengaku saat ini sebagian besar kesibukannya tersita menjadi juri kontestasi lagu dan ajang pencarian bakat. Penyanyi kelahiran Bandung, Jawa Barat itu juga masih sering menerima *job* menyanyi di atas panggung.

"Puji Tuhan, alhamdulillah, Kita senang sudah mulai berkegiatan [bernyanyi] dan sampai akhir tahun sudah banyak lagi tawaran buat manggung," katanya.

Bicara soal menyanyi di atas panggung, Uthe mengenang memori lawasnya ketika tampil bersama penyanyi Titi DJ dan Krisdayanti. Trio penyanyi kondang yang dinamai 3 Diva itu sempat melejit pada era 2000-an. Lewat peran Erwin Gutawa, seorang musisi, komposer sekaligus penata musik andal, 3 Diva begitu tersohor kala itu. Padahal, 3 Diva bukan sebuah grup, melainkan kolaborasi tiga penyanyi solo dengan label manajemen yang berbeda.

Uthe mengungkapkan dirinya kerap menerima masukan dari penggemarnya yang rindudan meminta 3 Diva kembali tampil di publik. Masukan yang sama juga datang dari penggemar Titi DJ dan Krisdayanti. "Kalau untuk berkolaborasi lagi banyak [permintaan]. Jadi, ada dorongan ayo kapan tampil lagi, nyanyi lagi bareng-bareng [3 Diva]," ucapnya semringah.

Sayangnya, rencana tersebut belum kesampaian hingga kini, lantaran personel 3 Diva memiliki kesibukan masing-masing. "Sama [personel] 3 Diva sudah lama enggak ketemu. *Bayangin*, pandemi saja sudah dua tahun lebih," kata Uthe. Meski tidak bertatap muka, ia mengaku keakraban dan komunikasi dengan rekan 3 Diva tetap terjalin melalui telepon seluler dan WhatsApp.

"Apalagi semenjak pandemi, semua kegiatan terhentikan. Kalau misalnya ada perlu, kita punya grup WhatsApp. Yang paling dirindukannya ketemuan, kangen-kangenan, cerita-cerita, dan seru-seruan," kata peraih penghargaan Grand Prix Winner di Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada 1992 itu. ■



REZA RAHADIAN & DEBUT FILM ANIMASI

REZA Rahadian memulai debut dalam produksi film animasi pendek berjudul *Papercraft*. Bertindak sebagai produser, aktor ini berkolaborasi dengan Pudak Wangi, siswi SMA asal Banyuwangi, Jawa Timur. Pudak Wangi merupakan pemenang ajang pencarian bakat Bintang SMA 2021 atas talentanya di bidang animasi.

"Ya, pertama kali memproduksi animasi pendek, khususnya bersama Wawang [sapaan karib Pudak Wangi], pemenang Bintang SMA 2021," ujar Reza ketika ditemui Jihan Astriningtrias dari GATRA di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam proyek tersebut, pemenang empat kali Festival Film Indonesia (FFI) ini mengaku lebih banyak terlibat dalam menjaga jalannya keseluruhan produksi *Papercraft*. Ia sering berdiskusi dengan Pudak Wangi mengenai konstruksi cerita maupun pola ilustrasi film animasi tersebut.

"Menjadi partner diskusi dari Wawang untuk konstruksi ceritanya bagaimana, kemudian alurnya mau seperti apa, gambarnya, polanya akan bagaimana, dan lain-lain," katanya.

Tak hanya itu, Reza juga menjadi pengisi suara karakter Wawan, tokoh utama dalam film animasi tersebut.

Wawan merupakan seorang pria tua yang kembali menemukan mimpi-mimpinya menjelang masa pensiun.

Selama proses perekaman suara, Reza meminta Pudak Wangi untuk mengarahkannya dan mengatur ukuran-ukuran emosi yang diperlukan. Pasalnya, *Papercraft* merupakan proyek milik Pudak Wangi. Ia menempatkan siswi itu sebagai sutradara dalam proses produksinya.

"Waktu proses *recording*, gue menempatkan Wawang sebagai *director* (sutradara). Dia animatornya juga. Jadi, yang paling tahu persis sebenarnya, bayangannya seperti apa, itu adalah visinya sutradara. Jadi *gue pingin* Wawang coba kamu kasih *feedback*, kamu penginnya penempatannya di mana, kamu *pingin* saya seperti apa membawakan karakter ini," ujarnya.

Reza mengaku mendapat banyak pelajaran mengenai spirit dari sosok Pudak Wangi. Terlebih, Pudak Wangi berhasil memproduksi *Papercraft* tanpa mengenyam pendidikan formal di bidang animasi.

"Ini membuka mata kita semua, memang tidak ada kata terlambat, tidak ada kata batasan untuk belajar, karena orang seperti Wawang yang tidak sekolah animasi, tapi bermodalkan keinginan dan *passion* yang begitu kuat pada animasi, belajar lewat YouTube dan lain-lain, dia bisa membuat karya seperti ini. Itu luar biasa," tutur pemeran Bacharuddin "Rudy" Jusuf Habibie dalam film *Habibie & Ainun* itu.

Adapun *Papercraft* berkisah tentang seorang pria tua bernama Wawan yang kehilangan semangat menjelang masa pensiunnya. Namun, di hari-hari terakhir bekerja, dia justru menemukan kembali semangatnya setelah melihat sekumpulan anak-anak SMA di jalan menuju tempatnya bekerja.

Wawan pun memutuskan untuk kembali bermimpi di masa pensiunnya. Ini juga berkat seorang anak SD yang ditemuinya di bus dan kerap memintanya membuat *papercraft* atau kerajinan kertas. 

GATRA/EVA AGRANA ALI



GATRA MEDIA
GROUP

SINCE 1994

KAMI HADIR SELAMA INI, KARENA KAMI DAPAT DIPERCAYA

Kini, berita dan informasi yang akurat dan objektif dari **GATRA** dapat diakses melalui berbagai portal berita yang kami miliki.
Segera bergabung dan Jadi masyarakat Indonesia yang cerdas dan terinformasi dengan benar.

GATRAmagazine **GATRA**TV **GATRA**com **GATRA**pedia

Baca GATRA, Baru Bicara



Unduh Aplikasi **GATRA**
di Smartphone Anda



Gedung Gatra, Jl. Kalibata Timur IV No.15
RT.10/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740



@Gatramediagroup



@gatracomID



@gatra_news

**Jika Anda Butuhkan
Berita Terkini yang Akurat
dan Terpercaya
Go to www.GATRA.com**

Baca GATRA, Baru Bicara



Unduh Aplikasi **GATRA**
di Smartphone Anda

